



rancage!
Bappeda Kuningan



kuningan
gemilang

2025



KUNINGAN MELESAT

Perubahan
RKPD

KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2025

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan Perubahan RKPDP Tahun 2025	5
1.2.1. Maksud	5
1.2.2. Tujuan.....	5
1.3. Dasar Hukum Penyusunan.....	5
1.4. Hubungan Antar Dokumen.....	11
1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPDP	14
BAB II EVALUASI HASIL RKPDP TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I	16
2.1. Capaian Indikator Makro sampai dengan Tahun 2024	16
2.2. Evaluasi RKPDP Tahun 2025 Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah.....	18
2.3. Capaian Program dan Kegiatan Pada Triwulan I Tahun 2025	21
2.4. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	39
2.5. Inovasi Daerah.....	92
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH ..	95
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	95
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2019 - 2023.....	98
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2024	106
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	115
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	127
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah	129
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	134
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	140
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	141
4.2. Prioritas Pembangunan	158
4.2.1. Arah Kebijakan/Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2025	159
4.2.2. Arah Kebijakan/Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025	165

4.2.3. Arah Kebijakan/Prioritas Pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2025.....	168
4.3. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025	214
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	218
BAB VI PENUTUP.....	233

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Capaian Indikator Makro Kabupaten Kuningan Tahun 2024.....	16
Tabel 2. 2	Prioritas Pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2025.....	18
Tabel 2. 3	Rekapitulasi Evaluasi Hasil RKPD Triwulan I Kabupaten Kuningan Tahun 2025	21
Tabel 2. 4	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja.....	36
Tabel 2. 5	Capaian SPM Pendidikan Tahun 2024	40
Tabel 2. 6	Capaian SPM Kesehatan Tahun 2024	41
Tabel 2. 7	Capaian SPM Pekerjaan Umum Tahun 2024.....	43
Tabel 2. 8	Capaian SPM Perumahan dan Permukiman Tahun 2024.....	43
Tabel 2. 9	Capaian SPM Ketentraman dan Ketertiban Tahun 2024.....	45
Tabel 2. 10	Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2024.....	46
Tabel 2. 11	Indikator Kinerja Daerah Pada Kondisi Awal Tahun 2025.....	47
Tabel 2. 12	Inovasi Daerah Kabupaten Kuningan	93
Tabel 3. 13	Nilai Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)	98
Tabel 3. 2	Nilai Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan	99
Tabel 3. 3	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	100
Tabel 3. 4	Laju Pertumbuhan Sektor pada PDRB	101
Tabel 3. 5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	103
Tabel 3. 6	Angka Beban Ketergantungan	103
Tabel 3. 7	Angka Kemiskinan Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2024	105
Tabel 3. 9	Target Kinerja Indikator Makro Pembangunan Ekonomi	106
Tabel 3. 10	Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja per Juni 2025	111
Tabel 3. 11	Target Indikator Kinerja Kabupaten Kuningan Tahun 2025.	112
Tabel 3. 12	Analisis SWOT Ekonomi Kabupaten Kuningan	114
Tabel 3. 13	Realisasi Pendapatan Tahun 2022 - Triwulan I 2025	125
Tabel 3. 14	Proyeksi Target Pendapatan Kabupaten Kuningan Tahun 2023-2025	126
Tabel 3. 15	Realisasi Belanja Tahun 2022 – Bulan April Tahun 2025	131
Tabel 3. 16	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2023-2025	132
Tabel 3. 17	Realisasi Pembiayaan Tahun 2022-2025	135
Tabel 3. 18	Target Pembiayaan Tahun 2023-2025	135
Tabel 3. 19	Perbandingan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah	137

Tabel 4. 1	Tujuan, dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026	147
Tabel 4. 2	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kuningan Tahun 2025 – 2029.....	153
Tabel 4. 3	Perumusan Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029	172
Tabel 4. 4	Penyandingan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Kuningan Tahun 2025 Memperhatikan Visi Misi Bupati Kuningan Tahun 2025-2029.....	178
Tabel 4. 5	Arah Kebijakan, Prioritas Pembangunan dan Program Unggulan Bupati Kuningan untuk Tahun 2025	194
Tabel 4. 6	Program Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan Arah Kebijakan Pengarusutamaan (Mainstreaming) Pembangunan Berkelanjutan (SDG's).....	205
Tabel 4. 7	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pokok-Pokok DPRD Tahun 2025	214
Tabel 5. 1	Target Pendapatan APBD dan Pergeseran APBD Kabupaten Kuningan Tahun 2025	219
Tabel 5. 2	Belanja APBD dan Pergeseran APBD Kabupaten Kuningan	221
Tabel 5. 3	Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Perubahan RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2025 Berdasarkan Perangkat Daerah.....	224
Tabel 5. 4	Capaian SPM Pendidikan Tahun 2024 dan Target Tahun 2025.....	227
Tabel 5. 5	Capaian SPM Kesehatan Tahun 2024 dan Target Tahun 2025.....	228
Tabel 5. 6	Capaian SPM Pekerjaan Umum Tahun 2024 dan Target Tahun 2025.....	229
Tabel 5. 7	Capaian SPM Perumahan dan Permukiman Tahun 2024 dan Target Tahun 2025	230
Tabel 5. 8	Capaian SPM Ketentraman dan Ketertiban Tahun 2024 dan Target Tahun 2025	231
Tabel 5. 9	Capaian SPM Sosial Tahun 2024 dan Target Tahun 2025.....	232

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Bagan Alur Tahapan Tatacara Penyusunan RKPD Kabupaten Kuningan.....	4
Gambar 1. 2	Skema Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Ruang Daerah	12
Gambar 2. 1	Jumlah Anggaran RKPD dan APBD per Prioritas Pembangunan Tahun 2025.....	19
Gambar 2. 2	Jumlah Program Pembangunan per Prioritas Tahun 2025.....	20
Gambar 4. 1	Kerangka Pikir Perumusan Sasaran dan Prioritas Program Pembangunan Antara Pemerintah Pusat Serta Pemerintah Daerah.....	141
Gambar 4. 2	Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026.....	146
Gambar 4. 3	Target Sasaran Visi Indonesia Emas menuju 2045	160
Gambar 4. 4	Tantangan Multi Dimensi RKP 2025	160



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 7 TAHUN 2025**

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 263 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah yang membuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah Kabupaten Kuningan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

7. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan pemerintah daerah di bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran sebelum disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi/Kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen perubahan perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I Pendahuluan
 - b. Bab II Evaluasi hasil triwulan II (triwulan dua) tahun berkenaan
 - c. Bab III Kerangka ekonomi dan keuangan daerah
 - d. Bab IV Sasaran dan prioritas pembangunan daerah
 - e. Bab V Rencana kerja dan pendanaan
 - f. Bab VI Penutup

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dijadikan:

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun Perubahan KUA dan PPAS serta dasar penyusunan perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
- b. pedoman dalam menyusun Perubahan Renja PD Tahun 2025.

Pasal 4

Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dijadikan:

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun Perubahan KUA dan PPAS serta dasar penyusunan perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
- b. pedoman dalam menyusun Perubahan Renja PD Tahun 2025.

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dijadikan:

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun Perubahan KUA dan PPAS serta dasar penyusunan perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
- b. pedoman dalam menyusun Perubahan Renja PD Tahun 2025.

Pasal 4

Rincian lebih lanjut Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan pada
tanggal 23 Juni 2025


BUPATI KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR


Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 23 Juni 2025

Di.
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,


BENI PRIHAYATNO

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas program dan kegiatan, serta kerangka pendanaan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

RKPD Tahun 2025 disusun sebagai penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang, serta mengacu pada arah kebijakan nasional dan provinsi. Namun, dalam pelaksanaannya, dinamika pembangunan dan perubahan berbagai kondisi strategis menuntut adanya penyesuaian terhadap dokumen perencanaan tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kuningan perlu melakukan perubahan terhadap RKPD Tahun 2025.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 mengamanatkan bahwa pemerintah daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita kedalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan pasal 9 ayat (1) Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, perubahan RKPD dilakukan berdasarkan hasil evaluasi

pelaksanaan RKPD tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan, yang menimbulkan penambahan dan/atau pengurangan program, kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2025;

Selanjutnya Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa perumusan perubahan RKPD Tahun 2025 perlu memperhatikan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih dan memperhatikan hasil kesepakatan bersama antara kepala daerah dan ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/ atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, menunjukkan bahwa perlu dilakukan beberapa penyesuaian dalam RKPD Tahun 2025, sebagai berikut:

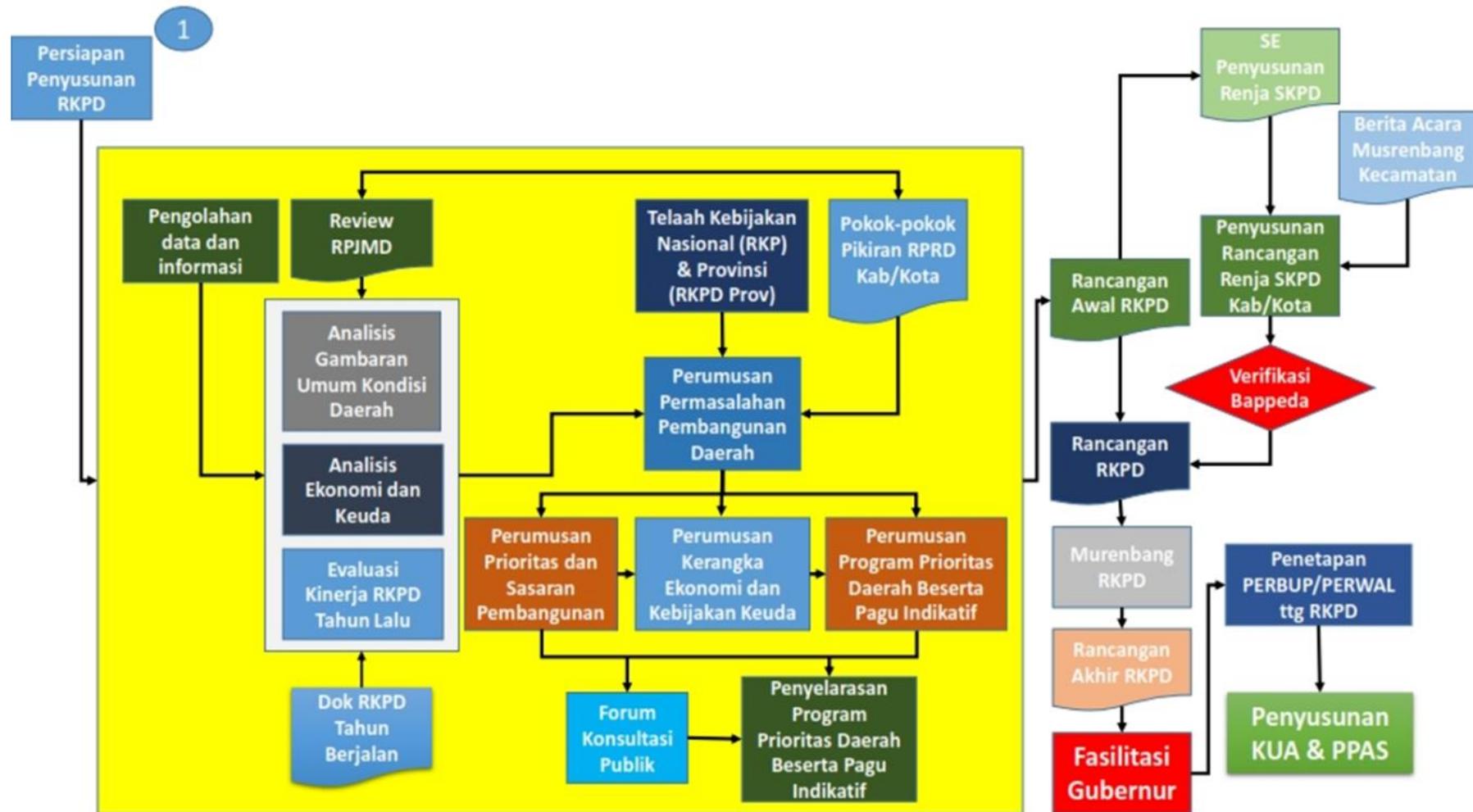
- a. Perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, antara lain disebabkan oleh pergeseran antar rekening belanja menyesuaikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, kebutuhan perangkat daerah dan tetap mengacu pada prioritas daerah. Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut, harus dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang sebelumnya dituangkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025;
- b. Pemenuhan peningkatan proyeksi pendapatan dan kebutuhan pergeseran anggaran kegiatan pada Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan serta konsistensi antara perencanaan dan penganggaran perlu disusun Perubahan RKPD Tahun 2025. Dokumen Perubahan RKPD selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), serta menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2025 yang akan disepakati bersama antara Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lebih lanjut dokumen KUPA-PPASP Tahun 2025 yang telah disepakati tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dasar di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025.

Secara teknis proses penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2025 dilakukan melalui:

- 1) **Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD**, dilakukan dengan menginventarisasi perubahan kebutuhan anggaran disetiap Perangkat Daerah.
- 2) **Penyusunan Rancangan Akhir RKPD**, melalui tahapan pembahasan Prioritas Pembangunan sampai dengan program dan kegiatan sesuai dengan rencana belanja daerah yang telah ditetapkan.
- 3) **Penetapan RKPD**, berpijak kepada Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2025 untuk kemudian diterbitkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2025.

Adapun alur proses penyusunan RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2025 disajikan pada Gambar 1.1



Gambar 1. 1 Bagan Alur Tahapan Tatacara Penyusunan RKPD Kabupaten Kuningan

1.2. Maksud dan Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2025

1.2.1. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2025 dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian perkembangan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 serta penyesuaian kerangka pendanaan akibat adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan dan penganggaran yang sudah berjalan berdasarkan evaluasi Tahun 2025 sampai dengan triwulan I.

1.2.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah untuk:

- a. Terumuskannya permasalahan dan isu strategis pembangunan berdasarkan hasil evaluasi triwulan satu pelaksanaan pembangunan Tahun 2025;
- b. Terumuskannya perubahan prediksi indikator makro pembangunan yang diselaraskan dengan nasional dan Provinsi Jawa Barat;
- c. Terumuskannya perubahan prediksi pendapatan daerah secara detail serta penyesuaian terhadap belanja Perangkat Daerah;
- d. Terumuskannya penyesuaian program dan kegiatan prioritas daerah pada Perangkat Daerah sesuai dengan kemampuan Perangkat Daerah; dan
- e. Terumuskannya keselarasan antara dokumen Perubahan RKPD terhadap dokumen Rancangan RPJMD dan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang melandasi penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat

- (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 259);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215.);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

- serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 20);
17. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 18. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 19. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025;
 20. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019

- tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 29. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 239);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan

- Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3 – 221 Tahun 2025 dan Nomor 100.2.1.3 – 1719 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030;
 34. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
 35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 36. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
 38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
 39. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2025;
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 89 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2011 Nomor 157, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 57);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024 Nomor 5 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat);
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024 Nomor 6 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat: (5/164/2024)) ;
 44. Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2023 Nomor 20);
 45. Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024 Nomor 9).

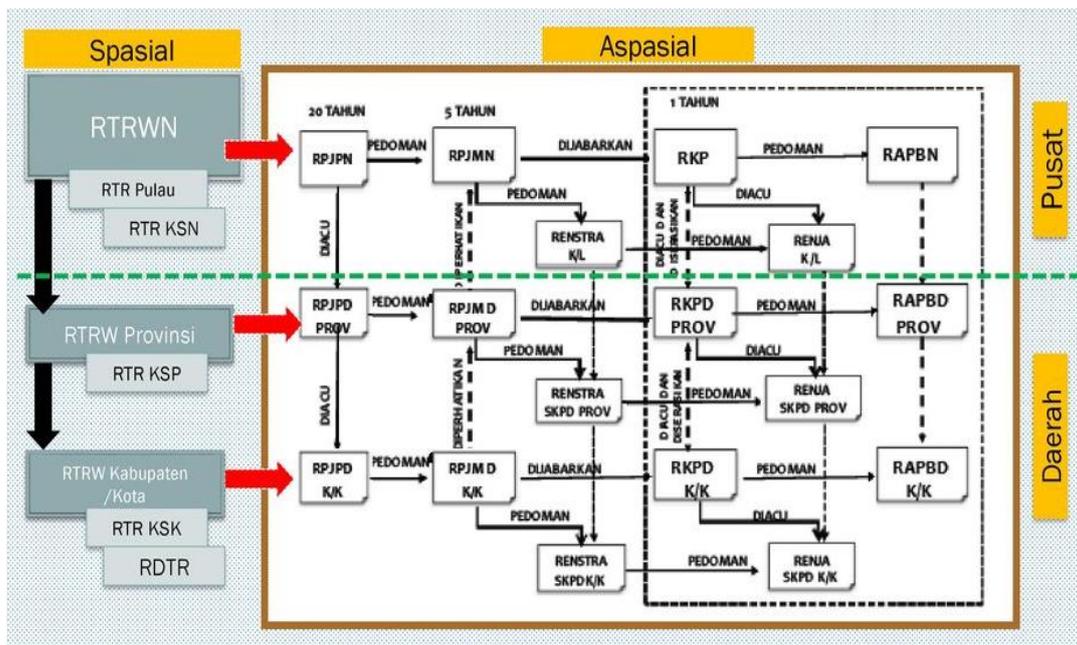
1.4. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2025 memperhatikan RKP Nasional Tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 serta masukan dan aspirasi masyarakat baik yang disampaikan secara

langsung maupun melalui penjaringan aspirasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan.

Pelaksanaan pembangunan Tahun 2025 adalah tahun kedua dari RPD Tahun 2024-2026 dan tahun pertama dari Rancangan RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029. Seluruh Perangkat Daerah pengampu urusan pembangunan harus memastikan target dan sasaran kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan mewujudkan pencapaian indicator perencanaan Pembangunan menengah daerah sekaligus menjadi pendorong percepatan pengentasan kemiskinan, penurunan *stunting* dan pengurangan pengangguran di Kabupaten Kuningan.

Perubahan RKPD ini disusun berdasarkan hubungan antar dokumen yang ada baik di tingkat Nasional maupun Provinsi Jawa Barat, serta memperhatikan daerah sekitar, juga Rencana Tata Ruang Wilayah yang ada. Hubungan antar dokumen yang membentuk sinergi perencanaan dapat digambarkan dalam skema berikut:



Sumber: Bappeda (Data Olahan), 2025

Gambar 1. 2 Skema Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Ruang Daerah

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa penataan ruang berfungsi sebagai landasan utama dan acuan esensial bagi seluruh proses

perencanaan pembangunan. Secara spasial, hierarki dimulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) di tingkat pusat, yang kemudian menjadi pedoman bagi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW Provinsi), dan selanjutnya mengarahkan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW Kabupaten/Kota) serta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai implementasi yang lebih spesifik di lapangan. Sementara itu, dalam dimensi aspaspial atau perencanaan pembangunan, alur serupa mengikuti, dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), hingga Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di tingkat pusat yang bermuara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alur ini direplikasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan akhirnya Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hubungan "pedoman" dan "diacu" yang ditunjukkan dalam diagram ini sangat krusial; setiap dokumen perencanaan pembangunan harus merujuk pada dan selaras dengan rencana tata ruang yang relevan, baik secara vertikal maupun horizontal. Ini berarti bahwa visi, arah, dan kebijakan penataan ruang yang ditetapkan dalam dokumen spasial harus menjadi dasar pertimbangan utama dalam perumusan program dan alokasi anggaran pembangunan, memastikan bahwa setiap inisiatif pembangunan di daerah tidak hanya efektif secara ekonomi dan sosial, tetapi juga berkelanjutan dan sesuai dengan fungsi serta peruntukan ruang yang telah direncanakan.

Pada konteks Perubahan RKPD Kabupaten Kuningan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi serta harus selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Memuat gambaran umum penyusunan dokumen Perubahan RKPD.

1.1. Latar Belakang

Memuat pengertian ringkas tentang Perubahan RKPD, proses penyusunan, kedudukan, tahapan, prinsip, pendekatan penyusunan Perubahan RKPD, keterkaitan antara dokumen Perubahan RKPD dengan dokumen RPD, Renstra Perangkat Daerah, RENJA Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Maksud dan Tujuan Perubahan RKPD

Memuat tentang maksud dan tujuan dari disusunnya Perubahan RKPD

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

Memuat uraian ringkas tentang dasar hukum yang terkait langsung dengan penyusunan Perubahan RKPD.

1.4. Hubungan Antar Dokumen

Memuat hubungan Perubahan RKPD dengan dokumen lain yang relevan.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Memuat pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

Bab II Evaluasi Hasil RKPD Triwulan I Tahun 2025

- 2.1. Capaian Indikator Makro sampai dengan Tahun 2024
- 2.2. Evaluasi RKPD Tahun 2024 terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
- 2.3 Capaian Program dan Kegiatan Pada Triwulan I Tahun 2025
- 2.4 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- 2.5 Inovasi Daerah

Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran berdasarkan dokumen RPJPD, selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan.

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2025

Mengemukakan tentang prioritas pembangunan untuk tahun rencana, isu strategis, serta prioritas program pembangunan daerah berdasarkan isu strategis.

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Menjelaskan rincian program dan kegiatan RKPD Perubahan Tahun 2025, instansi pelaksana/PD, indikator capaian masing-masing program dan kegiatan serta pagu indikatifnya.

Bab VI Penutup

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RJPDP, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD perubahan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

2.1. Capaian Indikator Makro sampai dengan Tahun 2024

Hingga Triwulan I Tahun 2025, BPS Kuningan belum merilis data terbaru untuk pencapaian indikator makro di Kabupaten Kuningan. Sehingga evaluasi indikator makro masih menggunakan capaian indikator tahun 2024, sebagaimana yang tergambar pada table berikut:

Tabel 2. 1 Capaian Indikator Makro Kabupaten Kuningan Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Persen	5,25	5,61	5,18-5,71
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Persen	9,49	7,78	7,70-8,80
3	Persentase Penduduk Miskin (%)	Persen	12,12	11,88	10,42-11,5
4	Ketimpangan Gini Ratio	Poin	0,351	0,372	0,34-0,347
5	PDRB per-Kapita ADHB (juta rupiah/Kapita)	Juta Rupiah	27,08	29,27	29,09-29,45
6	Indeks Pembangunan Manusia	Point	70,99	71,56	71,65

Sumber: Bappeda dan BPS Kab. Kuningan, 2025

Perkembangan indikator makro pembangunan selama periode 2023 hingga 2024 menunjukkan tren yang umumnya positif sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.1, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu menjadi perhatian ke depan. Laju pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dari 5,25 persen pada tahun 2023 menjadi 5,61persen pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan kondisi ekonomi yang semakin membaik dan pemulihan pasca pandemi yang mulai menunjukkan dampak positif. Target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 sebesar 5,18–5,71persen dinilai realistis dan berada dalam kisaran capaian aktual tahun 2024, sehingga mempertahankan

momentum pertumbuhan menjadi faktor kunci untuk keberhasilan pembangunan tahun mendatang.

Indikator ketenagakerjaan juga menunjukkan semakin adanya perbaikan, ditandai dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 9,49 persen pada tahun 2023 menjadi 7,78 persen pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan terciptanya lebih banyak lapangan kerja dan membaiknya iklim usaha. Target tahun 2025 yang berada pada kisaran 7,70–8,80 persen mencerminkan pendekatan yang cukup konservatif, mengingat capaian tahun 2024 sudah berada di bawah batas atas target tersebut. Namun demikian, perlu terus didorong penciptaan lapangan kerja yang lebih berkualitas dan inklusif agar penurunan pengangguran dapat berlanjut secara berkelanjutan.

Sementara itu, penurunan persentase penduduk miskin dari 12,12 persen menjadi 11,88persen pada periode yang sama berlangsung relatif lambat. Meskipun arah perubahannya positif, capaian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif atau belum menjangkau kelompok masyarakat paling rentan. Target penurunan kemiskinan menjadi 10,42–11,5 persen pada tahun 2025 akan membutuhkan kebijakan yang lebih terarah dan terpadu dalam penanggulangan kemiskinan, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Di sisi lain, terdapat catatan penting terkait meningkatnya ketimpangan yang diukur melalui Gini Ratio. Indeks ini meningkat dari 0,351 pada tahun 2023 menjadi 0,372 pada tahun 2024, yang menunjukkan bahwa distribusi pendapatan semakin tidak merata. Target Gini Ratio pada 2025 yang ditetapkan sebesar 0,34–0,347 menuntut adanya intervensi kebijakan yang kuat dalam hal pemerataan akses terhadap ekonomi, layanan publik, serta penguatan perlindungan sosial.

Dari sisi kesejahteraan, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp27,08 juta menjadi Rp29,27 juta per tahun. Peningkatan ini mengindikasikan pertumbuhan pendapatan nominal masyarakat, namun tetap perlu dianalisis lebih lanjut terkait kontribusi inflasi. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menunjukkan kemajuan, dari 70,99 menjadi 71,56 poin. Dengan target tahun 2025 sebesar 71,65, tren ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia berada di jalur yang tepat, meskipun peningkatannya cenderung moderat. Upaya peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup tetap menjadi prioritas utama dalam mendorong IPM secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, capaian indikator menunjukkan bahwa arah pembangunan telah berada di jalur yang positif. Namun, tantangan utama masih terletak pada upaya mempercepat penurunan kemiskinan dan mengendalikan ketimpangan. Oleh karena itu, integrasi kebijakan ekonomi makro dengan program-program sosial yang pro-rakyat menjadi strategi penting dalam mencapai target pembangunan tahun 2025 secara lebih inklusif dan berkeadilan.

2.2. Evaluasi RKPD Tahun 2025 Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2025 terbagi ke dalam 5 (lima) Prioritas Pembangunan dan 12 (dua belas) sasaran pembangunan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

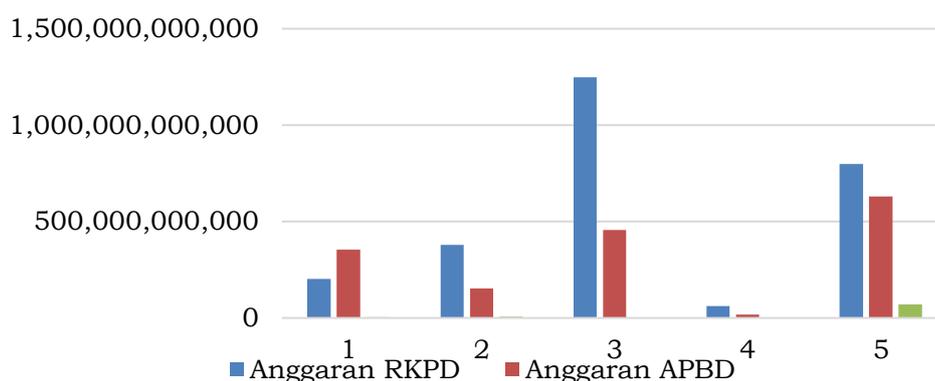
Tabel 2. 2 Prioritas Pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	
PPD1: Peningkatan Pemerataan Pembangunan Daerah	1	Menurunnya Tingkat kemiskinan
	2	Terlaksananya Pembangunan secara Berkeadilan dan Memberikan Kesempatan Berkembang berbasis desa dan kawasan perdesaan
PPD2: Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul	1	Meningkatnya investasi daerah
	2	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	
	3	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup, dan Ketahanan Bencana
PPD3: Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif	1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
	2	Meningkatnya kualitas dan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan dan olahraga
	3	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG)
	4	Terkendalinya pertumbuhan penduduk
PPD4: Peningkatan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif	1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah berbasis Agribisnis, Industri, Industri Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Sektor Lainnya
PPD5: Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	1	Meningkatnya Integritas, Kapasitas, Profesionalisme, dan Akuntabilitas SDM birokrasi serta Kualitas Pelayanan Publik
	2	Terwujudnya penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum dan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat berbasis kearifan lokal dan budaya daerah

Sumber: RPD Kabupaten Kuningan 2024-2026

Setiap sasaran pembangunan didukung oleh program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan dan target kinerja yang telah ditetapkan. Secara grafis, gambaran masing-masing prioritas diperbandingkan dengan dukungan pendanaannya adalah sebagaimana grafik berikut:

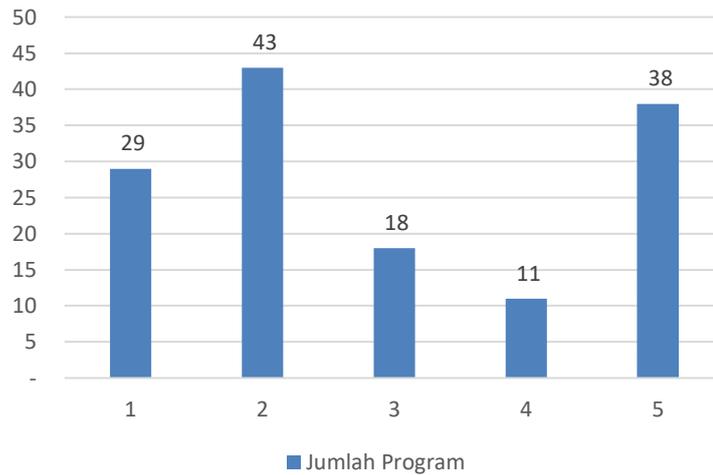


Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2025

Gambar 2. 1 Jumlah Anggaran RKPD dan APBD per Prioritas Pembangunan Tahun 2025

Sebagaimana ditunjukkan grafik di atas, meskipun beberapa prioritas diharapkan memperoleh anggaran cukup besar dalam

dokumen perencanaan (RKPD), hanya sebagian kecil yang terakomodasi dalam APBD, dan lebih sedikit lagi yang terealisasi. Hal ini disebabkan kondisi keuangan daerah yang terbatas. Sedangkan secara grafis, dukungan masing-masing program terhadap prioritas pembangunan tahun 2025 adalah sebagaimana grafik berikut:



Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2025

Gambar 2. 2 Jumlah Program Pembangunan per Prioritas Tahun 2025

Jumlah program yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah (30 PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk mendukung 5 prioritas pembangunan adalah sejumlah 139 Program.

2.3. Capaian Program dan Kegiatan Pada Triwulan I Tahun 2025

Tabel 2. 3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil RKPD Triwulan I Kabupaten Kuningan Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran RKPD	Pagu APBD	Realisasi Anggaran Tw I Th 2025	Persentase Realisasi dengan APBD	Persentase Realisasi dengan RKPD	Jumlah Kegiatan	Perangkat Daerah/ Stakeholder
PPD 1: Peningkatan Pemerataan Pembangunan Daerah	1 Menurunnya Tingkat kemiskinan	1 Program perlindungan dan jaminan sosial	300.000.000	2.492.572.500	10.800.000	0,43%	3,60%	2	DINSOS
		2 Program rehabilitasi sosial	3.808.000.000	186.895.000	28.190.000	15,08%	0,74%	2	DINSOS
		3 Program pemberdayaan sosial	1.250.000.000	300.000.000	50.000.000	16,67%	4,00%	2	DINSOS
		4 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	17.759.347.200	199.539.105.335	5.131.673	0,00%	0,03%	4	DINKES
		5 Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	3.350.000.000	1.014.420.000	195.100.000	19,23%	5,82%	1	DISKOPDAGPERIN
		6 Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	1.000.000.000	199.950.000	100.000.000	50,01%	10,00%	1	DISKOPDAGPERIN
		7 Program penanganan kerawanan pangan	3.850.000.000	1.808.721.000	0	0,00%	0,00%	1	DISKATAN
		8 Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan Masyarakat	6.682.500.000	4.027.195.448	378.690.075	9,40%	5,67%	3	DISKATAN

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran RKPD	Pagu APBD	Realisasi Anggaran Tw I Th 2025	Persentase Realisasi dengan APBD	Persentase Realisasi dengan RKPD	Jumlah Kegiatan	Perangkat Daerah/ Stakeholder	
		9	Program pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	3.850.000.000	0	0	-	0	DISKATAN	
		10	Program pengawasan keamanan pangan	770.000.000	60.250.000	0	0,00%	0,00%	1	DISKATAN
		11	Program penyuluhan pertanian	12.360.000.000	4.740.008.000	25.000.000	0,53%	0,20%	1	DISKATAN
		12	Program Kawasan Permukiman	9.258.480.000	920.750.350	0	0,00%	0,00%	1	DISPERKIMTAN
		13	Program penempatan tenaga kerja	1.000.000.000	300.000.000	33.850.000	11,28%	3,39%	1	DISNAKERTRANS
		14	Program Pengelolaan Pendidikan	18.494.000.000	101.684.242.746	1.013.634.853	1,00%	5,48%	4	DISDIKBUD
2	Terlaksananya Pembangunan secara Berkeadilan dan Memberikan Kesempatan Berkembang berbasis desa dan kawasan perdesaan	1	Program penataan desa	6.200.000.000	2.618.294.217	0	0,00%	0,00%	0	DPMD
		2	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum adat	10.750.000.000	11.626.309.369	25.986.250	0,22%	0,24%	1	DPMD
		3	Program peningkatan kerjasama desa	1.200.000.000	0	0	-	-	0	DPMD
		4	Program administrasi pemerintahan desa	16.200.000.000	6.298.942.000	1.596.965.684	25,35%	9,86%	1	DPMD
		5	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	4.253.500.000	582.057.600	131.070.500	22,52%	3,08%	3	BAPPEDA

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran RKPD	Pagu APBD	Realisasi Anggaran Tw I Th 2025	Persentase Realisasi dengan APBD	Persentase Realisasi dengan RKPD	Jumlah Kegiatan	Perangkat Daerah/ Stakeholder		
		6	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	10.358.812.134	3.000.000.000	0	0,00%	0,00%	0	KECAMATAN	
		7	Program pengembangan ekspor	800.000.000	575.000.000	75.000.000	13,04%	9,38%	1	DISKOPDAGPERIN	
		8	Program pelayanan izin usaha simpan pinjam	175.000.000	0	0	-	-	0	DISKOPDAGPERIN	
		9	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	250.000.000	0	0	-	-	0	DISKOPDAGPERIN	
		10	Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	200.000.000	0	0	-	-	0	DISKOPDAGPERIN	
		11	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	250.000.000	0	0	-	-	0	DISKOPDAGPERIN	
		12	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	500.000.000	0	0	-	-	0	DISKOPDAGPERIN	
		13	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	67.820.000.000	11.112.552.932	200.000.000	1,80%	0,29%	1	DISKOPDAGPERIN	
		14	Program standarisasi dan perlindungan konsumen	275.000.000	175.000.000	50.000.000	28,57%	18,18%	1	DISKOPDAGPERIN	
		15	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	450.000.000	0	0	-	-	0	DISKOPDAGPERIN	
PPD 2: Pengembangan dan Percepatan	1	Meningkatnya investasi daerah	1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	2.850.000.000	150.000.000	0	0,00%	0,00%	0	DPMPSTP

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran RKPD	Pagu APBD	Realisasi Anggaran Tw I Th 2025	Persentase Realisasi dengan APBD	Persentase Realisasi dengan RKPD	Jumlah Kegiatan	Perangkat Daerah/ Stake- holder	
Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul		2	Program Promosi Penanaman Modal	500.000.000	25.000.000	0	0,00%	0,00%	0	DPMPTSP
		3	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.400.000.000	135.000.000	0	0,00%	0,00%	0	DPMPTSP
		4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	975.000.000	596.521.000	0	0,00%	0,00%	0	DPMPTSP
		5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	500.000.000	50.000.000	5.000.000	10,00%	1,00%	1	DPMPTSP
2	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja	1	Program perencanaan dan pembangunan industry	750.000.000	500.090.000	0	0,00%	0,00%	1	DISKOPDAGPERIN
		2	Program pengendalian izin usaha industry	100.000.000	0	0	-	-	0	DISKOPDAGPERIN
		3	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	150.000.000	0	0	-	-	0	DISKOPDAGPERIN
		4	Program penempatan tenaga kerja	1.550.000.000	300.000.000	33.850.000	11,28%	2,18%	3	DISNAKERTRANS
		5	Program perencanaan tenaga kerja	125.000.000	0	0	-	-	0	DISNAKERTRANS
		6	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	12.984.000.000	2.725.773.700	114.477.400	4,20%	0,88%	2	DISNAKERTRANS
		7	Program hubungan industrial	725.000.000	0	0	-	-	0	DISKOPDAGPERIN
3	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, Penataan	1	Program pengelolaan sumberdaya air (SDA)	3.881.125.500	20.711.450.350	112.000.000	0,54%	2,89%	2	DPUTR

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran RKPD	Pagu APBD	Realisasi Anggaran Tw I Th 2025	Persentase Realisasi dengan APBD	Persentase Realisasi dengan RKPD	Jumlah Kegiatan	Perangkat Daerah/ Stakeholder	
	Ruang, Lingkungan Hidup, dan Ketahanan Bencana	2	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	62.957.664.000	2.376.678.425	0	0,00%	0,00%	1	DPUTR
		3	Program pengelolaan dan Pengembangan sistem air limbah	75.919.536.000	1.680.000.000	0	0,00%	0,00%	1	DPUTR
		4	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	6.000.000.000	66.264.200	0	0,00%	0,00%	1	DPUTR
		5	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	6.755.000.000	109.757.450	0	0,00%	0,00%	1	DPUTR
		6	Program penataan bangunan gedung	5.800.000.000	65.000.000	0	0,00%	0,00%	1	DPUTR
		7	Program penataan bangunan dan lingkungannya	10.250.000.000	23.762.800.325	0	0,00%	0,00%	1	DPUTR
		8	Program penyelenggaraan jalan	80.038.237.261	14.841.576.573	865.000.000	5,83%	1,08%	1	DPUTR
		9	Program pengembangan jasa konstruksi	950.000.000	37.002.000	0	0,00%	0,00%	2	DPUTR
		10	Program penyelenggaraan penataan ruang	3.100.000.000	255.868.500	13.620.000	5,32%	0,44%	2	DPUTR
		11	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	9.180.900.000	19.981.548.526	5.156.122.876	25,80%	56,16%	7	DISHUB
		12	Program pengembangan perumahan	6.400.000.000	4.678.664.602	0	0,00%	0,00%	2	DISPERKIMTAN

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran RKPD	Pagu APBD	Realisasi Anggaran Tw I Th 2025	Persentase Realisasi dengan APBD	Persentase Realisasi dengan RKPD	Jumlah Kegiatan	Perangkat Daerah/ Stakeholder
		13 Program kawasan permukiman	5.500.000.000	920.750.350	0	0,00%	0,00%	2	DISPERKIMTAN
		14 Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	5.000.000.000	950.000.000	6.110.000	0,64%	0,12%	1	DISPERKIMTAN
		15 Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	11.658.000.000	56.307.482.950	66.385.000	0,12%	0,57%	1	DISPERKIMTAN
		16 Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	15.000.000.000	50.000.000	0	0,00%	0,00%	1	DISPERKIMTAN
		17 Program pengelolaan tanah kosong	250.000.000	0	0	-	-	0	DISPERKIMTAN
		18 Program penatagunaan tanah	300.000.000	0	0	-	-	0	DISPERKIMTAN
		19 Program survei pengukuran dan pemetaan	1.000.000.000	0	0	-	-	0	DISPERKIMTAN
		20 Program pengelolaan sampah	21.900.000.000	898.783.650	0	0,00%	0,00%	1	DLH
		21 Program perencanaan lingkungan hidup	650.000.000	0	0	-	-	0	DLH
		22 Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	2.100.000.000	44.844.000	0	0,00%	0,00%	1	DLH
		23 Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	4.900.000.000	78.750.000	0	0,00%	0,00%	1	DLH

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran RKPD	Pagu APBD	Realisasi Anggaran Tw I Th 2025	Persentase Realisasi dengan APBD	Persentase Realisasi dengan RKPD	Jumlah Kegiatan	Perangkat Daerah/ Stakeholder	
		24	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	350.000.000	0	0	-	-	0	DLH
		25	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	425.000.000	400.000.000	0	0,00%	0,00%	1	DLH
		26	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	400.000.000	0	0	-	-	0	DLH
		27	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	300.000.000	0	0	-	-	0	DLH
		28	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	275.000.000	0	0	-	-	0	DLH
		29	Program penanggulangan bencana	7.460.000.000	1.149.731.000	27.650.000	2,40%	0,37%	4	BPBD
		30	Program Penanganan Bencana	7.000.000.000	75.000.000	37.460.000	49,95%	0,54%	1	BPBD

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran RKPD	Pagu APBD	Realisasi Anggaran Tw I Th 2025	Persentase Realisasi dengan APBD	Persentase Realisasi dengan RKPD	Jumlah Kegiatan	Perangkat Daerah/ Stakeholder
		31 Program pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	496.125.000	310.000.000	25.200.000	8,13%	5,08%	1	BPBD
PPD 3: Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif	1 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1 Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	1.738.374.855	429.632.690	0	0,00%	0,00%	3	DINKES
		2 Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	13.132.890.000	150.768.135.175	5.131.673	0,00%	0,04%	4	DINKES
		3 Program peningkatan kapasitas sumberdaya manusia kesehatan	2.314.864.600	2.646.272.400	0	0,00%	0,00%	2	DINKES
		4 Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	200.000.000	682.070.000	0	0,00%	0,00%	2	DINKES
	2 Meningkatkan kualitas dan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan dan olahraga	1 Program pengelolaan pendidikan	1.199.755.858.640	281.545.209.746	1.013.634.853	0,36%	0,08%	4	DISDIKBUD
		2 Program pembinaan perpustakaan	1.303.880.000	1.750.000.000	0	0,00%	0,00%	2	DISARPUS
		3 Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	1.300.000.000	680.975.000	0	0,00%	0,00%	2	DISPORAPAR
		4 Program pengembangan kapasitas kepramukaan	800.000.000	741.020.000	250.000.000	33,74%	31,25%	1	DISPORAPAR
		5 Program pengembangan	18.275.000.000	16.266.625.871	500.000.000	3,07%	2,74%	4	DISPORAPAR

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran RKPD	Pagu APBD	Realisasi Anggaran Tw I Th 2025	Persentase Realisasi dengan APBD	Persentase Realisasi dengan RKPD	Jumlah Kegiatan	Perangkat Daerah/ Stakeholder	
			daya saing keolahragaan							
3	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG)	1	Program pengelolaan sistem data gender dan anak	150.000.000	0	0	0,00%	0	DPPKBP3A	
		2	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	900.000.000	316.800.000	66.800.000	21,09%	7,42%	2	DPPKBP3A
		3	Program perlindungan perempuan	450.000.000	131.705.000	0	0,00%	0,00%	2	DPPKBP3A
		4	Program peningkatan kualitas keluarga	250.000.000	52.500.000	0	0,00%	0,00%	1	DPPKBP3A
		5	Program pemenuhan hak anak (PHA)	350.000.000	0	0	-	-	0	DPPKBP3A
		6	Program perlindungan khusus anak	600.000.000	368.955.000	0	0,00%	0,00%	3	DPPKBP3A
4	Terkendalinya pertumbuhan penduduk	1	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	1.610.800.000	0	0	-	-	0	DINSOS
		2	Program pembinaan keluarga berencana (KB)	2.902.500.000	0	214.760.000	-	7,40%	4	DPPKBP3A
		3	Program pengendalian penduduk	1.550.000.000	554.951.000	46.750.000	8,42%	3,02%	1	DPPKBP3A

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran RKPD	Pagu APBD	Realisasi Anggaran Tw I Th 2025	Persentase Realisasi dengan APBD	Persentase Realisasi dengan RKPD	Jumlah Kegiatan	Perangkat Daerah/ Stake- holder		
PPD 4: Peningkatan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif	1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah berbasis Agribisnis, Industri, Industri Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Sektor Lainnya	1	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	21.150.000.000	4.223.868.500	497.069.150	11,77%	2,35%	1	DISKATAN
			2	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	1.550.000.000	1.188.400.000	-	0,00%	0,00%	1	DISKANAK
			3	Program pengelolaan perikanan budidaya	4.250.000.000	2.738.166.850	291.514.500	10,65%	6,86%	2	DISKANAK
			4	Program pengelolaan perikanan tangkap	2.750.000.000	-	-	0,00%	0,00%	0	DISKANAK
			5	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	2.150.000.000	187.900.000	-	0,00%	0,00%	1	DISKANAK
			6	Program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	1.150.000.000	-	-	0,00%	0,00%	0	DISKANAK
			7	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	11.337.000.000	5.367.495.850	-	0,00%	0,00%	1	DISKATAN
			8	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	9.000.000.000	3.020.227.243	149.000.000	4,93%	1,66%	2	DISPORAPAR
			9	Program pemasaran pariwisata	5.750.000.000	635.130.100	-	0,00%	0,00%	1	DISPORAPAR

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran RKPD	Pagu APBD	Realisasi Anggaran Tw I Th 2025	Persentase Realisasi dengan APBD	Persentase Realisasi dengan RKPD	Jumlah Kegiatan	Perangkat Daerah/ Stake- holder		
		10	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	900.000.000	-	-	0,00%	0,00%	0	DISPORAPAR	
		11	Program pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif	2.175.000.000	252.111.000	50.000.000	19,83%	2,30%	1	DISPORAPAR	
PPD 5: Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	1	Meningkatnya Integritas, Kapasitas, Profesionalisme, dan Akuntabilitas SDM birokrasi serta Kualitas Pelayanan Publik	1	Program pengembangan sumberdaya manusia	60.405.000.000	1.018.190.000	46.885.000	4,60%	0,08%	2	BKPSDM
			2	Program kepegawaian daerah	8.700.000.000	2.029.861.600	567.039.500	27,93%	6,52%	4	BKPSDM
			3	Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	4.095.750.000	898.779.600	122.925.000	13,68%	3,00%	3	BAPPEDA
			4	Program penelitian dan pengembangan daerah	1.985.000.000	83.000.000	-	0,00%	0,00%	1	BAPPEDA
			5	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1.691.333.980	-	-	-	-	0	KECAMATAN
			6	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	5.750.000.000	1.021.132.800	213.095.500	20,87%	3,71%	1	DISKOMINFO
			7	Program pengelolaan aplikasi informatika	16.150.000.000	8.777.552.000	210.041.600	2%	1,30%	2	DISKOMINFO

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran RKPD	Pagu APBD	Realisasi Anggaran Tw I Th 2025	Persentase Realisasi dengan APBD	Persentase Realisasi dengan RKPD	Jumlah Kegiatan	Perangkat Daerah/ Stakeholder	
		8	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	925.000.000	120.775.000	107.889.000	89%	11,66%	1	DISKOMINFO
		9	Program penyelenggaraan statistik sektoral	600.000.000	175.000.000	171.017.000	98%	28,50%	1	DISKOMINFO
		10	Program pengelolaan taman makam pahlawan	85.000.000	25.000.000	14.200.000	57%	16,71%	1	DINSOS
		11	Program pengelolaan arsip;	915.840.000	-	-	-	-	0	DISARPUS
		12	Program perlindungan dan penyelamatan arsip	112.320.000	-	-	-	-	0	DISARPUS
		13	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	25.058.285.000	13.490.085.000	3.473.705.000	26%	13,86%	6	SEKRETARIAT DPRD
		14	Program pendaftaran penduduk	2.150.000.000	3.428.767.000	27.690.000	1%	1,29%	3	DISDUKCAPIL
		15	Program pencatatan sipil	650.000.000	-	-	0%	0,00%	0	DISDUKCAPIL
		16	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	850.000.000	1.750.000.000	19.500.000	1%	2,29%	1	DISDUKCAPIL
		17	Program pengelolaan profil kependudukan	300.000.000	-	-	0%	0,00%	0	DISDUKCAPIL
		18	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1.565.574.880	-	-	0%	0,00%	0	KECAMATAN
		19	Program pemerintahan dan	34.440.950.000	17.812.700.500	1.649.174.892	9%	4,79%	4	SETDA (TAPEM)

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran RKPD	Pagu APBD	Realisasi Anggaran Tw I Th 2025	Persentase Realisasi dengan APBD	Persentase Realisasi dengan RKPD	Jumlah Kegiatan	Perangkat Daerah/ Stakeholder	
		20	kesejahteraan rakyat							
		20	Program perekonomian dan pembangunan	4.600.000.000	2.516.133.750	259.875.000	10%	5,65%	4	SETDA (BARJAS)
		21	Program pengelolaan perbatasan	200.000.000	-	-	-	-	0	SETDA (TAPEM)
		22	Program pengelolaan keuangan daerah	488.851.000.000	507.523.357.100	47.642.346.021	9%	9,75%	4	BPKAD
		23	Program pengelolaan barang milik daerah	3.758.000.000	2.016.709.700	211.650.000	10%	5,63%	1	BPKAD
		24	Program pengelolaan pendapatan daerah	25.990.880.000	4.571.409.875	831.739.625	18%	3,20%	1	BAPPENDA
		25	Program penyelenggaraan pengawasan	13.500.000.000	4.963.696.250	313.656.000	6%	2,32%	2	INSPEKTORAT
		26	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	60.285.000.000	45.345.741.252	11.659.293.908	26%	19,34%	6	SETDA (ORGANISASI)
		27	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	3.500.000.000	933.068.750	37.605.000	4%	1,07%	2	INSPEKTORAT
2	Terwujudnya penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum dan kondusivitas	1	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	5.168.975.000	5.800.000.000	1.946.018.000	34%	37,65%	1	BAKESBANGPOL

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran RKPD	Pagu APBD	Realisasi Anggaran Tw I Th 2025	Persentase Realisasi dengan APBD	Persentase Realisasi dengan RKPD	Jumlah Kegiatan	Perangkat Daerah/ Stakeholder	
kehidupan berbangsa dan bermasyarakat berbasis		2	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	961.788.000	-	-	0%	0,00%	0	KECAMATAN
		3	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	3.920.490.000	2.591.740.000	1.876.200.000	72%	72,39%	2	SATPOL PP
		4	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	847.000.000	550.000.000	28.750.000	5%	3,39%	1	BAKESBANGPOL
		5	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	121.000.000	423.998.500	9.765.000	2%	8,07%	1	BAKESBANGPOL
		6	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, Sosial dan budaya	3.612.703.253	102.200.000	19.400.000	19%	0,54%	1	BAKESBANGPOL
		7	Program pengembangan kebudayaan	12.759.500.000	808.250.000	-	0%	0,00%	3	DISDIKBUD
		8	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	700.000.000	476.497.940	-	0%	0,00%	3	DISDIKBUD
		9	Program pengelolaan permuseuman	850.000.000	799.952.950	-	0%	0	1	DISDIKBUD
		10	Program pengembangan kesenian tradisional	1.700.000.000	199.506.000	-	0%	0,00%	1	DISDIKBUD

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran RKPD	Pagu APBD	Realisasi Anggaran Tw I Th 2025	Persentase Realisasi dengan APBD	Persentase Realisasi dengan RKPD	Jumlah Kegiatan	Perangkat Daerah/ Stakeholder
		11 Program pembinaan sejarah	400.000.000	150.000.000	-	0%	0,00%	1	DISDIKBUD
TOTAL			2.690.122.785.303	1.612.447.861.090	84.926.415.533	5,27%	3,16%	188	

Sumber: Data Analisis Bappeda, 2025

Kinerja anggaran diukur dengan menghitung persentase antara target yang ditetapkan dalam APBD dengan realisasi keuangan per triwulan (hingga triwulan I). Rata-rata persentase capaian kinerja program akan dinilai berdasarkan kriteria sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja (Tahunan) (Permendagri 86/2017)	Interval Nilai Realisasi Kinerja (Triwulan I)*	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	22,6% ≤ 25%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	18,76% ≤ 22,5%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	16,26% ≤ 18,75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	12,6% ≤ 16,25%	Rendah
5	≤ 50%	≤ 12,5%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri 86, 2017

*catatan = untuk penilaian triwulan I, perhitungan dibagi 4

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD tahun 2025 Triwulan I secara singkat dapat dilihat pada Tabel 2.3 diatas. Pada tabel tersebut terlihat bahwa jumlah anggaran untuk melaksanakan 5 prioritas pembangunan di Kabupaten Kuningan mencapai 5,27 persen atau realisasi sebesar Rp.84.926.415.533 dari total APBD Rp.1.612.477.861.090.

Ditinjau dari realisasi APBD-nya, ditemukan bahwa secara umum tingkat serapan anggaran masih tergolong **“sangat rendah”** pada sebagian besar perangkat daerah. Beberapa program menunjukkan capaian realisasi yang cukup tinggi, seperti Program Penanganan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan serapan mencapai 49,95 persen dari pagu APBD, serta Program Stabilisasi Harga Barang Pokok di Dinas KUKM, Perdagangan dan Perindustrian dengan realisasi sebesar 50,01 persen. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun. Namun demikian, sejumlah program prioritas menunjukkan tingkat serapan yang sangat rendah, bahkan mendekati nol. Sebagai contoh, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan di Dinas Kesehatan hanya terealisasi sebesar 0,003 persen dari pagu APBD, sementara Program Pengelolaan Pendidikan pada

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan baru mencapai 0,36 persen. Fenomena serupa juga terlihat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, di mana program-program strategis seperti penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, serta pengelolaan sampah regional terealisasi Opersen, atau belum ada penyerapan anggaran sama sekali.

Capaian ini tentunya tidak terlepas dari adanya faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaannya, berikut ini diuraikan beberapa faktor pendorong dan penghambat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan I di Kabupaten Kuningan.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan I di Kabupaten Kuningan antara lain:

- a) Peraturan perundang-undangan tersedia.
- b) Komitmen Pimpinan dan Kerjasama Tim Pelaksana Kegiatan.
- c) Penjadwalan kegiatan dan kegiatan dilaksanakan sesuai rencana.
- d) Personil mencukupi, baik kualitas maupun kuantitas.
- e) Koordinasi dengan pihak terkait bisa optimal dan komitmen dari tim pelaksana.
- f) Sarana dan Prasarana sesuai Standar Pelayanan Minimal.
- g) Tersedianya SOP Pelayanan.
- h) Tersedia media komunikasi dan informasi.

Sedangkan untuk faktor penghambat pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan I yaitu:

- a) Penerimaan pendapatan daerah yang tidak sesuai dengan perencanaan pendapatan;
- b) Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan, dikarenakan keterbatasan anggaran dan dilaksankannya efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tentang penyesuaian

Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Beberapa potensi pengembangan pariwisata alam, pariwisata budaya
dan pariwisata buatan:

1. Potensi Pariwisata Alam

- a. Taman Wisata Alam (TWA) Linggarjati di Desa Linggarjati Kecamatan Cilimus;
- b. Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC);
- c. Gunung Mayana di Desa Sindangjaya Kecamatan Kadugede;
- d. Bumi Perkemahan Palutungan di Desa Cisantana Kecamatan Cigugur;
- e. Bumi Perkemahan Cibunar di Desa Linggarjati Kecamatan Cilimus;
- f. Bumi Perkemahan Cibeureum di Desa Cibeureum Kecamatan Cilimus;
- g. Bumi Perkemahan Paniis di Desa Paniis Kecamatan Pasawahan;
- h. Bumi Perkemahan Padamatang di Desa Padamatang Kecamatan Pasawahan;
- i. Bumi Perkemahan Buyut Jaksa di Desa Bantarpanjang Kecamatan Cibingbin;
- j. Arung Jeram Cisanggarung di Kecamatan Luragung;
- k. Waduk Darma di Desa Jagara Kecamatan Darma;
- l. Balong Keramat Darmaloka di Desa Darma Kecamatan Darma;
- m. Telaga Remis di Desa Kaduela Kecamatan Pasawahan;
- n. Balong Ikan Cigugur di Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur;
- o. Cibulan di Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana;
- p. Curug Lembah Cilengkrang di Desa Pajambon Kecamatan Kramatmulya;
- q. Curug Landung di Desa Cisantana Kecamatan Cigugur;
- r. Curug Bangkong di Desa Kertawirama Kecamatan Nusaherang;
- s. Curug Ciputri di Desa Cisantana Kecamatan Cigugur;
- t. Curug Sidomba di Desa Peusing Kecamatan Cilimus;

- u. Wisata Pedesaan Sitonjul di Desa Sangkanhurip Kecamatan Cilimus;
 - v. Linggarjati Indah di Desa Linggamekar Kecamatan Cilimus;
 - w. Pemandian Air Panas Sangkanhurip Alami di Desa Sangkanhurip Kecamatan Cilimus;
 - x. KRK di Desa Padabeunghar Kecamatan Pasawahan;
 - y. Balong Dalem di Desa Babakanmulya Kecamatan Jalaksana;
 - z. Balong Kembang di Desa Pasawahan Kecamatan Pasawahan;
 - aa. Situ Cicerem di Desa Kaduela Kecamatan Pasawahan;
 - bb. Air Panas Ciniru di Desa Padamenak Kecamatan Jalaksana;
 - cc. Air Panas Ciangir di Desa Ciangir Kecamatan Cibingbin;
 - dd. Air Panas Subang di Desa Subang Kecamatan Subang; dan
 - ee. Gua Indrakila di Desa Indrahayu Kecamatan Ciwaru.
2. Potensi pariwisata budaya
 - a. Gedung Naskah Perundingan Linggarjati di Desa Linggarjati Kecamatan Cilimus;
 - b. Gedung Syahrir di Desa Bandorasawetan Kecamatan Cilimus;
 - c. Gedung Paseban Tri Panca Tunggal di Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur;
 - d. Taman Purbakala Cipari di Kelurahan Cipari Kecamatan Cigugur.
 3. Potensi pariwisata buatan antara lain Open Space Gallery di Desa Linggasana, Sangkan Resort Aqua Park di Desa Bandorasa Wetan, Kecamatan Cilimus dan sebagainya.
 4. Potensi Pariwisata Religi antara lain Gua Maria di Desa Cisantana Kecamatan Cigugur; Makam Syech Muhibat, Makam Syeh Magelung dan sebagainya.

2.4. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara

minimal. Penerapan SPM dalam pembangunan di Kabupaten Kuningan Tahun 2024 yaitu:

A. Urusan Bidang Pendidikan

Jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan pendidikan meliputi:

- a. Pendidikan dasar
- b. Pendidikan kesetaraan
- c. Pendidikan anak usia dini

Berikut ini merupakan Capaian penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan bidang Pendidikan Tahun 2024:

Tabel 2. 5 Capaian SPM Pendidikan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Total Pencapaian
1.	Pendidikan Dasar Usia Dini	96,07 %
2.	Pendidikan Dasar	97,00 %
3.	Pendidikan Kesetaraan	95,46 %
Kategori Indeks Pencapaian SPM		96,07 % (Tuntas Utama)

Sumber: Laporan SPM Kabupaten Kuningan Tahun 2024

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan Tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan rata-rata indeks pencapaian sebesar 96,07 persen (kategori Tuntas Utama). Indikator Pendidikan Dasar Usia Dini mencapai 96,07 persen, Pendidikan Dasar 97,00 persen, dan Pendidikan Kesetaraan 95,46persen, yang mencerminkan tingginya akses dan pemerataan layanan pendidikan dasar di daerah.

B. Bidang Urusan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59

Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
- d. Pelayanan Kesehatan Balita;
- e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
- f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
- g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
- h. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi;
- i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
- j. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat;
- k. Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis;
- l. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus/HIV*).

Berikut ini merupakan Capaian penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan bidang Kesehatan di Kabupaten Kuningan pada Tahun 2024:

Tabel 2. 6 Capaian SPM Kesehatan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Total Pencapaian (%)
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	69,15
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	74,39
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	97,97
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	83,16
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	96,39
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	64,23
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	92,44
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	87,51
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	84,23
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	97,29
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	86,64

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Total Pencapaian (%)
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	80,55
Kategori Indeks Pencapaian SPM		82,83 (Tuntas Madya)

Sumber: Laporan SPM Kabupaten Kuningan Tahun 2024

Indeks pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sektor kesehatan triwulan I tahun 2025 menunjukkan hasil yang bervariasi dengan rata-rata mencapai 82,83 persen, tergolong dalam kategori Tuntas Madya. Pelayanan kesehatan untuk bayi baru lahir (97,97 persen) dan orang dengan gangguan jiwa berat (97,29 persen) menunjukkan tingkat pencapaian tertinggi, diikuti oleh pelayanan pada usia pendidikan dasar (96,39 persen) dan usia lanjut (92,44 persen). Sementara itu, pelayanan kesehatan pada ibu hamil (69,15 persen) dan usia produktif (64,23 persen) masih menunjukkan pencapaian yang relatif rendah dibandingkan indikator lainnya. Secara keseluruhan, hasil ini mencerminkan kemajuan dalam penyediaan layanan kesehatan dasar, namun perlu adanya peningkatan fokus pada kelompok ibu hamil dan usia produktif untuk mencapai target pelayanan yang lebih optimal.

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 20 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah:

- a. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah.

Berikut ini merupakan capaian penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan bidang pekerjaan umum Kabupaten Kuningan Tahun 2024.

Tabel 2. 7 Capaian SPM Pekerjaan Umum Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Total Pencapaian 2024 (%)
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	100,00
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	90,49
	Kategori Indeks Pencapaian SPM	95,24 (Tuntas Utama)

Sumber: Laporan SPM Kabupaten Kuningan Tahun 2024

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor Pekerjaan Umum tahun 2024 menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan indeks pencapaian keseluruhan sebesar 95,24 persen, yang masuk dalam kategori Tuntas Utama. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berhasil mencapai 100 persen, menandakan pemenuhan layanan air bersih yang optimal bagi masyarakat. Sementara itu, pelayanan pengolahan air limbah domestik juga menunjukkan pencapaian tinggi sebesar 90,49 persen, yang mencerminkan kemajuan dalam pengelolaan lingkungan dan sanitasi.

D. Bidang Urusan Perumahan dan Pemukiman

Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota. Berikut ini merupakan Capaian penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan bidang perumahan dan permukiman di Kabupaten Kuningan Tahun 2024.

Tabel 2. 8 Capaian SPM Perumahan dan Permukiman Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Total Pencapaian 2024 (%)
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 -
	Kategori Indeks Pencapaian SPM	100 (Tuntas Paripurna)

Sumber: Laporan SPM Kabupaten Kuningan Tahun 2024

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa capaian SPM Perumahan dan Permukiman Kabupaten Kuningan pada tahun 2024 berada pada kategori “Tuntas Paripurna” atau sebesar 100 persen

E. Bidang Urusan Trantribum

Cakupan pelayanan dasar yang menjadi indikator SPM Satpol PP Kabupaten Kuningan berdasarkan amanat Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal, maka seiring dengan terbitnya produk legislasi nasional seperti Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Perangkat Daerah, dilanjutkan dengan turunannya dalam produk legislasi daerah Kabupaten Kuningan yang mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas serta tata kerjanya, telah menyebabkan perubahan cakupan indikator SPM Satpol PP menjadi:

- a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum terhadap jumlah penegakan Perda sesuai mutu;
- b. Pelayanan informasi rawan bencana;
- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. Pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana; dan
- e. Pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban kebakaran.

Untuk Capaian penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Satpol PP dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. 9 Capaian SPM Ketentraman dan Ketertiban Tahun 2024

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM		
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Total Pencapaian 2024 (%)
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	100
	Kategori Indeks Pencapaian SPM TRANTIBUM	100 (Tuntas Paripurna)
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	100
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	100
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	100
	Kategori Indeks Pencapaian SPM KEBENCANAAN	100 (Tuntas Paripurna)
1.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	100
	Kategori Indeks Pencapaian SPM DAMKAR	100 (Tuntas Paripurna)

Sumber: Laporan SPM Kabupaten Kuningan Tahun 2024

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa capaian SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Kuningan pada tahun 2024 sudah sangat baik, dengan mencapai kategori “Tuntas Paripurna”.

E. Bidang Urusan Sosial

Jenis pelayanan dasar bidang sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kuningan Tahun 2022 meliputi 5 (Lima) jenis pelayanan dasar yaitu:

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten.

Berikut ini merupakan Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan bidang sosia Kabupaten Kuningan Tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. 10 Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Total Pencapaian 2024 (%)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	100.00
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	100.00
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	100.00
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana	100.00
5	Kabupaten/Kota	100.00
	Kategori Indeks Pencapaian SPM	100.00 (Tuntas Paripurna)

Sumber: Laporan SPM Kabupaten Kuningan Tahun 2024

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa capaian SPM Sosial Kabupaten Kuningan pada tahun 2024 mencapai kategori “Tuntas Paripurna” atau sebesar 100 persen.

Tabel 2. 11 Indikator Kinerja Daerah Pada Kondisi Awal Tahun 2025

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021	Target	Capaian	Target	Target	2026	
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Pertumbuhan PDRB	Persen	5,53	-1,11 – 6,04	5,61	-1,50 – 5,66	-1,88 – 5,27	-1,88 – 5,27	BPS
2	PDRB Perkapita (ADHK)	Rp. (juta)	18.450.340	18,615,813 – 20.580.520	16,89	19.115.365 - 21490552	19.619.790 – 22.395.712	19.619.790 – 22.395.712	BPS
3	Indeks Gini	Poin	0,345	0,336	0,372	0,332	0,328	0,328	BPS
4	Persentase Penduduk Miskin	Persen	12,76	11,12-12,72	11,88	10,82-12,86	10,68-12,98	10,68-12,98	BPS
6	Garis Kemiskinan	Rp	371.665	374.473 – 414.273	420.867	382.600 – 429.041	391.138 – 443.398	391.138 – 443.398	BPS
8	Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan internasional (PPMI)/Miskin Ekstrim	persen	10,83	9,02	8,80	8,92	8,12	8,12	Dinsos
9	Indeks Kedalaman Kemiskinan	persen	2,14	1,09 – 2,52	2,02	1,06 – 2,51	1,04 – 2,49	1,04 – 2,49	BPS
10	IPM:	Poin	70,16	70,86-71,40	71,56	71,31-71,85	71,76-72,52	70,86-71,40	BPS
	- Indeks Pendidikan	Poin	60,27	61,68-61,96	61,89	61,89-62,66	62,64-63,28	62,64-63,28	BPS
	- Indeks Kesehatan	Persen	83,12	83,78-84,24		84,14-84,70	84,62-84,83	84,62-84,83	BPS
	- Indeks Pengeluaran	Poin	68,95	69,72-70,24	71,39	70,18-70,68	70,62-70,98	70,62-70,98	BPS
11	Angka Harapan Lama sekolah / EYS	Tahun	12,24	12,68	12,27	12,79	12,89	12,89	Disdikbud
12	Indeks Harapan Lama sekolah	Poin	68	70,47	70,47	71,05	71,64	71,64	Disdikbud
13	Angka Rata-rata Lama Sekolah / MYS	Tahun	7,88	8	7,9	8,09	8,18	8,18	Disdikbud
14	Indeks Rata-rata Lama Sekolah	Poin	52,53	53,32	53,32	53,94	54,57	54,57	Disdikbud
15	Umur harapan hidup (UHH)	Tahun	74,03	74,6	75,22	74,84	75,08	75,08	BPS
16	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	55	65	79,83	70	75	75	Dinkes
17	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	61,8	62,57-65,03	65,84	63,54-66,02	64,51-67,01	64,51-67,01	BPS / Bappeda
18	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	9,81	9,04-11,21	7,78	9,26-11,49	9,47-11,77	9,47-11,77	BPS / Bappeda
19	Persentase PAD terhadap pendapatan	Persen	12,93	15,49	10,91	15,94	16,31	16,31	Bappeda

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021	Target	Capaian	Target	Target	2026	
20	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	1,89	1,75 – 1,92	1,95	1,75 – 1,94	1,75 – 1,96	1,75 – 1,96	BPS/Bappeda
21	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,32**	1,28	1,04	1,26	1,24	1,24	BPS / Bappeda
22	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,53	0,19-7,20	5,61	-7,06	-7,12	-7,12	BPS / Bappeda
23	Pendapatan Perkapita (ADHB)	Juta (Rp)	24,68	25,22		25,76	26,3	26,3	BPS / Bappeda
24	Rata-rata Pengeluaran Perkapita	Ribu (Rp)	9.620	9.933	10.418	10.071	10.210	10.210	BPS / Bappeda
25	Rasio Penduduk yang Bekerja / Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	Persen	86,07	86,5	92,22	86,75	87	87	Disnakertrans
26	Jumlah Angkatan Kerja	Orang	542.782	552.782	618.129	562.782	572.782	572.782	Disnakertrans
27	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah	Ton	6	10	14,97	15	20	20	Diskatan
28	Angka Kematian Bayi (/1000)	Poin/ 1000 Kelahiran	7,1	6,32	8,46	6,31	6,3	6,3	Dinkes
28	Angka Kematian Ibu (/100.000)	Kasus	24	23	13	22	22	22	Dinkes
29	Persentase Stunting pada balita	Persen	19,4	16	7,9	15	14	14	Dinkes
30	Persentase Penduduk yang mempunyai BPJS/ KIS	Persen	93,33	93,5	98,41	94	95	95	Dinkes
31	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	87,17	87,02	88	87,04	87,06	87,06	BPS
32	Persentase desa/kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan/ODF	Persen	66,49	80	100	83	85	85	Dinkes
ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp	1.211.684*	1.195.965-1.580.871		1.260.149-1.655.840	1.324.436-1.730.706	1.324.436-1.730.706	BPS/Bappeda
2	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	104,29	104,91	113,86	105,22	105,52	105,52	DKPP
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (cek data)	Persen	44,79*	28,40-62,57		26,22-64,67	24,25-66,56	24,25-66,56	BPS/Bappeda
8	Indeks Desa Membangun (IDM)	Poin	0,7446	0,764	0,7936	0,783	0,793	0,793	DPMD
9	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Poin	131,13*	130	141,55	129	128	128	BPBD
10	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,68	0,7	0,68	0,71	0,72	0,72	BPBD

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021	Target	Capaian	Target	Target	2026	
11	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	85	85,7	81,727	86,4	87,1	87,1	Bappeda
12	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kabupaten Kuningan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa dalam merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan untuk menggunakan produk usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil Produk Dalam Negeri (PDN).	Persen	40	50		55	60	60	DKUKMPERINDAG
13	Nilai SAKIP	level / skor	B	B	B	B	BB	BB	Bag. Org / Inspektorat
14	Indeks Reformasi Birokrasi	level / skor	CC	CC	BB	CC	B	B	Bag. Org / BKPSDM
15	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	74,75	74	76,5	75	76	76	Satpol PP, BPBD
16	Opini BPK	Kategori / Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD
17	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Skor	3,02	1,30 – 1,44	3,82	1,45 – 1,60	1,61 – 1,95	1,61 – 1,95	Bappeda
	ASPEK PELAYANAN UMUM								
	Layanan Urusan Wajib Dasar								
	PENDIDIKAN:								Disdikbud
1	APK PAUD usia 5-6 tahun	Persen	93,58	93,98	98,05	94,25	94,6	94,6	
2	Jumlah lembaga PAUD	Lembaga	910	920	933	925	930	930	
3	Jumlah PAUD Holistik integratif	Lembaga	100	150	200	200	300	300	
4	APK SD/Paket A	Persen	100,01	100,02	100	100,02	100,03	100,03	
5	APM SD/Paket A	Persen	99,9	99,91	99,91	99,92	99,92	99,92	
6	APK SMP/Paket B	Persen	99,35	99,52	100	99,65	99,8	99,8	
7	APM SMP/Paket B	Persen	93,25	93,65	97,5	93,95	94,05	94,05	
8	Jumlah program kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKNI	Lembaga	50	55	85	57	60	60	
9	Angka Partisipasi usia 7-18 tahun pendidikan kesetaraan	Persen	95,15	95,4	96,1	95,55	95,7	95,7	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021	Target	Capaian	Target	Target	2026	
10	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Persen	1,81	1,9	89,09	1,9	1,9	1,9	
11	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Persen	1,7	1,8	85,31	1,8	1,8	1,8	
12	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Persen	1,84	1,9	79,68	1,9	1,9	1,9	
13	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Persen	1,73	1,8	75,64	1,8	1,8	1,8	
14	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi Minimal B	Persen	36,06	36,7	40,7	37,05	37,65	37,65	
15	Persentase SD berakreditasi minimal B	Persen	97,56	97,6	97,8	97,65	97,98	97,98	
16	Persentase SMP berakreditasi minimal B	Persen	84,82	85,1	92,5	85,55	85,8	85,8	
17	Guru PAUD profesional	Persen	23,37	23,5	67,85	23,87	24,17	24,17	
18	Guru Profesional SD	Persen	59,08	59,3	71,77	59,65	59,9	59,9	
19	Guru Profesional SMP	Persen	58,98	59,25	68,3	59,85	60,05	60,05	
20	Persentase kepala sekolah profesional di SD dan SMP	Persen	100	100	100	100	100	100	
21	Persentase pengawas profesional di SD dan SMP	Persen	100	100	100	100	100	100	
22	Persentase Guru Layak PAUD	Persen	74,08	74,28	76,94	74,75	74,94	74,94	
23	Persentase Guru Layak SD	Persen	95,56	95,76	97,74	95,9	96,1	96,1	
24	Persentase Guru Layak SMP	Persen	98,92	98,96	98,98	98,98	98,99	98,99	
25	Rasio Kelas Layak PAUD	Persen	73,69	73,94	87,08	74,19	74,5	74,5	
26	Rasio Kelas Layak SD	Persen	85,66	86,26	90,27	86,86	87,3	87,3	
27	Rasio Kelas Layak SMP	Persen	97,95	97,99	98,08	98,08	98,2	98,2	
	KESEHATAN:								Dinkes
1	Prevalensi Wasting pada Balita	Persen	6,5	6	4,54	5,5	4	4	
2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Poin/ 1000 Kelahiran	7,1	6,32	8,46	6,31	6,3	6,3	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021	Target	Capaian	Target	Target	2026	
3	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Kasus	24	23	13	22	22	22	
4	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	56	56	54	57	58	58	
5	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	100	100	127	100	100	100	
6	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	98,16	98	72,4	98	98	98	
7	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	94,59	95	54,3	96	97	97	
8	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Poin/ 100.000 Penduduk	4,5	4,5	7	4,5	4,5	4,5	
9	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC semua kasus	Persen	88	95	72	95	97	97	
10	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	per 100.000 penduduk	54	40	7	35	35	35	
11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	100	100	100	100	
12	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Persen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
13	Cakupan kunjungan bayi	Persen	100	100	83,81	100	100	100	
14	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Persen	90	95	70	95	96	96	
15	Cakupan pelayanan nifas	Persen	96,3	97	70	97	98	98	
16	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	53,4	100	58	100	100	100	
17	Cakupan pelayanan anak balita	Persen	100	100	81,2	100	100	100	
18	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	Persen	99,41	100	99,67	100	100	100	
19	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persen	100	100	100	100	100	100	
20	Persentase Penduduk yang mempunyai BPJS/ KIS	Persen	93,33	93,5	98,41	94	95	95	
21	Jumlah PBI BPJS/KIS	Orang	619.894	1.114.110	761.161	1.215.392	1.316.675	1.316.675	
22	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	100	100	100	100	100	100	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021	Target	Capaian	Target	Target	2026	
23	Persentase Puskesmas yang melaksanakan PISPK dengan Intervensi keluarga	Persen	99,12	100	100	100	100	100	
24	Persentase puskesmas yang melakukan tata kelola masyarakat dengan indikator kinerja baik	Persen	13,51	25	40,54	35	45	45	
25	Persentase puskesmas yang melaksanakan program kesehatan tradisional	Persen	100	100	100	100	100	100	
26	Persentase puskesmas yang melaksanakan asuhan keperawatan baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	
27	Persentase puskesmas yang melaksanakan layad rawat tidak terencana	Persen	0	40	40	60	70	70	
28	Prevalensi Tekanan Darah Tinggi	Persen	8,16	9,96	9,62	10,86	11,76	11,76	
29	Proporsi kusta baru tanpa cacat	Persen	67,3	70	50	80	90	90	
30	Release From Treatment (RFT) rate kusta PB dan MB	Persen	91	92	84,5	93	95	95	
31	Persentase ODHA yang menjalani terapi ARV	Persen	95	95	70	95	95	95	
32	Insidensi HIV	Per 1.000 Penduduk yang tidak terinfeksi HIV	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
33	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis	Persen	92	92	83,2	92	92	92	
34	Prevalensi Malaria (Annual Parasite Incidence/API)	API per 1000 penduduk	0,0000009	<1	0	<1	<1	<1	
1	Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu / Bed Occupation Rate (BOR)	Persen	49%	60%	53%	65%	70%	70%	RSUD 45
2	Rata-rata jumlah hari pasien rawat inap yang tinggal di rumah sakit / Length of stay (LOS)	hari	4 hari	6 hari	3 hari	6 hari	6 hari	6 hari	
3	Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya / Turn Over Interval (TOI)	hari	4 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	
4	Angka Kematian umum di Rumah Sakit untuk tiap 1.000 penderita keluar / Gross Death Rate (GDR) ideal tidak lebih dari 45	per 1000	54 per 1000	40 per 1000	51 per 1000	38 per 1000	38 per 1000	38 per 1000	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021	Target	Capaian	Target	Target	2026	
5	Angka Kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar / Net Death Rate (NDR) ideal kurang dari 25	per 1000	29 per 1000	24 per 1000	23 per 1000	23 per 1000	23 per 1000	23 per 1000	
6	Rata-rata jumlah pasien yang menggunakan setiap tempat tidur dalam periode tertentu / Bed Turn Over (BTO)	kali	52 kali	50 kali	67kali	50 kali	50 kali	50 kali	
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Rumah Sakit	Persen	76,95	78	80,49	79	80	80	
8	Nilai Akreditasi Rumah Sakit diatas 80	standar akreditasi	paripurna	-	paripurna	-	Paripurna	paripurna	
1	Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu / Bed Occupation Rate (BOR)	Persen	67,67	68,77	51,71	69,37	70	70	RSUD Linggarjati
2	Rata-rata jumlah hari pasien rawat inap yang tinggal di rumah sakit / Length of stay (LOS)	hari	3,67	4	2,69	5	6	6	
3	Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya / Turn Over Interval (TOI)	hari	2,29	2,59	4,1	2,89	3	3	
4	Angka Kematian umum di Rumah Sakit untuk tiap 1.000 penderita keluar / Gross Death Rate (GDR) ideal tidak lebih dari 45	persen	32,53	32	19,33	31,5	30	30	
5	Angka Kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar / Net Death Rate (NDR) ideal kurang dari 25	persen	18,05	17,5	10,44	17	16,5	16,5	
6	Rata-rata jumlah pasien yang menggunakan setiap tempat tidur dalam periode tertentu / Bed Turn Over (BTO)	kali	51,45	51,3	47,04	51	50	50	
7	Nilai Akreditasi Rumah Sakit diatas 80	standar akreditasi	paripurna	-	paripurna	-	Paripurna	paripurna	
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Rumah Sakit	Persen	73,3	75	81,49	78	80	80	
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG:									DPUTR
1	Persentase kondisi jaringan irigasi yang baik	Persen	63,23	64	66,97	65	66	66	
2	Akses Pelayanan Air minum	Persen	91,1	94,19	91,75	95,74	97,29	97,29	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021	Target	Capaian	Target	Target	2026	
3	Akses Sanitasi Layak	Persen	93,65	96,33	96,68	97,68	99,02	99,02	
4	Persentase Kemantapan jalan	Persen	80,69	86	82,352	86,8	87,9	87,9	
5	Persentase keselamatan konstruksi	Persen	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase ketersediaan dokumen tata ruang	Persen	30	60	-	75	100	100	
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN:								DPKPP
1	Persentase Rumah Terdampak Bencana yang tertangani	Persen	100	100	100	100	100	100	
2	Luasan kawasan kumuh yang tertangani (SK Bupati)	Ha	54,35	2	9,6	2	2	60,35	
3	Persentase rumah layak huni	Persen	97,21	97,55	96,42	97,75	97,94	97,94	
4	Panjang jalan lingkungan untuk menunjang fungsi hunian yang tertangani	Km	149,96	50	95,82	50	50	299,96	
	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT:								
1	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	Persen	N/A	90	90	91	92	92	Satpol PP
2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Persen	84	85	86	86	87	87	
3	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	Persen	93	95	96	96	97	97	
4	Persentase Tingkat Kapasitas Aparatur Satpol PP dan Damkar	Persen	95	95	96	96	97	97	
5	Cakupan Pelayanan bencana Kebakaran Kab./Kota	Persen	80	88	89	89	90	90	
5	Cakupan Pelayanan bencana Kebakaran Kab./Kota	Persen	80	88	89	89	90	90	
6	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah Layanan WMK	Persen	100	100	100	100	100	100	
5	Cakupan Pelayanan bencana Kebakaran Kab./Kota	Persen	80	88	89	89	90	90	
6	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah Layanan WMK	Persen	100	100	100	100	100	100	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021	Target	Capaian	Target	Target	2026	
1	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Informasi Rawan Bencana	Persen	90.98	100	100	100	100	100	BPBD
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	92.02	100	100	100	100	100	
3	Jumlah Desa Tangguh yang terbentuk	Desa	30	10	18	10	10	30	
4	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	92	100	100	100	100	100	
5	Persentase penanganan pasca bencana	Persen	81	75	93,47	80	85	85	
	SOSIAL:								Dinsos
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	24.09	30	4,31	40	45	45	
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat tanggap dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/ Kota	Persen	70.40	75	100	80	80	80	
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar								
	TENAGA KERJA:								Disnakertrans
1	Jumlah Pelatihan Tenaga Kerja bersertifikat	Orang	470	304	426	336	368	1008	
2	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan	persen	50	50	93	55	60	60	
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK:								DPPKBP3A
1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	100%	80%	11%	80%	80%	80%	
3	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persen	100%	80%	76%	80%	80%	80%	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021	Target	Capaian	Target	Target	2026	
4	Rasio KDRT	Persen	0,0001	0,0001	0,000043	0,0001	0,0001	0,0001	
5	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per-100.000 penduduk perempuan)	per-100.000	8	8	6,9	7,8	7,6	7,6	
6	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) dari Belanja Langsung APBD	persen	55%	8%	32%	10%	12%	12%	
7	Persentase perempuan kepala keluarga berdaya ekonomi yang dibina	persen	0,626	0,645	0,645	0,657	0,669	0,669	
	PANGAN:								Diskatan
1	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Poin	93,2	87,01	93,8	88,04	89,03	89,03	
2	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Desa	68	2	4	2	2	74	
	PERTANAHAN:								DPKPP
1	Jumlah bidang tanah yang tersertifikasi	Bidang	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000	
	LINGKUNGAN HIDUP:								DLH
1	Penanganan Sampah	Ton	107.441	103,946	108189	104.439	105.929	105.929	
		Persen	61,09	58,2	59,76	57,8	57,4	57,4	
2	Pengurangan Sampah	Ton	11.200	10.716	15.728	11.022	11.333	11.333	
		Persen	22	6	8,73	6,1	6,2	6,2	
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	66,93	65,98	72,05	66,28	66,58	66,58	
	a. Indeks Kualitas Air	Poin	51,11	50,1	54,44	50,2	50,3	50,3	
	b. Indeks Kualitas Udara	Poin	86,96	84,5	92,84	84,6	84,7	84,7	
	c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Poin	57,05	59	63,82	60	61	61	
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL:								Disdukcapil

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021	Target	Capaian	Target	Target	2026	
1	Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	Persen	100	83	98,34	84	85	85	
2	Cakupan Kepemilikan KTP eL	Persen	99,4	98,5	99,06	98,75	99	99	
3	Cakupan Kepemilikan KIA	Persen	43,46	35	55,2	37,5	40	40	
4	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 s.d 18 Tahun	Persen	94,21	89	96,36	90	91	91	
5	Penanganan Pelayanan Pembuatan Akta Perkawinan	Persen	100	100	100	100	100	100	
6	Penanganan Pelayanan Pembuatan Akta Perceraian	Persen	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Persen	24	39	74,54	44	49	49	
8	Persentase pemenuhan layanan pengolahan dan penyajian data kependudukan dan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Persen	100	100	100	100	100	100	
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA:								DPMD
	Indeks Desa Membangun (IDM)								
1	Desa Status: Mandiri	Desa	183	10	134	10	10	213	
2	Desa Status: Maju	Desa	62	15	215	15	15	107	
	- Persentase Posyandu Strata Mandiri	Persen	48	60	49,86	70	80	80	
	- Jumlah BUMDES yang berbadan hukum	Unit	53	7	132	8	8	23	
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA:								DPPKBP3A
1	MCPR (Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Peserta KB Modern: Suntik, Pil, Implant, IUD, MOP, MOW))	persen	67,24	67,24	66,4	67,34	68	68	
2	i-bangga (Indeks Pembangunan keluarga)	point	52,73	52,73	62,68	52,93	53,15	53,15	
3	Unmet-need (Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi)	persen	20,86	20,76	10,3	20,56	20,46	20,46	
4	ASFR (Angka Kelahiran Remaja)	kelahiran	17,1	17	18,7	16,9	16,8	16,8	
5	MUKP (Median Usia Kawin Pertama Perempuan)	tahun	20	20	20,9	20,5	20,5	20,5	
6	TFR (Angka Kelahiran Total)	anak	2,3	2,3	2,03	2,25	2,2	2,2	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021	Target	Capaian	Target	Target	2026	
PERHUBUNGAN:									
1	Persentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	Persen	49	53		55	57	57	Dishub
2	Persentase orang yang menggunakan angkutan umum	Persen	27,12*	30		32	34	34	Dishub
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA:									
1	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (LPPD)	Persen	100	100	100	100	100	100	Diskominfo
2	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat	KIM	1,162	8	8	8	8	8	Diskominfo
3	Keterbukaan Informasi Publik	Predikat	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Diskominfo
4	Indeks SPBE	Point	2.88	3	3,57	3.1	3.2	3.2	Diskominfo
5	Pengentasan Desa Blank Spot	Desa	1	5	2	5	5	5	Diskominfo
6	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (LPPD)	Persen	80	82	84	85	89	89	Diskominfo
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH:									
1	Jumlah koperasi aktif	Unit Usaha	492	20	537	25	30	567	Diskopdagperin
2	Jumlah koperasi sehat	Unit usaha	75	75	85	75	75	300	Diskopdagperin
3	Jumlah koperasi binaan	Orang	100	50	799	50	50	250	Diskopdagperin
4	Jumlah koperasi modern	Orang	N/A	50	70	50	50	150	Diskopdagperin
5	Jumlah UKM binaan	Unit Usaha	1317	100	254	100	100	1617	Diskopdagperin
6	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Unit Usaha	200	200	563	250	300	950	Diskopdagperin
PENANAMAN MODAL:									
1	Regulasi Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Regulasi	1	3	0	3	3	10	DPMPSTP
2	Jumlah Data Potensi Investasi	Objek Potensi	3	2	2	2	2	9	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021	Target	Capaian	Target	Target	2026	
3	Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian	Laporan	1	2	2	2	2	2	
4	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Jenis	2	4	4	4	4	4	
5	Media informasi perizinan dan nonperizinan	Media	2	2	2	2	2	2	
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA:								Dispora
1	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	9,03	0,5	0,5	0,5	0,5	10.53	
2	Peningkatan Kapasitas SDM Kepeloporan	Orang	150	200	200	250	300	300	
3	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	19	6	58	8	10	43	
	STATISTIK:								
1	Jumlah Produsen Data	SKPD/NON SKPD	60	60	70	70	80	80	Diskominfo
2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	Diskominfo
3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	Diskominfo
4	Jumlah Metadata Statistik	PD/NON PD	26	40	60	50	60	60	Diskominfo
	PERSANDIAN:								
1	Jumlah Sertifikat TTE yang diterbitkan	Sertifikat TTE	997	1200	1350	1400	1600	1600	Diskominfo
	KEBUDAYAAN:								Disdikbud
1	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kegiatan	12	12	12	12	12	12	
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	buah	143	143	143	143	143	143	
3	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Jumlah karya budaya	24	24	24	24	24	24	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021	Target	Capaian	Target	Target	2026	
5	Jumlah Pengunjung Museum	Orang	34.489	36.390		38.392	40.192	40.192	
	PERPUSTAKAAN:								Dinas Arsip Perpus
1	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan daerah	buku	26150	30150	16943	32150	34150	34150	
2	Jumlah Perpustakaan Binaan	perpustakaan	70	100	1180	125	150	150	
3	Jumlah SDM Perpustakaan Binaan	orang	70	100	207	125	150	150	
4	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	orang	8750	10000	101052	11000	12000	12000	
5	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (LPPD)	Persen	0	32,5	79,85	34,5	36	36	
6	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (LPPD)	poin	0	68,5	70,85	69	70	70	
	KEARSIPAN:								Dinas Arsip Perpus
1	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku	Persen	85	90	90	92	93	93	
2	Jumlah SDM Pengelola Kearsipan yang dibina	Orang	62	124	80	186	186	186	
3	Tingkat Ketersediaan Arsip (LPPD)	Box	0	5	5	8	10	10	
	Layanan Urusan Pilihan								
	PARIWISATA:								Dispar
1	Kunjungan Wisata	Orang	3.448.917	3.793.809	3.824.520	4.173.190	4.590.509	4.590.509	
2	Jumlah Pengembangan Potensi Wisata Yang Berkelanjutan	Daya Tarik Wisata (DTW)	12	3	15	4	5	24	
3	Pembinaan Fasilitasi HAKI Ekonomi Kreatif	Orang	N/A	50	50	50	75	175	
4	Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Bersertifikat	Orang	25	50	75	50	75	200	
	PERTANIAN:								
1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persen	N/A	7,93		8,21	8,36	8,36	Diskatan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021	Target	Capaian	Target	Target	2026	
	Meningkatnya Populasi Ternak Besar dan Ternak Kecil	Ekor		4678		4702	4725	4725	DISKANNAK
	Produksi Daging (Ton):								DISKANNAK
1	1. Daging Sapi	Ton	2.352	2.259	2.866	2.282	2.305	2.305	DISKANNAK
2	2. Daging Domba/Kambing	Ton	1.430	1.348	1.488	1.361	1.375	1.375	DISKANNAK
3	3. Daging Ayam Buras	Ton	591	648	716	681	715	715	DISKANNAK
4	4. Daging Ayam Ras Petelur	Ton	1.777	1.479	2.179	1.509	1.539	1.539	DISKANNAK
5	5. Daging Ayam Ras Pedaging	Ton	30.006	31.679	33.415	32.63	33.609	33.609	DISKANNAK
	Produksi Telur (Ton):								DISKANNAK
6	1. Telur Ayam Buras	Ton	1.361	1.493	1.496	1.568	1.646	1.646	DISKANNAK
7	2. Telur Ayam Ras Petelur	Ton	21.823	18.168	26.763	18.531	18.902	18.902	DISKANNAK
8	3. Telur Itik	Ton	469	484	559	499	514	514	DISKANNAK
9	Produksi Susu Sapi (Ton):								DISKANNAK
10	Susu Sapi Perah	Ton	18.402	18.979	18.107	19.074	19.17	19.17	DISKANNAK
	Populasi Ternak (Ekor):								DISKANNAK
11	1. Sapi Perah	Ekor	7.278	7.943	7.943	8.022	8.102	8.102	DISKANNAK
12	2. Sapi Potong	Ekor	30.631	30.559	30.559	31.17	31.794	31.794	DISKANNAK
13	3. Kerbau	Ekor	4.647	4.678	4.678	4.702	4.725	4.725	DISKANNAK
14	4. Domba	Ekor	136.620	133.79	133790	134.459	135.131	135.131	DISKANNAK
15	5. Kambing	Ekor	7.725	7.718	7.718	7.756	7.795	7.795	DISKANNAK
16	6. Ayam Buras	Ekor	634.796	696.545	696.545	731.373	767.941	767.941	DISKANNAK
17	7. Ayam Ras Petelur	Ekor	1.908.399	1.588.772	2.340.353	1.620.548	1.652.959	1.652.959	DISKANNAK
18	8. Ayam Ras Pedaging	Ekor	3.814.651	4.027.412	4.248.100	4.148.235	4.272.682	4.272.682	DISKANNAK
19	9. Itik	Ekor	74.710	75.836	89.072	76.595	77.361	77.361	DISKANNAK
20	Bahan Pangan Asal Hewan (Ton)	Ton	-	surplus	surplus	surplus	Surplus	surplus	DISKANNAK
21	Penanggulangan Kemiskinan (RTP)	RTP	304	731		733	774	774	DISKANNAK

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021	Target	Capaian	Target	Target	2026	
22	Terlaksananya kegiatan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persen	-	7		8	10	10	
	PERDAGANGAN:								
1	Jumlah pasar yang direvitalisasi	Unit	4	1	-	1	1	7	Diskopdagperin
2	Jumlah pelaksanaan operasi pasar murah dan bazar pasar murah	Laporan	8	5	5	5	5	23	Diskopdagperin
3	Nilai ekspor bersih perdagangan	US\$	6.861.579	1.772.802	3.579.914	1.882.802	1.992.802	12.509.985	Diskopdagperin
4	Jumlah alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/ tera ulang	Unit	6.392	5.000	5.528	5.000	5.000	21.392	Diskopdagperin
5	Jumlah produk unggulan daerah yang dipromosikan	produk	N/A	50	352	50	50	150	Diskopdagperin
	PERINDUSTRIAN:								
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	Persen	2,27	2,31	1	2,32	2,34	2,34	Diskopdagperin
2	Pertumbuhan industri	Persen	13	2	2	2	2	2	Diskopdagperin
3	Jumlah pendataan SIINAS	Dokumen	40	50	77	50	50	190	Diskopdagperin
	TRANSMIGRASI:								Disnakertrans
1	Jumlah Translok yang diberdayakan	Orang	N/A	40		60	80	80	
	KELAUTAN DAN PERIKANAN:								
1	Meningkatnya Tingkat Produksi Perikanan Budidaya Ikan Kecil	Ton	24.567,65	28.500	27.000	30.500	32.500	32.500	Diskanak
2	Tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan (NTP)	Persen	102,75	104,2	102	104,5	105	105	Diskanak
3	Tingkat produksi perikanan budidaya	Ton	24.567,65	28,5	27.000	30,5	32,5	32,5	
4	Cakupan kelompok pembudidaya ikan	Kelompok	700	1000	680	1100	1200	1200	
5	Jumlah Rumah Tangga perikanan	Orang	12.238	23	22.026	24	25	25	
6	Pembangunan kampung perikanan budidaya air tawar berbasis kearifan lokal	Unit	N/A	2	0	4	6	6	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021	Target	Capaian	Target	Target	2026	
7	Peningkatan Produksi Non Konsumsi	Persen	N/A	10,5	0	15	20	20	
8	Meningkatnya Tingkat Produksi Perikanan Tangkap	Ton	350,95	420	440	450	475	475	
9	Tingkat kesejahteraan nelayan (NTN)	Persen	102,95	102,75	101	103	103,25	103,25	Diskanak
10	Tingkat produksi perikanan tangkap	Ton	350,95	420	440	450	475	475	
11	Cakupan Kelompok Usaha Bersama (KUB)	Kelompok	13	20	13	25	30	30	
12	Jumlah Rumah Tangga Nelayan	Orang	1,85	1.800	1.500	1.900	2.000	2.000	
13	Meningkatnya Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Ton	210,59	250	923	260	275	275	
14	Tingkat kesejahteraan pengolah dan pemasar hasil perikanan	Persen	102,1	101,5	99	102,25	103	103	Diskanak
15	Tingkat produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Ton	210,59	250	923	260	275	275	
16	Cakupan kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Kelompok	37	40	40	50	60	60	
17	Jumlah Rumah Tangga pengolah dan pemasar	Orang	1.750	3.000	3.000	3.500	4.000	4.000	
18	Tingkat konsumsi ikan	Kg/Kapita/Tahun	25	27	31	27	27	27	
19	Meningkatnya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Ha	200	200	200	200	200	200	
20	Rasio Kawasan Perairan terhadap total lindung luas nelayan	Ha	200	200	200	200	200	200	Diskanak
21	Persentase tingkat kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundang-undangan	Persen	14	8	14	5	2	2	
22	cakupan kelompok masyarakat pengawas sumber daya perikanan	Kelompok	3	4	4	5	6	6	
	Layanan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan								
	SEKRETARIAT DAERAH:								Setda
1	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	N/A	70-75	100	75-80	>80	>80	Barjas
2	Tingkat Ketepatan Waktu Proses Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase	N/A	85	100	90	95	95	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021	Target	Capaian	Target	Target	2026	
3	Persentase Nilai Paket Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa (RUP) yang diinput pada Aplikasi SIRUP LKPP	Persentase	N/A	90	100	95	100	100	
4	Persentase Perumusan Kebijakan umum serta koordinasi, fasilitasi, pengendalian dalam aspek pembangunan	Persentase	N/A	80	100	80	80	80	Adpem
5	Persentase Kepatuhan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase	N/A	80	100	80	80	80	
6	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dari BUMD dan BLUD	Persentase	N/A	5	1,5	5	5	5	Ekonomi
7	Persentase perumusan kebijakan umum serta koordinasi, fasilitasi, pengendalian perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase	N/A	85	100	85	85	85	
8	Nilai LPPD Kabupaten di Tingkat Provinsi/Nasional	Level & Score	N/A	3,1	belum tersedia	3,2	3,3	3,3	Tapem
9	Persentase Kepatuhan Terhadap Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	N/A	84	100	85	86	86	
10	Persentase Penyelesaian Perkara Hukum	Persentase	N/A	100	100	100	100	100	Hukum
11	Persentase Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan: Jumlah Bahan Kebijakan Daerah yang diusulkan sebagai Produk Hukum	Persentase	N/A	>80	100	>90	>90	>90	
12	Pengelolaan Sistem Informasi Hukum terintegrasi	Persentase	N/A	100	100	100	100	100	
13	Persentase Lembaga/ Organisasi Sosial/ Kemasyarakatan/ Individu yang dibina dan difasilitasi	Persentase	20	20	100	20	20	20	Kesra
14	Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Persentase	N/A	80	100	80	80	80	
15	Persentase bahan kebijakan umum pembinaan, pemahaman, pengamalan keagamaan	Persentase	N/A	80	66,69	80	80	80	
16	Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Internal SETDA	Persentase	N/A	80	100	80	80	80	Umum
17	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Program, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase	N/A	80	100	80	80	80	Perencanaan & Keuangan
18	Persentase Ketepatan waktu pelaksanaan dan penatausahaan keuangan di lingkungan bagian pada Sekretariat Daerah	Persentase	N/A	80	100	80	80	80	
19	Persentase Kepatuhan Terhadap Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Berbasis SPBE	Persentase	N/A	80	100	80	80	80	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021	Target	Capaian	Target	Target	2026	
20	Tingkat Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan keprotokolan	Persentase	N/A	80	100	80	80	80	Prokompim
21	Persentase Kegiatan Pemerintah Daerah yang dipublikasikan	Persentase	N/A	80	100	80	80	80	
22	Jumlah viewer hasil publikasi dan Dokumentasi	Orang	N/A	750	750	1000	1080	1080	
23	Persentase Perangkat Daerah dengan Kinerja yang Efektif dan Efisien	Persentase	N/A	80	100	80	85	85	Organisasi
Layanan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan									
PERENCANAAN PEMBANGUNAN:									
1	Persentase keterwakilan masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase kesesuaian Program/kegiatan di RKPD dan APBD	Persen	100	100	100	100	100	100	
3	Perencanaan Sektoral dan Kewilayahan	Dokumen	4	4	4	4	4	12	
4	Dokumen Perencanaan (RPJP; RPD dan RKPD)	Dokumen	2	4	4	4	2	10	
KEUANGAN:									
1	Penetapan APBD tepat waktu	Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	BPKAD
2	Persentase Laporan Aset Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	
1	Persentase Peningkatan PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	0.5	1	0,42	1.5	1.5	1.5	Bappenda
2	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Pajak Daerah	Persen	68	70	80	75	80	80	
3	Jumlah Layanan Pajak Daerah	WP	3630	800	5335	900	1000	1000	
4	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah	Persen	89,98	95	94,99	96	97	97	
KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN:									
1	Indeks Profesionalitas ASN	Persen	57	57	78,23	60	63	63	
2	Indeks Sistem Merit	Point	282	290	289	290	325	325	BKPSDM

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021	Target	Capaian	Target	Target	2026	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN:								Bappeda
1	Kajian Isu Pembangunan	Dokumen	5	2	2	2	2	6	
2	Inovasi Daerah	Buah	1	1	1	1	1	3	
	SEKERTARIAT DPRD:								Sekretariat DPRD
1	Pelayanan Administrator Pemerintahan	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
	Layanan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan								
	PENGAWASAN:								Inspektorat
1	Persentase tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Kabupaten Kuningan	Persen	71,65	70	76	71	72	72	
2	Persentase tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Provinsi Jawa Barat	Persen	76,7	74	75	74	75	75	
3	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK	Persen	82,31	82	69	83	83	83	
4	Jumlah SKPD yang memiliki nilai SAKIP minimal BB	OPD	26	10	29	12	15	15	
5	Level SPIP	Level	3	2	3	2	3	3	
6	Capaian Nilai MCP	Nilai	91	70	88	73	75	75	
7	Level Kapabilitas APIP	Level	2	3	3	3	3	3	
	Layanan Unsur Pemerintahan Umum								
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK:								Kesbangpol
1	Persentase Partisipasi masyarakat dalam pemilu	Persen	74,11* (2019)	75	76,44	-	-	75	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021	Target	Capaian	Target	Target	2026	
2	Pembinaan Kesadaran Politik Masyarakat	Orang	340	300	450	300	300	300	
3	Pembinaan Ideologi Negara dan Karakter Kebangsaan	Orang	400	300	558	300	300	300	
4	Indeks Toleransi Beragama	Poin	72,39	70	76,49	70	70	70	
	Layanan Unsur Kewilayahan								
	KECAMATAN:								32 Kecamatan
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	63	64	65	65	66	66	Karangkencana
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan Karangkencana	Persen	63	65	66	-	-	65	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	190	195	196	200	210	210	
5	Jumlah KK Miskin	KK	300	309	310	290	261	261	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan Karangkencana	Keluarga	70	60	61	40	25	25	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	71	75	76	83	95	95	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	76	77	78	78	79	79	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	83	84	85	85	86	86	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	251	252	253	253	254	254	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	80	100	100	100	Ciniru

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021	Target	Capaian	Target	Target	2026	
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan (Berlaku hanya Pemilu)	Persen	-	90	80.30%	-	-	90	
3	Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan	Persen	75	78	75%	80	85	85	
4	Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan	UMKM	815	820	810	850	870	870	
5	Jumlah KK Miskin	KK	409	390	380	350	330	330	
6	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan di wilayah Kecamatan	Keluarga	380	350	345	300	280	280	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100%	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	97	97	315	97	99	99	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	89	92	90%	95	96	96	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	85	90	87	95	96	96	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	324	325	324	330	335	335	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	40	60	60	70	80	80	Jalaksana
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	90	70	72	-	-	70	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	302	302	302	302	302	302	302	
5	Jumlah KK Miskin	KK	7768	7768	7768	7768	7768	7768	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	7768	7768	7768	7768	7768	7768	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021	Target	Capaian	Target	Target	2026	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	90	90	60	90	90	90	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	168	168	168	168	168	168	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	100	100	100	100	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	24	24	24	24	24	24	
11	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	600	600	600	600	600	600	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	900	900	900	900	900	900	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	90	93	65	96	100	100	Lebakwangi
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	100	100	66	-	-	100	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	70	72	100	74	76	76	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	331	365	196	400	450	450	
5	Jumlah KK Miskin	KK	100	95	310	90	85	85	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	1705	1875	1896	2062	2268	2268	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	155	155	15	155	155	155	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	100	100	83	100	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1		1	1	1	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021	Target	Capaian	Target	Target	2026	
11	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	450	470	303	525	575	575	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	90	100	100	100	Darma
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	-	85	90	-	-	85	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	90	100	90	100	100	100	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	550	600	600	650	700	700	
5	Jumlah KK Miskin	KK	6.125	5.500	5,5	5.000	4.500	4.500	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	6.125	5.500	5,5	5.000	4.500	4.500	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	100	100	100	100	100	100	
9	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
10	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	1	1	90	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	150	200	90	250	300	300	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	150	181	90	217	230	230	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	80	85	85	90	95	95	Maleber
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan (Berlaku hanya Pemilu)	Persen	80	80	70	-	-	80	
3	Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan	Persen	75	80	100	85	90	90	
4	Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan	UMKM	2148	2198	2158	2248	2298	2298	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021	Target	Capaian	Target	Target	2026	
5	Jumlah KK Miskin	KK	268	750	750	98	48	48	
6	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan di wilayah Kecamatan	Keluarga	940	900	900	880	850	850	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	185	185	185	185	185	185	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	92	95	95	97	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	957	1000	960	1070	1100	1100	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	384	404	385	408	412	412	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	100%	100	100	100	Ciwaru
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	80	90	58.53%	-	-	90	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	80	80	80%	80	85	85	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	745	715	603	625	550	550	
5	Jumlah KK Miskin	KK	4294	3894	1800 KK	2294	1294	1294	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	0	0	0	0	0	0	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100%	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	137	137	85%	137	137	137	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	80	100	90%	100	100	100	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021	Target	Capaian	Target	Target	2026	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	80	100	90%	100	100	100	
12	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	125	130		140	150	150	
	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	298	300	196	310	320	320	
13	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	125	130		140	150	150	
	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	298	300	196	310	320	320	
	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	125	130		140	150	150	
	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	298	300	196	310	320	320	
	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	62	63	70	64	66	66	
1	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	125	130		140	150	150	Pancalang
	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	298	300	196	310	320	320	
	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	62	63	70	64	66	66	
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	62	65	65	-	-	65	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	100	100	95	100	100	100	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	128	140	140	154	169	169	
5	Jumlah KK Miskin	KK	342	308	308	278	251	251	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021	Target	Capaian	Target	Target	2026	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	66	50	50	35	22	22	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	70	77	65	84	92	92	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	75	76	76	78	79	79	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	84	85	80	86	87	87	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	250	251	240	252	253	253	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	75	80	75	85	90	90	Cimahi
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan (Berlaku hanya Pemilu)	Persen	-	87	67,87	-	-	87	
3	Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan	Persen	78	80	85	85	90	90	
4	Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan	UMKM	1231	350	355	380	400	400	
5	Jumlah KK Miskin	KK	2415	1875	1880	1573	1180	1180	
6	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan di wilayah Kecamatan	Keluarga	2415	1875	1880	1573	1180	1180	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	50	60	70	75	85	85	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	70	85	90	95	111	111	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	70	85	88	85	90	90	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	2	2	2	2	2	2	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021	Target	Capaian	Target	Target	2026	
11	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	230	245	75	250	280	280	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	115	135	67,87	145	175	175	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	95	100	100	100	Kadugede
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan (Berlaku hanya Pemilu)	Persen	-	85	75.6	-	-	85	
3	Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan	Persen	75	80	75	85	90	90	
4	Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan	UMKM	1500	1725	91	2000	2314	2314	
5	Jumlah KK Miskin	KK	3724	3500	2997	3000	2500	2500	
6	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan di wilayah Kecamatan	Keluarga	3724	3500	2997	3000	2500	2500	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	85	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	100	120	133	120	120	120	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	70	85	80	95	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	2	2	2	2	2	2	
11	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	90	95	95	100	130	130	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	80	85	75.6	120	150	150	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	79	81	80	83	87	87	Cibingbin
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan (Berlaku hanya Pemilu)	Persen	-	82	82	-	-	82	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021	Target	Capaian	Target	Target	2026	
3	Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan	Persen	80	82	80	84	88	88	
4	Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan	UMKM	700	705	700	710	750	750	
5	Jumlah KK Miskin	KK	5854	5854	5850	5854	5854	5854	
6	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan di wilayah Kecamatan	Keluarga	5854	5854	5850	5854	5854	5854	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	200	200	200	200	200	200	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	90	92	92	95	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	513	515	515	517	519	519	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	120	125	122	127	130	130	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	70	80	80	82	84	84	Cigandamekar
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	77	80	65.8	-	-	80	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	1.744	1.918	1,918	2.110	2.321	2.321	
5	Jumlah KK Miskin	KK	7.096	6.386	6,386	5.748	5.173	5.173	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	7.096	6.386	6,386	5.748	5.173	5.173	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021	Target	Capaian	Target	Target	2026	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	107	117	117	128	140	140	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	90	92	92	95	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	490	500	500	550	600	600	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	301	331	331	364	400	400	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	100	100	100	100	Mandirancan
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan (Berlaku hanya Pemilu)	Persen	70	70	70	-	-	70	
3	Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan	Persen	75	77	74	80	83	83	
4	Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan	UMKM	600	620	615	650	700	700	
5	Jumlah KK Miskin	KK	1570	1410	1320	1294	1120	1120	
6	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan di wilayah Kecamatan	Keluarga	700	750	750	950	1050	1050	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	130	130	140	130	130	130	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	90	92	80	95	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	2	2	2	2	2	2	
11	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	70	75	75	80	85	85	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya(katagori Perizinan)	Dokumen	245	250	250	255	260	260	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021	Target	Capaian	Target	Target	2026	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	80	85	75	90	95	95	Japara
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan (Berlaku hanya Pemilu)	Persen	60	65	65	-	-	65	
3	Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan	Persen	75	77	80	80	85	85	
4	Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan	UMKM	1007	1015	1010	1025	1035	1035	
5	Jumlah KK Miskin	KK	3075	2767	2499	2490	2241	2241	
6	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan di wilayah Kecamatan	Keluarga	480	500	2958	525	550	550	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	108	108	108	108	108	108	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	85	90	90	95	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	350	355	98	360	365	365	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	110	115	724	120	125	125	
	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	350	355	98	360	365	365	
	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	100	100	100	100	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	100	100	100	100	Garawangi
	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	-	80	96	-	-	80	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021	Target	Capaian	Target	Target	2026	
2	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	100	100	100	100	
	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	-	80	96	-	-	80	
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	75	80	80	85	90	90	
3	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	100	100	100	100	
	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	-	80	96	-	-	80	
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	75	80	80	85	90	90	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	500	550	550	600	630	630	
5	Jumlah KK Miskin	KK	2415	1875	231	1573	1180	1180	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	2415	1875	231	1573	1180	1180	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	60	60	65	60	60	60	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	178	178	95	178	178	178	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	85	90	90	95	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	2	2	2	2	2	2	
11	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	90	95	139	100	160	160	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	80	85	426	100	120	120	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021	Target	Capaian	Target	Target	2026	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	80	100	100	100	Cilebak
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan (berlaku hanya Pemilu)	Persen	-	85	75	-	-	85	
3	Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan	Persen	75	80	80	80	85	85	
4	Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan	UMKM	237	262	250	300	300	300	
5	Jumlah KK Miskin	KK	415	400	300	385	360	360	
6	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	109	109	260	100	100	100	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	85	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	79	80	80	80	80	80	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	100	100	85	100	100	100	
10	Jenis pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	60	70	60	70	70	70	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya (katagori perizinan).	Dokumen	250	255	245	255	260	260	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	100	100	100	100	Subang
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	-	85	75	-	-	85	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	72	75	75	77	79	79	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	500	545	560	670	700	700	
5	Jumlah KK Miskin	KK	1300	1150	1050	1000	875	875	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021	Target	Capaian	Target	Target	2026	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	565	650	630	825	900	900	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	105	105	112	105	105	105	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	83	90	85	95	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	125	170	145	200	235	235	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	150	181	183	217	230	230	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	70	73	71	75	78	78	Ciawigebang
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan (berlaku hanya Pemilu)	Persen	75	80	70.30%	-	-	80	
3	Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan	Persen	100	100	95%	100	100	100	
4	Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan	UMKM	4.520	4.957	9,253	5.000	5.500	5.500	
5	Jumlah KK Miskin	KK	10.113	9.102	10,343	8.192	7.373	7.373	
6	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	4.181	4.520	4,528	4.957	5.000	5.000	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100%	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	300	312	315	320	325	325	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	75	90	75%	95	100	100	
10	Jenis pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	2	2	2	2	2	2	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021	Target	Capaian	Target	Target	2026	
11	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	513	515	71	517	519	519	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya (katagori perizinan).	Dokumen	250	280	70.30%	285	290	290	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	99	100	100	100	100	100	Cibeureum
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	80	95	63	-	-	95	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	77	93	85	94	95	95	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	0	0	0	0	0	0	
5	Jumlah KK Miskin	KK	576	500	480	450	400	400	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	0	0	0	0	0	0	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	95	95	89	95	95	95	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	89	92	90	95	97	97	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	85	90	92	95	100	100	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	210	230	225	245	250	250	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	95	100	100	100	Nusaherang
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	-	85	72.36%	-	-	85	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021	Target	Capaian	Target	Target	2026	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	75	75	80%	77	79	79	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	550	600	550	650	700	700	
5	Jumlah KK Miskin	KK	1300	1150	14,539	1000	875	875	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	565	650	120	825	900	900	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100%	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	90	90	100%	90	90	90	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	85	90	90%	95	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	100	125	1,425	140	200	200	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	150	181	220	217	230	230	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	80	80	80	82	84	84	Kramatmulya
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	77	80	80	-	-	80	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	297	471	471	663	874	874	
5	Jumlah KK Miskin	KK	3.065	2.355	2,355	1.717	1.142	1.142	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	3.065	2.355	2,355	1.717	1.142	1.142	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021	Target	Capaian	Target	Target	2026	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	100	100	100	100	112	112	
9	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
10	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	230	250	600	280	310	310	
11	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	250	280	80	313	349	349	
1	Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	100	100	100	100	Cigugur
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	80	80	80	-	-	80	
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	90	>90	>90	>90	>90	>90	
4	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan yang Berada di wilayah Kecamatan Cigugur	Lokasi	78	>78	8	>78	>78	>78	
5	Jumlah Kelompok Masyarakat Kelurahan yang diberdayakan	Kelompok	5	5	15	10	15	15	
6	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	550	600	500	620	640	640	
7	Jumlah Keluarga Miskin Yang Diberdayakan di Wilayah Kecamatan	Keluarga	462	82	82	100	130	130	
8	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	100	90	70	100	120	120	
9	Tingkat Kepatuhan Aparatur Desa dan atau Kelurahan Dalam Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	90	100	100	100	100	100	
10	Jumlah Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jenis	2	2	2	2	2	2	
11	Persentase Kegiatan Pemerintahan Yang Dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	107	316	132	316	316	316	
13	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	2041	646	1840	650	650	650	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021	Target	Capaian	Target	Target	2026	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	90	100	100	100	Cidahu
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	72	82	65%	-	-	82	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	75	80	75	85	90	90	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	297	350	325	400	500	500	
5	Jumlah KK Miskin	KK	1.349	1.200	1,1	1.000	900	900	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	1.290	1.000	700	900	800	800	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	90	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	144	150	150	150	150	150	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	90	92	90	95	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	477	490	305	510	530	530	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	250	300	175	320	350	350	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	75	100	100	100	Hantara
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	70	72	81%	-	-	72	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	70	72	75%	74	76	76	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	705	776	327	854	862	862	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021	Target	Capaian	Target	Target	2026	
5	Jumlah KK Miskin	KK	1586	1427	379	1284	1156	1156	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	777	855	340	941	1035	1035	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100%	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	172	172	100%	172	172	172	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	75	80	90%	85	90	90	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	84	92	87	101	111	111	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen			324				
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	100	100	100	100	Pasawahan
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan (berlaku hanya Pemilu)	Persen	-	76	76	-	-	76	
3	partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan	Persen	80	82	82	84	88	88	
4	Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan	UMKM	156	159	159	162	165	165	
5	Jumlah KK Miskin	KK	2051	1876	1876	1576	1500	1500	
6	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	0	0	0	0	0	0	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	110	110	110	110	110	110	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	100	100	100	100	100	100	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021	Target	Capaian	Target	Target	2026	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	2	2	2	2	2	2	
11	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	486	506	100	528	548	548	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya (Kategori Perizinan)	Dokumen	568	588	76	608	628	628	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	0	10	8%	10	10	10	Cipicung
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	80	85	78%	-	-	85	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	65	70	65%	74	77	77	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	500	885	850	950	1055	1055	
5	Jumlah KK Miskin	KK	1476	1358	1458	1277	1179	1179	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	1476	1358	1358	1277	1179	1179	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	50	70	68	80	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	70	80	80	90	130	130	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	80	100	90	100	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	120	130	125	140	150	150	
11	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	576	720	700	750	780	780	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	120	240	240	360	480	480	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	100	100	100	100	Selajambe

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021	Target	Capaian	Target	Target	2026	
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	-	85	80	-	-	85	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	72	75	73	77	79	79	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	500	545	560	670	700	700	
5	Jumlah KK Miskin	KK	1300	1150	1050	1000	875	875	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	565	650	635	825	900	900	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	105	105	105	105	105	105	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	83	90	90	95	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	125	170	182	200	235	235	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	86	100	100	100	Sindangagung
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	85	90	80	-	-	90	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	85	90	>90	95	100	100	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	3139	3139	3139	3139	3139	3139	
5	Jumlah KK Miskin	KK	3898	3508	3508	3157	2841	2841	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	842	757	757	682	613	613	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021	Target	Capaian	Target	Target	2026	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	137	137	137	137	137	137	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	92	94	94	96	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	300	350	1000	375	400	400	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	200	225	55	250	275	275	
1	Persentase Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Diatasi	Persen	100	100	100	100	100	100	Kuningan
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan (berlaku hanya Pemilu)	Persen	76	77	77	-	-	77	
3	Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan	Persen	90%	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%	
4	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan yang Berada di wilayah Kecamatan Kuningan	Lokasi	70	75	75	85	95	95	
5	Jumlah Kelompok Masyarakat Kelurahan yang diberdayakan	Kelompok	20	20	20	20	20	20	
6	Jumlah UMKM Yang Difasilitasi Untuk Diberdayakan	UMKM	32	32	20	32	32	32	
7	Jumlah KK Miskin	KK	8042	7882	7882	7725	7571	7571	
8	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi/ dikoordinasikan untuk diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	1203	1180	1180	1157	1134	1134	
9	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	80	90	90	100	120	120	
10	Tingkat Kepatuhan Aparatur Desa dan atau Kelurahan Dalam Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	100	100	100	100	100	100	
11	Jumlah Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jenis	2	2	2	2	2	2	
12	Persentase Kegiatan Pemerintahan Yang Dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021	Target	Capaian	Target	Target	2026	
13	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Dokumen	900	1000	1000	1000	1000	1000	
14	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya (katagori perizinan).	Pelayanan	540	600	600	660	726	726	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	90	92	92	95	98	98	Cilimus
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	80	80	80	-	-	80	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	75	80	80	85	90	90	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	1.600	1,65	1,6	1700	1750	1750	
5	Jumlah KK Miskin	KK	2.838	2,5	2500	2,3	2,1	2,1	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	2.520	2.600	2,6	2.710	0.282	0.282	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	507	507	507	507	507	507	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	90	92	92	95	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	477	490	490	510	530	530	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	299	310	310	330	350	350	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	70	73	74	75	78	78	Luragung
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan (berlaku hanya Pemilu)	Persen	-	80	81	-	-	80	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021	Target	Capaian	Target	Target	2026	
3	Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan	UMKM	4.520	4.957	4,957	5.000	5.500	5.500	
5	Jumlah KK Miskin	KK	10.113	9.102	9,104	8.192	7.373	7.373	
6	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	4.181	4.520	4,521	4.957	5.000	5.000	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	300	312	314	320	325	325	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	75	90	91	95	100	100	
10	Jenis pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	2	2	2	2	2	2	
11	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	84	92	93	101	111	111	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya (katagori perizinan).	Dokumen	250	280	74	285	290	290	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	80	100	100	100	Kalimanggis
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	-	80	60	-	-	80	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	100	100	80	100	100	100	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	150	324	300	516	727	727	
5	Jumlah KK Miskin	KK	3.065	2.355	2,086	1.717	1.142	1.142	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	3.065	2.355	2,086	1.717	1.142	1.142	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	85	100	100	100	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021	Target	Capaian	Target	Target	2026	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	100	100	96	100	100	100	
9	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
10	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	75	85	80	90	100	100	
11	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	100	130	124	150	200	200	

Sumber: Data Olahan PD Kabupaten Kuningan, 2025

2.5. Inovasi Daerah

Dalam rangka percepatan pembangunan daerah yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik yang prima, dan peningkatan daya saing daerah, arah kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan dan isu strategis, Kabupaten Kuningan mengembangkan program kegiatan inovatif untuk mendorong pelaksanaan prioritas pembangunan yang dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyediaan berbagai fasilitas publik di tengah terbatasnya kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah. Pendekatan holistik dalam pelaksanaan perencanaan ini dilaksanakan melalui perencanaan yang terkoordinasi secara multi-sektor, multi-stakeholder dan multi-PD berdasarkan tematik fokus pembangunan daerah.

Berikut merupakan rincian implementasi kegiatan inovasi PD yang telah berjalan:

Tabel 2. 12 Inovasi Daerah Kabupaten Kuningan

No	Inovasi	Deskripsi Inovasi	Urusan Inovasi	Bentuk Inovasi	Tujuan Inovasi	Manfaat Inovasi	Anggaran (Rp)	Tahun Awal Implementasi
1	SIPANDUK (Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan)	merupakan kategori inovasi di Bidang Tata kelola Pemerintah yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi yang melibatkan semua pemangku kepentingan dan masyarakat di Kabupaten Kuningan.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Inovasi pelayanan public	Untuk memberikan kemudahan dan sebagai alternatif pelayanan Administrasi Kependudukan secara online dan digital yang berbasis web dengan Alamat https://sipanduk.kuningankab.go.id/	Mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelayanan administrasi kependudukan tanpa harus bolak balik datang ke kantor.	0	2021
2	GERBANG BERKAH (Gerakan Membangun Kebersamaan yang Agamis di Sekolah)	Sesuai dengan surat edaran Bupati Kabupaten Kuningan, Nomor: 420/3012/Disdikbud/2024 Tentang membangun Kebersamaan yang agamis di sekolah. Gerbang Berkah ini merupakan implementasi kurikulum Merdeka dan Upaya mewujudkan projek penguatan Pelajaran pancasila serta menumbuhkan kehidupan sosial di sekolah dengan kondisi lingkungan yang menyenangkan, pengembangan moral, etika baik dan sikap toleransi diantara warga sekolah yang berlandaskan pada agama.	Inovasi bidang Pendidikan	Inovasi bidang pendidikan	gerakan dalam membangun kebersamaan, kekompakan antar siswa, guru, tenaga kependidikan di sekolah, termasuk dengan masyarakat setempat guna menyatukan perbedaan menjadi landasan untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain, dan rasa toleransi yang disinergikan dengan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan setiap hari Jumat, Kegiatan Gerakan Membangun Kebersamaan yang Agamis di Sekolah diantaranya Mengaji Bersama, Sholat Dhuha, Tausiah atau kuliah 7 (Tujuh) menit (kultum)	Untuk Mengimplementasikan surat edaran Bupati Kabupaten Kuningan Tentang Gerakan Membangun Kebersamaan yang Agamis di Sekolah untuk jenjang Pendidikan PAUD, SD dan SMP.	0	2024

No	Inovasi	Deskripsi Inovasi	Urusan Inovasi	Bentuk Inovasi	Tujuan Inovasi	Manfaat Inovasi	Anggaran (Rp)	Tahun Awal Implementasi
3	KABISA DESA (Kolaborasi Aneka Agribisnis Bina Bersama Desa)	KABISA DESA merupakan suatu konsep pengembangan pertanian terpadu antara sektor pertanian (tanaman sorgum, cabe jawa, hortikultura dan padi organik) dengan agribisnis ternak (domba, ayam, pengolahan pakan ternak, pengolahan limbah ternak menjadi pupuk organik) dan dengan agribisnis ikan (ikan nila dengan sistem bioplock)	Kolaborasi Pengembangan sektor pertanian, agribisnis ternak dan ikan	Inovasi pengembangan pertanian	shalat Jum'at berjamaah di masjid dan Makan Bersama (berbagi bekal makanan) Untuk mengembangkan Program Kabisa Desa dengan berorientasi peranan penting perekonomian daerah yang berbasis pertanian dengan mengembangkan pelaksanaan inovasi Gerakan pengembangan Kambing dan ayam (Gerbang Kaya) dan system kolam bioflock optimalisasi ideal naikkan ekonomi keluarga pelaku budidaya pondasi nikmat illahi (si koboy naek kuda poni).	Untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui dengan menyediakan kebutuhan konsumsi ikan dalam daerah sendiri, dan Upaya penanganan kemiskinan ekstrim yang ada di desa	0	2022

Sumber: Data Olah Bappeda, 2025

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah pada bab ini akan memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi makro Kabupaten Kuningan serta pengaruh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global terhadap perekonomian daerah. Didalamnya termasuk estimasi sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial yang merupakan dasar bagi pengambilan kebijakan anggaran. Tujuan utamanya adalah perencanaan anggaran berbasis kinerja melalui pengalokasian belanja yang efektif dan efisien.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rumusan Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Kuningan Tahun 2025 memuat penjelasan capaian ekonomi tahun 2024 dan target capaian pada akhir tahun 2025, antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam perekonomian. Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Kuningan tersebut memperhatikan kebijakan pembangunan nasional dan regional provinsi Jawa Barat dan memperhatikan kinerja keuangan Kabupaten Kuningan per triwulan I tahun 2025.

Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 difokuskan pada peningkatan produksi dan diversifikasi produk pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan; pengembangan ketahanan pangan berkelanjutan; peningkatan daya saing produk industri dan perdagangan; peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal; perluasan kesempatan kerja; serta peningkatan daya saing pariwisata.

Adapun Kerangka Ekonomi Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berikut beberapa poin penting terkait kerangka ekonomi tersebut:

a) Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Jawa Barat pada triwulan I-2025 mengalami pertumbuhan sebesar 4,98 persen dibandingkan triwulan I-2024 yang hanya sebesar 4,93 persen. Pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan adanya peningkatan ekonomi yang positif dan stabil.

b) Sektor Unggulan

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi sebesar 31,89 persen pada triwulan I-2025. Sektor ini menjadi prioritas pemerintah Jawa Barat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

c) Kebijakan Ekonomi

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengacu pada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam menyusun kebijakan ekonomi dan keuangan daerah. Kebijakan ekonomi ini dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah.

d) Program-Program Pembangunan

Pemerintah Jawa Barat memiliki beberapa program pembangunan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti:

- Program peningkatan infrastruktur;
- Program pengembangan sektor pertanian dan perikanan;
- Program peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- Program pengembangan industri dan pariwisata;
- Peningkatan Daya Saing Pariwisata;
- Pembangunan Infrastruktur;
- Pemerataan Pembangunan;
- Pengembangan Ketahanan Pangan;
- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

- Peningkatan Inovasi dan Kualitas Penanaman Modal;
- Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Digital.

Arah kebijakan ekonomi nasional di tahun 2025 adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan kualitas belanja negara dan optimalisasi pendapatan negara. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung pembangunan menuju Indonesia Maju dan mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Lebih lanjut, arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2025 difokuskan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan fokus pada efisiensi belanja negara, optimalisasi pendapatan, peningkatan modal manusia dan ketahanan pangan, serta pembiayaan anggaran yang mendukung transformasi ekonomi.

Selaras dengan arah kebijakan ekonomi nasional dan provinsi, Kabupaten Kuningan merumuskan arah kebijakan ekonomi selaras dengan nilai dan prinsip dasar pembangunan yang menjadi komitmen daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029, yakni:

- a. Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan jaminan sosial untuk semua;
- b. Penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi unggulan dan peningkatan kompetensi SDM masyarakat;
- c. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efisien, adaptif, berintegritas, inovatif, responsif dan transparan;
- d. Penyelenggaraan transformasi tata kelola pemerintahan untuk penguatan ideologi, politik, integritas dan kondusifitas daerah;
- e. Peningkatan pemahaman nilai-nilai budaya dan wawasan lingkungan;
- f. Peningkatan pemerataan pembangunan wilayah yang berkeadilan;
- g. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas dan merata;

- h. Penguatan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.

Arah kebijakan difokuskan pada penguatan tata kelola yang efektif dan akuntabel, peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan teknologi, serta percepatan inovasi yang berkelanjutan. Di samping itu, pendekatan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi prinsip dasar dalam pelaksanaan kebijakan guna memastikan terciptanya sinergi dan efisiensi dalam mencapai target-target strategis.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 - 2024

A. Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto

Indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah laju pertumbuhan PDRB. Indikator tersebut menggambarkan laju pertumbuhan produk dari seluruh kegiatan ekonomi pada suatu kawasan berdasarkan harga konstan yang telah ditetapkan. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kuningan Tahun 2024 mengalami kenaikan angka persentase sebesar 0,36 menjadi 5,61 persen dari tahun sebelumnya sebesar 5,25 persen. Jika dilihat berdasarkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Kuningan Tahun 2024 mencapai 35.535,77 miliar rupiah. Nilai per sektor dalam PDRB ADHB Tahun 2024 hampir seluruhnya mengalami kenaikan di seluruh sektornya.

Tabel 3.1 Nilai Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

No.	Sektor	2020	2021	2022	2023*	2024**
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.302,21	6.435,08	7.026,81	7.723,37	8.253,92
2.	Pertambangan dan Penggalian	312,73	369,59	375,77	407,76	419,64
3.	Industri Pengolahan	577,69	610,72	663,71	719,05	805,34
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	22,38	25,49	27,32	28,79	27,63
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	26,32	28,56	30,01	31,11	36,69
6.	Konstruksi	2.090,20	2.342,69	2.533,80	2.750,90	2.868,04
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi	3.586,95	3.785,58	4.106,71	4.424,73	4.773,35
8.	Transportasi dan Pergudangan	3.591,64	3.673,81	4.353,13	5.194,09	6.276,13
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	466,23	484,72	568,47	641,89	692,77

No.	Sektor	2020	2021	2022	2023*	2024**
10.	Informasi dan Komunikasi	1.094,15	1.154,70	1.211,23	1.306,64	1.483,02
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.414,09	1.557,61	1.667,16	1.789,77	1.913,27
12.	Real Estate	655,42	732,08	798,74	865,88	913,01
13.	Jasa Perusahaan	112,74	123,82	145,33	161,89	156,32
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	940,97	932,41	919,34	958,83	1.045,25
15.	Jasa Pendidikan	3.182,13	3.374,44	3.638,16	3.924,13	4.127,25
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	401,02	440,21	473,30	514,21	521,23
17.	Jasa Lainnya	842,00	847,60	980,84	1.101,86	1.223,00
PDRB		25.618,87	26.919,10	29.519,83	32.544,89	35.535,77

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2018-2025
 *): Angka Sementara **): Angka Sangat Sementara

Sementara untuk nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (AHDK) Kabupaten Kuningan Tahun 2024 mencapai 20.507,27 miliar rupiah. Sebagian besar nilai per sektor dalam PDRB ADHK Tahun 2024 mengalami kenaikan, seperti yang tercantum dalam tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Nilai Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

No.	Sektor	2020	2021	2022	2023*	2024**
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.591,62	3.675,49	3.812,90	3.894,39	3.644,68
2.	Pertambangan dan Penggalian	217,43	245,14	243,51	245,97	262,35
3.	Industri Pengolahan	416,25	430,15	453,98	475,00	502,71
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	14,79	16,77	17,36	17,90	19,20
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	16,32	17,36	17,85	18,36	20,81
6.	Konstruksi	1.433,51	1.534,20	1.579,41	1.659,77	1.709,76
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi	2.655,96	2.751,05	2.862,89	2.982,16	2.991,73
8.	Transportasi dan Pergudangan	2.287,91	2.293,42	2.580,10	2.837,97	3.403,93
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	307,84	310,70	349,94	374,25	395,07
10.	Informasi dan Komunikasi	1.142,56	1.223,60	1.304,80	1.402,17	1.655,75
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	859,97	903,64	894,50	936,16	974,68
12.	Real Estate	554,89	618,42	653,07	695,21	770,49
13.	Jasa Perusahaan	75,83	82,81	92,48	98,86	91,96
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	540,31	531,67	525,34	538,67	566,57
15.	Jasa Pendidikan	1.843,53	1.896,95	2.020,36	2.130,30	2.280,56
PDRB		16.882,76	17.483,02	18.450,34	19.418,73	20.507,27

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2025
 *): Angka Sementara, **): Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel 3.3, menunjukkan bahwa sektor utama perekonomian Kabupaten Kuningan masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (23,23%); Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi (13,43%); dan Sektor Perdagangan Besar dan Jasa Pendidikan (11,61%).

Tabel 3. 3 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kuningan Tahun 2020 – 2024 (%)

No.	Sektor	2020	2021	2022	2023*	2024**
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,60	23,91	23,80	23,73	23,23
2.	Pertambangan dan Penggalian	1,22	1,37	1,27	1,25	1,18
3.	Industri Pengolahan	2,25	2,27	2,25	2,21	2,27
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,11	0,10	0,10	0,10
6.	Konstruksi	8,16	8,70	8,58	8,45	8,07
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi	14,00	14,06	13,91	13,60	13,43
8.	Transportasi dan Pergudangan	14,02	13,65	14,75	15,96	1,66
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,82	1,80	1,93	1,97	1,95
10.	Informasi dan Komunikasi	4,27	4,29	4,10	4,01	4,17
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,52	5,79	5,65	5,50	5,38
12.	Real Estate	2,56	2,72	2,71	2,66	2,57
13.	Jasa Perusahaan	0,44	0,46	0,49	0,50	0,44
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	3,67	3,46	3,11	2,95	2,94
15.	Jasa Pendidikan	12,42	12,54	12,32	12,06	11,61
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,57	1,64	1,60	1,58	1,47
17.	Jasa Lainnya	3,29	3,15	3,32	3,39	3,44
PDRB		100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2025

*) : Angka Sementara, **) : Angka Sangat Sementara

Berdasarkan nilai ADHK, laju pertumbuhan sektor tertinggi berada pada sektor Transportasi dan Pergudangan dengan nilai laju mencapai 19,94 persen, angka ini menunjukkan kenaikan dari Tahun 2023 (9,99 persen), sedangkan sektor yang mengalami perlambatan

terbesar laju pertumbuhannya yaitu pada sektor Jasa Perusahaan yakni sebesar -6,98 persen (Tabel 3.4).

Tabel 3. 4 Laju Pertumbuhan Sektor pada PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020–2024 (%)

No.	Sektor	2020	2021	2022	2023*	2024**
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,44	2,34	3,74	2,14	-6,41
2.	Pertambangan dan Penggalian	-2,70	12,74	-0,66	1,01	6,66
3.	Industri Pengolahan	1,08	3,34	5,54	4,63	5,83
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	-1,99	13,34	3,56	3,07	7,30
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,85	6,39	2,79	2,87	13,36
6.	Konstruksi	-7,15	7,02	2,95	5,09	3,01
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi	-3,00	3,58	4,07	4,17	0,32
8.	Transportasi dan Pergudangan	-1,51	0,24	12,50	9,99	19,94
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-3,82	1,10	12,44	6,95	5,56
10.	Informasi dan Komunikasi	24,27	7,09	6,64	7,46	18,08
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,47	5,08	-1,01	4,66	4,11
12.	Real Estate	0,34	11,45	5,60	6,45	10,83
13.	Jasa Perusahaan	-2,83	9,21	11,68	6,89	-6,98
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	-3,79	-1,60	-1,19	2,54	5,18
15.	Jasa Pendidikan	1,69	2,90	6,51	5,44	7,05
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-3,26	7,52	6,00	4,97	6,40
17.	Jasa Lainnya	-2,83	0,89	11,20	7,51	10,91
PDRB		0,11	3,56	5,53	5,25	5,61

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2025

*) : Angka Sementara, **) : Angka Sangat Sementara

Sebagai acuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk yaitu dilakukan melalui perhitungan PDRB perkapita. Semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah, maka semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun ukuran ini masih mengabaikan faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per-kepala atau persatu orang penduduk.

PDRB per-kapita juga digunakan sebagai ukuran “produktivitas” suatu wilayah karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi yang dicirikan dengan PDRB perkapita berdasarkan PDRB ADHK di Kabupaten Kuningan pada Tahun 2024 sebesar 16,89 juta, sejak tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan pendapatan perkapita sebagai bentuk pemulihan kondisi ekonomi. Peningkatan dalam PDRB Perkapita belum sepenuhnya menggambarkan peningkatan daya beli masyarakat, karena masih harus mempertimbangkan inflasi dan pola distribusi pendapatan regional yang ada di Kabupaten Kuningan.

B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Ketenagakerjaan

Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur ketenagakerjaan, antara lain, yaitu melalui: a) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK); b) Tingkat Pengangguran Terbuka; dan c) Angka Beban Ketergantungan. TPAK adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja. TPAK ini merupakan indikator untuk melihat keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi. Pada Tahun 2024 tercatat TPAK penduduk Kabupaten Kuningan mencapai 65,84 persen. Pada Tahun 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka berada pada angka 7,78 persen, mengalami penurunan sebesar 0,71 persen bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2023 yang berada pada angka 8,49 persen. Penurunan jumlah pengangguran terbuka sejalan dengan mulai pulihnya sektor ekonomi produktif yang dapat menyediakan lapangan kerja bagi Angkatan kerja produktif di Kabupaten Kuningan.

Menurut BPS Kabupaten Kuningan pada Tahun 2024, dari 938.846 jiwa penduduk usia kerja, 618.129 jiwa diantaranya merupakan angkatan kerja (terdiri dari yang bekerja dan pengangguran) dan 320.717 jiwa bukan angkatan kerja (terdiri dari penduduk yang sekolah, mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, dsb).

Tabel 3. 5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Kuningan Tahun 2020 - 2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024*
Penduduk Usia 15 Tahun ke atas	936.247	987.056	920.304	926.786	938.846
Angkatan Kerja	521.677	542.782	530.825	574.169	618.129
- Bekerja	463.164	479.405	478.750	519.658	570.023
- Pengangguran Terbuka	58.513	63.377	52.075	54.511	48.106
Bukan Angkatan Kerja	320.072	307.770	328.136	352.617	320.717
- Sekolah	55.411	53.583	58.196	73.855	66.284
- Mengurus Rumah Tangga	205.229	193.093	216.398	239.617	209.637
- Lainnya	59.432	61.094	53.542	39.145	44.796
TPAK (%)	61,98	63,82	61,80	61,95	65,84
TPT (%)	11,22	11,68	9,81	8,49	7,78

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2025

Disusun berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, pada tahun 2023, presentase penduduk yang bekerja terbanyak berasal dari lulusan kurang sampai dengan SD 45,44 persen) dan terendahnya bahkan yang berasal Perguruan Tinggi (9,74 persen).

Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan salah satu indikator demografi untuk melihat tingkat beban ekonomi individu dan rumah tangga. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 3. 6 Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2024

Tahun	Angka Beban Ketergantungan
2020	46,31
2021	46,40
2022	46,55
2023	46,32

Tahun	Angka Beban Ketergantungan
2024	46,46

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuningan, 2024

Selama periode 2020-2024 angka beban ketergantungan cenderung mengalami kenaikan yang mengindikasikan program pembangunan belum mampu meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat khususnya pada penduduk usia non produktif sehingga beban tanggungan kelompok usia produktif menjadi meningkat. Pada tahun 2020, ABT tercatat sebesar 46,31, kemudian meningkat sedikit menjadi 46,40 di tahun 2021, dan mencapai puncaknya di 46,55 pada tahun 2022. Namun, di tahun 2023, angka ini menurun menjadi 46,32, sebelum kembali mengalami sedikit kenaikan menjadi 46,46 di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sejak tahun 2020 jumlah usia produktif di Kabupaten Kuningan lebih banyak dari pada usia tidak produktif.

2. Kemiskinan

Persentase penduduk di atas garis kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula $(100 - \text{angka kemiskinan})$. Angka kemiskinan adalah perbandingan antara persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran perkapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan nonpangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Garis kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran perkapita perbulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan nonmakanan yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak. Sedangkan indikator persentase penduduk di atas garis kemiskinan adalah indikator yang menggambarkan rasio penduduk yang hidup berkecukupan dan yang tidak menurut standar tertentu yang berlaku secara nasional.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kuningan Tahun 2024 mengalami penurunan 0,24% yaitu menjadi 11,88%. Jika dilihat dari jumlah penduduk miskin pun berkurang sekitar 2 ribu orang dengan garis kemiskinan naik Rp18.100,- perkapita perbulan

Tabel 3. 7 Angka Kemiskinan Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Angka Kemiskinan				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	139,20	143,35	140,25	133,88	131,83
2	Garis Kemiskinan (Rupiah/kapita/bulan)	352.358	358.069	371.665	402.767	420.867
3	Persentase Penduduk Miskin (%)	12,82	13,10	12,76	12,12	11,88

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2025

*) : Angka Sementara, **) : Angka Sangat Sementara

3. Gini Rasio

Gini Ratio adalah salah satu alat untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk. Nilai rasio gini berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Koefisien gini bernilai 0 menunjukkan pemerataan pendapatan yang sempurna. Sebaliknya, rasio gini yang bernilai 1 mengindikasikan adanya pemerataan pendapatan yang tidak sempurna.

Gini Rasio di Kabupaten Kuningan relatif rendah ($GR < 0,4$) Namun angka Gini Rasio mengalami kenaikan di tahun 2024 menjadi 0,379, hal tersebut mengindikasikan terjadi kenaikan ketimpangan atau ketidakmerataan pengeluaran antar penduduk.

Tabel 3. 8 Angka Kemiskinan Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Gini Ratio	0,361	0,349	0,345	0,351	0,379

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2025

*) : Angka Belum dikeluarkan oleh BPS

4. Inflasi

Berdasarkan data dari BPS, tingkat inflasi Kota Cirebon sepanjang tahun 2024 tercatat sebesar 0,09 persen, dan hal tersebut jauh lebih rendah dibanding rata-rata inflasi Provinsi Jawa Barat

(1,64 persen). Angka ini menunjukkan bahwa selama tahun 2024 terjadi kenaikan harga secara umum yang relatif rendah. Data ini mengacu pada hasil Survei Harga Konsumen (SHK) dan digunakan juga sebagai acuan oleh Kabupaten Kuningan.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2025

Prospek perekonomian Kabupaten Kuningan, tidak terlepas dari tantangan dan prospek pada tataran lingkungan sekitarnya baik itu secara global, nasional maupun perkembangan perekonomian regional Provinsi Jawa Barat serta perekonomian Kabupaten Kuningan sendiri. Tahun 2025 dan 2026, target pencapaian pembangunan ekonomi daerah diproyeksikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 8 Target Kinerja Indikator Makro Pembangunan Ekonomi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	71,09	71,43	72,00
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	11,70	10,42-11,5	10,72
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,04	6,15-6,7	6,76
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,81	02,58-7.03	5,99
5	Rasio Gini	Poin	0,336	0,347-0,36	0,339
6	PDRB Perkapita (Rp. Juta)	Juta Rupiah	18,90	28,95	33,71
7	Kontribusi PDRB Kab. Kuningan	Persen	n/a	1,25	1,26

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2025

A. Tantangan serta Prospek Perekonomian Global dan Nasional

Kondisi ekonomi Indonesia di tahun 2025 diproyeksikan tetap solid, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen dan inflasi yang terkendali. Proyeksi ini didukung oleh pertumbuhan spasial yang relatif baik, inflasi yang rendah, dan permintaan domestik yang kuat. Namun, ada juga tantangan seperti fluktuasi harga komoditas global dan ketidakpastian geopolitik yang perlu diwaspadai.

Sebagai perekonomian terbuka, ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global melalui jalur keuangan dan jalur perdagangan. Perkembangan ekonomi di negara-negara utama seperti Amerika Serikat (AS), Tiongkok, Jepang dan Zona Eropa, perlu terus dimonitor dan diantisipasi dampaknya. Dampak pandemi Covid-19

yang belum sepenuhnya hilang, tingkat suku bunga global yang masih bertahan di level tinggi, serta eskalasi konflik geopolitik yang mengakibatkan fragmentasi ekonomi, telah meningkatkan ketidakpastian ekonomi global hingga awal tahun 2024. Hal ini juga memengaruhi *outlook* perekonomian domestik ke depan yang diperkirakan masih lemah dengan ketidakpastian yang meningkat. Faktor perubahan iklim yang tercermin dari meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana akibat iklim menambah eksposur risiko perekonomian. Di sisi lain, perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*), *ageing population* di negara-negara maju, serta tren transisi ekonomi hijau tidak hanya memberikan peluang sumber-sumber pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia di masa depan, melainkan juga mengandung tantangan dalam mengelola potensi disruptif yang menyertainya.

Ketidakpastian pasar keuangan global tetap tinggi di tengah prospek perekonomian dunia yang masih kuat. Ekonomi global pada 2025 diproyeksikan tumbuh sebesar 3,2 persen dimana proyeksi ini di bawah rata-rata historis pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2000 – 2019 sebesar 3,7 persen. Perkembangan proyeksi ekonomi tersebut ditopang oleh kinerja ekonomi Amerika Serikat yang tetap kuat. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat tetap baik ditopang oleh konsumsi yang kuat didukung akselerasi investasi dan peningkatan upah riil tenaga kerja di tengah kebijakan moneter yang tidak terlalu ketat serta arah kebijakan fiskal yang lebih ekspansif. Sementara, pertumbuhan ekonomi Eropa masih lemah dipengaruhi permintaan domestik yang belum kuat serta kinerja eksternal yang menurun dampak dari implementasi kenaikan tarif impor Amerika Serikat. Ketegangan geopolitik yang membebani sentimen konsumen serta ketidakpastian politik dan kebijakan yang meningkat dapat menghambat perekonomian tumbuh lebih tinggi. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi negara berkembang diperkirakan melambat pada 2025 sebesar 4,0 persen disebabkan oleh perkembangan

ekonomi Tiongkok yang masih lemah. Hal ini merupakan dampak dari ketidakpastian kebijakan perdagangan dan pasar properti yang masih lemah. Namun demikian, stimulus fiskal yang diberikan oleh pemerintah dapat menahan perlambatan yang lebih dalam.

Fragmentasi geoekonomi dan peningkatan proteksionisme dapat menekan laju perdagangan dan investasi global, serta berpotensi menghambat progress pengendalian inflasi global. Sementara itu, tantangan juga muncul dari perubahan iklim, perkembangan pesat kecerdasan buatan (AI/digitalisasi), serta penuaan populasi di negara-negara maju (*ageing population*).

Di tengah kondisi ekonomi global yang relatif stagnan, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih banyak mengandalkan permintaan domestik. Pemerintah akan menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, dan dukungan program bansos serta subsidi. Pemerintah akan terus mengupayakan peningkatan produk bernilai tambah yang berorientasi ekspor, serta memberikan insentif fiskal yang kompetitif. Bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan dimaksimalkan untuk mencapai target pertumbuhan.

Kebijakan Ekonomi tahun 2025 diprioritaskan untuk:

- 1) Menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah. Pemerintah memfokuskan pada akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
- 2) Mendukung Visi Indonesia Emas 2045: Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025 menjadi dasar kebijakan fiskal di tahun dasar Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045.
- 3) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Pemerintah bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Strategi yang diterapkan dalam Kerangka Ekonomi Nasional Indonesia Tahun 2025 adalah:

- 1) Penguatan Ekonomi Nasional: Pemerintah berupaya memperkuat ekonomi nasional melalui berbagai kebijakan fiskal.
- 2) Peningkatan Investasi: Pemerintah berupaya meningkatkan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 3) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Kebijakan yang akan dilakukan yaitu: (i) kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dalam memitigasi gejolak global, (ii) koordinasi kebijakan moneter dan fiskal, (iii) upaya mendorong pembiayaan ekonomi melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM), (iv) dukungan dalam mengakselerasi transformasi digital Pemerintah, (v) upaya memperkuat hilirisasi dan ketahanan pangan, (vi) dukungan dalam mendorong pengembangan ekonomi hijau, syariah, dan inklusi, serta (vii) dukungan dalam pembangunan sumber daya manusia.

B. Tantangan serta Prospek Perekonomian Regional Jawa Barat

Tantangan ekonomi Jawa Barat bersumber dari belum meratanya investasi yang masuk ke Jawa Barat, karena masih terkonsentrasi di Jawa Barat bagian utara. Kemudian mayoritas kabupaten/kota di Jawa Barat terkategori memiliki kapasitas fiskal yang rendah, dimana porsi realisasi belanja yang bersifat produktif masih rendah, sehingga perlu kerangka kebijakan untuk mendorong produktivitas kabupaten/kota.

Tekanan inflasi di negara maju yang masih berlanjut, dan kebijakan moneter ketat diproyeksikan akan membebani aktivitas ekonomi di beberapa negara mitra dagang Jawa Barat, sehingga akan menurunkan permintaan luar negeri atas produk Industri manufaktur, sebagaimana diketahui bahwa industri manufaktur adalah penyumbang terbesar PDRB Jawa Barat.

Perubahan iklim juga ikut andil dalam yang membuat sulitnya memprediksi cuaca ekstrem di beberapa wilayah Jawa Barat, sehingga menjadi penyebab utama inflasi pada komoditas pangan. Perubahan iklim juga menjadi tantangan bagi sektor pertanian sebagai salah satu penyumbang PDRB Jawa Barat dan penyerapan tenaga kerja.

Tantangan perekonomian Jawa Barat pada tahun 2025 meliputi:

- a. Memelihara stabilitas kinerja perekonomian di tengah ketidakpastian perekonomian global;
- b. Akselerasi produktivitas sektor kunci PDRB Jawa Barat melalui percepatan realisasi investasi;
- c. Optimalisasi ekonomi digital dan industri yang berbasis *high tech*;
- d. Penguatan konektivitas dan inklusivitas ekonomi Jawa Barat, diversifikasi ekonomi khususnya UMKM, IKM serta pariwisata;
- e. Pencapaian kemandirian pangan berkelanjutan di tengah perubahan iklim; dan
- f. Tenaga kerja yang terampil sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar tenaga kerja.

C. Tantangan serta Prospek Perekonomian Kabupaten Kuningan Perkembangan Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Kuningan pada Tahun 2023 menunjukkan adanya penurunan sebesar 0,28 atau menjadi 5,25 persen. Jika dibandingkan dengan target LPE Tahun 2024 masih kekurangan 0,56 poin atau LPE mencapai 5,81 persen. Sedangkan untuk aspek ketenagakerjaan pada tahun 2023 ditunjukkan dari nilai TPT 8,49 persen menunjukkan tren positif dari tahun 2022 (9,81persen) dan angka tersebut lebih kecil dibandingkan target TPT Tahun 2024 sebesar 9,04-11,21.

Meski tidak memiliki data inflasi resmi sendiri, Kabupaten Kuningan menggunakan data Kota Cirebon sebagai acuan proksi karena kedekatan geografis dan karakter ekonomi yang serupa. Informasi mengenai ringkasan perkembangan inflasi di Kota Cirebon

dapat diuraikan sebagai berikut: Inflasi tahun ke tahun (YoY) meningkat secara bertahap: dari 0,24 persen di Bulan Maret, menjadi 0,98 persen di Bulan Mei, dan mencapai 1,79 persen di Bulan Juni 2025. Indeks Harga Konsumen (IHK) mencerminkan tren kenaikan dari sekitar 105,64 di Bulan Maret hingga 106,75 di Bulan Juni 2025; Inflasi kumulatif (Year-to-Date/YTD) berada pada kisaran 1,43 persen pada akhir Bulan Juni 2025. Hal ini menunjukkan inflasi selama enam bulan pertama menunjukkan tren kenaikan moderat dan masih dalam batas terkendali, Kondisi tersebut menunjukkan stabilitas harga yang relatif terjaga pada semester I 2025, meskipun ada tekanan dari beberapa sektor tertentu. Keadaan ini dapat dijadikan acuan proksi untuk Kabupaten Kuningan dalam menyusun kebijakan anggaran dan perencanaan RKPD, khususnya dalam perencanaan program sosial, kesehatan, dan penanganan inflasi pangan.

Terkait investasi di Kabupaten Kuningan periode Januari-Juni 2025 data dijelaskan pada semester I 2025, realisasi investasi Kabupaten Kuningan diperkirakan telah mencapai Rp 700 miliar lebih, investasi lebih difokuskan ke sektor pertanian dan pariwisata sejalan dengan upaya perbaikan regulasi (RTRW) untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Tingkat investasi sangat berkaitan erat dengan pengurangan pengangguran di suatu daerah. Jumlah pengangguran di Kabupaten Kuningan akan cepat berkurang apabila banyak investasi yang masuk, khususnya jenis investasi yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak. Sebagai gambaran awal, realisasi penyerapan tenaga kerja oleh pasar kerja untuk Tahun 2025 sampai bulan Juni adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 9 Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja per Juni 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi per Juni 2025	Sisa Target	Keterangan
Meningkatnya investasi, kerjasama yang baik antar daerah	Persentase pencari kerja yang ditempatkan dan	70 %	73,34 %	+ 3,34 %	Berdasar data Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Semester I : Jumlah pencaker

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi per Juni 2025	Sisa Target	Keterangan
dalam skala regional dan tenaga kerja yang ditempatkan	diberdayakan				(6.823 orang), dengan penempatan sebanyak 5.004 orang. Namun capaian indikator berdasarkan data tahunan, jadi persentase ini bersifat sementara.

Tabel 3. 10 Target Indikator Kinerja Kabupaten Kuningan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,18 - 5,71
Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota	Persen	1,230
Tingkat Inflasi	Persen	3,3 - 3,9
Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	2,220
Rasio PDRB Sektor Perdagangan	Persen	4,840
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	2,03
Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan	Persen	24,49
Rasio PDRB Sektor Transportasi dan Pergudangan	Persen	14,43-18,13
Indeks Ekonomi Hijau pada Pilar Ekonomi	Poin	64,98
Indeks Daya Saing Daerah	Persen	3,51
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,32-9,05
Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	Persen	24,4
Indeks Gini	Poin	0,340 - 0,347

Sumber: RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029

Pilihan strategi tidak dapat dilepaskan dari nilai dan prinsip dasar pembangunan yang menjadi komitmen daerah, antara lain:

1. Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan jaminan sosial untuk semua;
2. Penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi unggulan dan peningkatan kompetensi SDM masyarakat;
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efisien, adaptif, berintegritas, inovatif, responsif dan transparan;
4. Penyelenggaraan transformasi tata kelola pemerintahan untuk penguatan ideologi, politik, integritas dan kondusifitas daerah;

5. Peningkatan pemahaman nilai-nilai budaya dan wawasan lingkungan;
6. Peningkatan pemerataan pembangunan wilayah yang berkeadilan;
7. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas dan merata;
8. Penguatan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.

Berdasarkan nilai dan prinsip tersebut, maka strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kuningan Tahun 2025 adalah Meningkatkan Produktivitas dan Inovasi Pertanian, Pariwisata, dan SDM.

D. Prakiraan Perekonomian Kedepan

Diperkirakan pada Tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuningan berada pada kisaran 5,18 - 5,71 persen relatif lebih tinggi daripada perkiraan pertumbuhan pada Tahun 2024. Pertumbuhan tersebut diperkirakan meningkat seiring dengan adanya kenaikan produktifitas sektor UMK dan intervensi sosial melalui anggaran bansos oleh Pemerintah. Dari sisi lapangan usaha, kinerja sektor utama meningkat sejalan dengan potensi perbaikan kondisi ekonomi lokal dan regional. Di dalam kinerja sektor pertanian diperkirakan lebih baik dibandingkan 2024 karena kondisi cuaca yang lebih mendukung. Dengan demikian, daya beli masyarakat pun cenderung terjaga.

Sementara itu, menjelang semester kedua 2025, Kota Cirebon yang dijadikan acuan Kabupaten Kuningan diproyeksikan berada pada tren inflasi moderat dibawah atau setara dengan nasional. Tekanan lokal utama berasal dari kenaikan harga komoditas pangan dan layanan kesehatan. Namun, sinergi TPID/BI serta upaya pengendalian lewat operasi pasar diharapkan menjaga inflasi tetap stabil. Proyeksi akhir tahun menempatkan Cirebon pada inflasi tahunan sekitar 1,8–2,2 persen, masih dalam batas aman target 2,5 persen \pm 1 persen nasional.

Analisis SWOT untuk tantangan perekonomian Kabupaten Kuningan tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3. 11 Analisis SWOT Ekonomi Kabupaten Kuningan

Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
<ul style="list-style-type: none"> - Kepemilikan potensi sumberdaya pertanian sebagai sektor dominan perekonomian. - Kekayaan destinasi pariwisata alami sebagai sektor unggulan yang dikembangkan untuk sumber pendapatan daerah. - Ketersediaan SDM yang sebagian besar adalah usia produktif. - Keberadaan IKM berbahan baku produk pertanian. - Stabilitas makro ekonomi daerah yang terjaga 	<ul style="list-style-type: none"> - Sektor Pertanian sebagai sektor dominan mengalami penurunan. - Ketersediaan SDM yang terbatas dan kualitas SDM di bidang pertanian dan pariwisata yang masih rendah. - Terbatasnya sarana prasarana pertanian dan pariwisata. - Rendahnya pengembangan produk, destinasi dan daya tarik wisata. - Inovasi dan kualitas produk masih rendah dan sebagian bahan baku produksi masih tergantung pada daerah lain - Pertumbuhan ekonomi disertai meningkatnya ketimpangan pendapatan dan wilayah. - Pertumbuhan ekonomi belum berdampak pada penurunan pengangguran dan kemiskinan secara signifikan - Keterbatasan wirausahawan lokal sebagai penggerak ekonomi daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki topografi yang indah dan tanah yang subur sehingga dapat mendukung aktivitas di sektor pertanian dan pariwisata. - Peluang pasar dalam negeri dan luar negeri produk pertanian Kuningan terus berkembang. - Stabilitas ekonomi regional, global dan nasional. - Infrastruktur (Tol Cipali, Cisumdawu dan BIJB) yang telah mempercepat jarak tempuh wisatawan dalam dan luar negeri masuk ke wilayah Kabupaten Kuningan. - Adanya tematik sektoral dan kewilayahan. - Adanya arah pengelolaan metropolitan Cirebon Raya dan Pusat Pertumbuhan Wilayah Cirebon. - Masuknya Kuningan sebagai bagian dari pengembangan Kawasan metropolitan REBANA 	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi bencana akibat aktivitas gunung berapi (Gunung Ciremai) yang bisa terjadi kapan saja dapat mengganggu aktivitas perekonomian - Daya saing ekonomi Kabupaten tetangga yang meningkat. - Persaingan produk serupa yang semakin tinggi. - Masuknya produk impor yang lebih bersaing dari produk lokal. - Infrastruktur dan sarana prasarana ekonomi yang lebih baik di daerah tetangga yang lebih menarik investor dari luar untuk masuk.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Faktor kemampuan keuangan daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan merupakan faktor yang penting, ditunjang kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat untuk menjamin pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah pengelolaan aset daerah karena menjadi sangat penting dalam menunjang penerimaan daerah.

Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD antara lain pendanaan melalui APBN, PHLN, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Berdasarkan laporan yang diterima, kontribusi CSR di Kabupaten Kuningan pada Tahun 2019 mencapai Rp3.266.707.632,00 yang dilaksanakan oleh perusahaan untuk:

- Bidang pendidikan, berupa pemberian beasiswa pendidikan untuk mahasiswa dan kegiatan perbaikan sarana prasarana sekolah;
- Bidang lingkungan, berupa sumbangan perbaikan jalan lingkungan masyarakat, perbaikan saluran air, serta program penghijauan atau penanaman pohon;
- Bidang ekonomi, berupa pemberian bantuan untuk UMKM;
- Bidang kebencanaan, berupa penyuluhan siap siaga bencana;
- Bidang sosial dan keagamaan, berupa program pembinaan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) bagi penduduk miskin, bantuan air bersih, pembagian zakat kepada masyarakat miskin yatim dan dhuafa, dan pemberian bahan makanan untuk santri dan siswa Sekolah Dasar;

- Bidang kesehatan, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan posyandu, serta program-program penyediaan jasa pelayanan kesehatan untuk masyarakat;
- Bidang lainnya, bantuan untuk program pengembangan Kampung Ramah Anak dalam rangka mendukung peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di Kabupaten Kuningan.

Pada Tahun 2020 dana CSR di Kabupaten Kuningan mengalami penurunan, hanya sebesar Rp1.575.193.945,00. Hal ini ditunjukkan oleh berkurangnya jumlah perusahaan yang melaporkan program dan kegiatan CSR. Dana CSR tersebut oleh perusahaan dilaksanakan untuk kegiatan:

- Bidang pendidikan, berupa pemberian beasiswa pendidikan untuk mahasiswa;
- Bidang lingkungan, berupa sumbangan perbaikan jalan lingkungan masyarakat, perbaikan saluran air, serta program penghijauan atau penanaman pohon;
- Bidang kebencanaan, berupa penyuluhan siap siaga bencana;
- Bidang sosial dan keagamaan, berupa kegiatan bantuan sosial bagi masyarakat miskin, program pembinaan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), membantu pasien tidak mampu dan orang terlantar, anak yatim di berbagai yayasan panti, gerakan wakaf Al-Qur'an, dan sumbangan sosial keagamaan lainnya, mendukung kegiatan pengadaan dan perbaikan sarana prasarana umum seperti rehabilitasi jalan, pembangunan masjid, dan pengadaan perlengkapan olahraga;
- Bidang kesehatan, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan posyandu, program-program penyediaan jasa pelayanan kesehatan, dan upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19;
- Bidang ekonomi, membantu pengembangan sektor pertanian, pariwisata, peternakan, dan UMKM.

Berdasarkan laporan sementara, dana CSR Kabupaten Kuningan Tahun 2022 mencapai sebesar Rp2.011.080.900,00 yang telah dilaksanakan oleh perusahaan untuk:

- Bidang pendidikan, pemberian berupa perlengkapan sekolah dan buku bacaan;
- Bidang lingkungan, berupa sumbangan perbaikan jalan lingkungan masyarakat, perbaikan saluran air, serta program penghijauan atau penanaman pohon;
- Bidang ekonomi, berupa pembinaan, pendampingan dan pemberian bantuan untuk Usaha Mikro Kecil;
- Bidang sosial dan keagamaan, berupa bantuan program bakti sosial berupa pengobatan gratis, khitanan massal, donor darah, santunan anak yatim, santunan kepada lansia, santunan kepada penderita stunting, pemberian makanan tambahan gizi ke balita dan ibu hamil;
- Bidang kesehatan, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan posyandu, serta program-program penyediaan jasa pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan mengadakan sosialisasi kesehatan ibu menyusui dan ibu hamil;
- Bidang lainnya, bantuan untuk program pengembangan Kampung Ramah Anak dalam rangka mendukung peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di Kabupaten Kuningan.

Grafik di atas terjadi peningkatan realisasi CSR Kabupaten Kuningan pada tahun 2022 dari tahun sebelumnya sebesar Rp392.294.740 menjadi Rp1.015.946.190, namun pada Tahun 2023 terjadi penurunan realisasi pendanaan melalui CSR. Hal ini disebabkan karena banyak perusahaan tidak melaporkan kegiatan CSR nya pada tahun 2023. Kegiatan CSR tersebut dilakukan diberbagai sektor yang mendukung pencapaian target dan tujuan Kabupaten Kuningan. Berikut ini sektor dan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan melalui dana CSR:

- Bidang pendidikan, berupa pemberian beasiswa pendidikan untuk mahasiswa dan kegiatan perbaikan sarana prasarana sekolah.
- Bidang lingkungan, berupa sumbangan perbaikan jalan lingkungan masyarakat, perbaikan saluran air, serta program penghijauan atau penanaman pohon.
- Bidang ekonomi, berupa pemberian bantuan untuk UMKM.
- Bidang kebencanaan, berupa penyuluhan siap siaga bencana.
- Bidang sosial dan keagamaan, berupa program pembinaan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) bagi penduduk miskin, bantuan air bersih, pembagian zakat kepada masyarakat miskin yatim dan dhuafa, dan pemberian bahan makanan untuk santri dan siswa Sekolah Dasar.
- Bidang lainnya, bantuan untuk program pengembangan Kampung Ramah Anak dalam rangka mendukung peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di Kabupaten Kuningan.

Berdasarkan laporan sementara, dana CSR Kabupaten Kuningan Tahun 2024 mencapai sebesar Rp5.130.065.362,00 yang telah dilaksanakan oleh perusahaan untuk:

- Bidang Pendidikan, berupa kegiatan *Factorytour* dalam rangka pengembangan pendidikan 3 (tiga) sekolah, beasiswa pendidikan, bantuan sarana pendidikan dan kegiatan bidang pendidikan lainnya.
- Bidang Kesehatan, berupa kegiatan sahabat posyandu, Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil dan Balita, BPJS Ketenagakerjaan Warga, Pemberian makanan tambahan balita (Stunting), Menyiapkan konsumsi sehat dan bergizi untuk peserta posyandu (Anak Stunting), Program Posyandu Binaan, Konsultasi Gizi dan Skrining Anak Sekolah, Seminar Awam Demam Berdarah, Bakti sosial Pengobatan Gratis, Skrining Stunting, Hari Kesehatan Nasional, Kesehatan (Pengobatan Gratis, Khitanan Massal, Seminar dan Penyuluhan Kesehatan)

- Bidang lingkungan hidup, berupa Festival Ciremai 2024, Hari Lingkungan Hidup Dunia 2024, Pengadaan Alat Berta Bulldozer. Penataan Lingkungan perbaikan saluran drainase dan rehabilitasi, partisipasi pengadaan bak sampah, serta penanaman pohon.
- Bidang ekonomi, berupa Bantuan Kegiatan Pengemasan UMKM, pemberian bantuan untuk UMKM, kegiatan Maremaan UMKM 2024, Penyediaan Sarana Prasarana Pengrajin Anyaman Rotan.
- Bidang Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan, berupa Pegelaran Wayang Golek, Rehabilitasi Stadion Mashud Wisnusaputra, Penataan Lapangan Sepakbola, kegiatan Darma Sagara Fest, Bulan Bakti Karang Taruna.
- Bidang kebencanaan, berupa penyuluhan siap siaga bencana, Pengadaan Tabung APAR, Bantuan Sosial Kebencanaan.
- Bidang sosial dan keagamaan, berupa Pembangunan Masjid, Pembangunan Sarana Prasarana Mushola, Kegiatan berbagi takjil, Bantuan kegiatan peringatan HUT RI, Bantuan kegiatan sosial dalam rangka HUT Dharma Wanita, Pemberian sembako kepada masyarakat kurang mampu, Pemberian Bantuan tunai kepada Tokoh Agama dan Ormas, Distribusi Hewan Kurban, Kegiatan Tilawatil Quran, Partisipasi Wakaf Gedung MUI Kuningan, Sponsorship HUT Bhayangkara, Bantuan Dana Ponpes, Kegiatan Tabligh Akbar, Santunan Anak Yatim piatu dan lansia.
- Bidang lainnya, bantuan untuk program pengembangan Kampung Ramah Anak dalam rangka mendukung peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di Kabupaten Kuningan.

Untuk pelaksanaan CSR Tahun 2025 Pemerintah Daerah akan menawarkan dan mengarahkan alokasi CSR pada program dan kegiatan dalam upaya menunjang penanggulangan kemiskinan, pengangguran, stunting, pengendalian inflasi, serta berbagai bentuk kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan

kesejahteraan masyarakat yang merupakan selaras dengan isu Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kuningan.

Perubahan kebijakan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025 tidak hanya mencakup penambahan atau pengurangan anggaran, tetapi juga menampung pergeseran anggaran, baik antar unit organisasi, antar kegiatan maupun antar jenis belanja. Hal ini dimaksudkan untuk mengefektifkan pencapaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah pada masing-masing urusan pemerintahan. Arah Kebijakan Keuangan Daerah memuat realisasi dan proyeksi/target serta arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

Pengendalian inflasi merupakan salah satu tugas penting pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi. Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan menggunakan berbagai strategi, salah satunya adalah strategi 4K, yang merupakan singkatan dari Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

1. Keterjangkauan Harga

Aspek ini fokus pada upaya menjaga agar harga barang dan jasa, khususnya bahan pangan, tetap terjangkau oleh masyarakat. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

- Pemantauan harga secara intensif secara rutin melalui pemantauan pergerakan harga di pasar untuk mengidentifikasi potensi kenaikan harga yang tidak wajar.
- Koordinasi dengan produsen dengan mendorong produsen untuk menjaga tingkat produksi dan tidak menaikkan harga secara sepihak.
- Subsidi atau insentif kepada produsen atau konsumen untuk menjaga harga tetap stabil. Contohnya, subsidi pupuk untuk petani agar biaya produksi pangan tidak melambung.
- Operasi pasar dengan menjual barang kebutuhan pokok di bawah harga pasar untuk menstabilkan harga saat terjadi lonjakan, contohnya Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar

Beras Murah Beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) di 32 Kecamatan Kabupaten Kuningan, serta Operasi Pasar Murah dan Gelar Pangan Murah menjelang Ramadhan sampai menjelang Idul Fitri.

2. Ketersediaan Pasokan

Strategi ini bertujuan untuk memastikan pasokan barang dan jasa, terutama kebutuhan pokok, mencukupi untuk memenuhi permintaan masyarakat. Jika pasokan terbatas, harga cenderung naik. Upaya yang dilakukan meliputi:

- Peningkatan produksi dengan mendorong sektor pertanian dan industri untuk meningkatkan kapasitas produksi. Diantaranya, bantuan ternak ayam untuk kelompok ternak sehingga dapat meningkatkan ketersediaan pasokan bahan pokok telur dan daging.
- Pengelolaan stok untuk memastikan ketersediaan stok cadangan, terutama untuk komoditas pangan strategis, guna mengantisipasi kelangkaan. Contohnya melaksanakan Tanam Padi Gogo seluas 10 Ha, Penyerahan Alsintan Bantuan dari Kementerian Pertanian RI dan Aspirasi Anggota DPR RI untuk meningkatkan produktivitas pertanian, Memberikan bantuan benih unggul kepada masyarakat, Penebaran ikan di 100 titik perairan umum, pengembangan kawasan hortikultura, Gerakan Konsumsi Pangan Beragam Bergizi Sehat Aman (B2SA), Penyusunan Kebutuhan Pangan Lokal, Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber gizi keluarga dan Fasilitasi revitalisasi *Rice Milling Unit* (RMU) dan Sarana Penggilingan padi untuk ketersediaan stok.

3. Kelancaran Distribusi

Aspek ini menekankan pentingnya kelancaran aliran barang dari produsen ke konsumen. Hambatan dalam distribusi dapat menyebabkan kenaikan harga karena biaya logistik yang tinggi atau

penumpukan barang di satu tempat. Langkah-langkahnya antara lain:

- Perbaikan infrastruktur dengan meningkatkan kualitas jalan untuk mempercepat dan mempermudah proses distribusi. Diantaranya Perbaikan/Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan pada kawasan sentra produksi pangan dan Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT).
- Pengawasan rantai pasok untuk memastikan tidak ada praktik penimbunan atau monopoli yang menghambat distribusi.
- Optimalisasi transportasi dengan menggunakan moda transportasi yang efisien dan memadai untuk mengangkut barang. Contohnya, Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Angkutan Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.
- Pengembangan pasar tradisional dan modern untuk memperluas akses masyarakat terhadap pusat-pusat distribusi barang. Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan melaksanakan monitoring harga dan ketersediaan pasokan di pasar tradisional dan pasar modern.

4. Komunikasi Efektif

Strategi ini berfokus pada penyampaian informasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat mengenai kondisi inflasi, kebijakan yang diambil, dan prospek ke depan. Tujuannya adalah untuk membentuk ekspektasi masyarakat yang stabil terhadap inflasi. Ini dilakukan dengan:

- Edukasi publik dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai faktor-faktor penyebab inflasi dan pentingnya peran serta mereka dalam pengendaliannya. Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan melakukan kegiatan Bimbingan teknis kepada pelaku usaha dan pengawasan penanaman modal.

- Rilis data dan analisis secara rutin untuk menyampaikan data inflasi, proyeksi, dan analisis kebijakan kepada publik. Contohnya Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada system PIR dan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan dibidang berusaha Berbasis Resiko
- Dialog dengan pemangku kepentingan dengan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, seperti pelaku usaha, akademisi, dan media, untuk mendapatkan masukan dan membangun pemahaman bersama serta melaksanakan rapat koordinasi dan high level meeting tim pengendalian inflasi daerah
- Pengendalian narasi dengan mengelola informasi dan mencegah penyebaran rumor atau berita bohong yang dapat memicu kepanikan dan kenaikan harga. Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan melakukan kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan data dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan berbasis Sistem Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Dengan implementasi strategi 4K secara terkoordinasi dan sinergis Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan mengharapkan inflasi dapat terkendali, menjaga daya beli masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Indeks Perkembangan Harga (IPH) berfungsi sebagai indikator awal atau proxy dari inflasi, membantu pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi dengan memantau dan mengambil tindakan terhadap perubahan harga komoditas pangan. Kondisi saat ini, IPH Kabupaten Kuningan mengalami fluktuasi, pada awal Tahun 2025 tepatnya minggu Ke-2 Januari, IPH Kabupaten Kuningan tercatat sebesar 4,820, hal ini tidak terlepas dari adanya pengaruh HBKN Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Setelah itu angka IPH terus mengalami penurunan sampai pada titik terendah yakni pada minggu Ke 3 Februari dengan angka IPH sebesar -2,24. Hal ini

menandakan harga komoditas kembali ke titik normal setelah sebelumnya mengalami kenaikan harga. Menjelang Ramadhan yang bertepatan dengan Bulan Maret 2025, IPH kembali naik. Pada minggu 1 Maret, tercatat angka IPH sebesar 3,090, lalu minggu ke 2 Maret sampai minggu ke 5 Mei, angka IPH terus menurun sampai pada angka -4,18, dan pada minggu pertama Juni, angka IPH tercatat sebesar 1,870, hal ini diakibatkan oleh konsumsi masyarakat yang meningkat terutama pada Hari Raya Idul Adha.

A. Kondisi, Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah daerah berfungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pendapatan daerah, otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah, sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki. Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi:
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain PAD yang Sah
2. Pendapatan Transfer yang meliputi:
 - a. Transfer Pemerintah Pusat
 - b. Transfer antar Daerah
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, meliputi:
 - a. Hibah
 - b. Dana Darurat dan/ atau

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Berdasarkan perkembangan kondisi dan prognosis realisasi pendapatan per Maret 2025, Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 dapat disajikan pada Tabel 3.10 berikut:

Tabel 3. 12 Realisasi Pendapatan Tahun 2022 - Triwulan I 2025

Kode	URAIAN	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024	REALISASI 2025 (Per 09 Mei 2025)
4	PENDAPATAN DAERAH	2.679.853.810.091	2.842.014.448.932	2.861.962.617.798	697.905.518.197
4.1	Pendapatan Asli Daerah	346.586.033.112	350.362.663.121	313.331.431.619	116.484.565.874
4.1.01	Pajak Daerah	107.678.513.745	122.612.598.317	135.980.403.833	70.677.346.150
4.1.02	Retribusi Daerah	77.239.874.431	55.688.506.176	11.718.429.098	2.489.797.028
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.138.783.168	6.674.861.370	6.644.943.280	2.768.115.753
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	154.528.861.768	165.386.697.258	158.987.655.408	40.549.306.943
4.2	Pendapatan Transfer	2.323.312.627.999	2.486.364.664.961	2.502.511.523.398	565.965.502.240
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	2.072.355.555.913	2.124.497.547.732	2.240.840.890.755	542.287.292.140
4.2.02	Transfer Antar-Daerah	250.957.072.086	361.867.177.229	261.670.632.643	23.678.210.100
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	9.755.148.980	5.287.120.850	46.119.662.781	15.455.450.083
4.3.01	Hibah	9.755.148.980	5.287.120.850		
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	46.119.662.781	15.455.450.083

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 09 Mei 2025 Pemerintah Kabupaten Kuningan

Berdasarkan realisasi sampai Bulan Mei 2025, target Pendapatan Daerah tahun 2025 baru mencapai 24,66 % dari perubahan target APBD TA 2025. Kondisi pendapatan daerah tahun 2025 (saat ini masih berjalan) tidak jauh berbeda dengan kondisi keuangan pada Tahun 2024, dimana tantangan dan hambatan yang dihadapi masih relatif sama. Sehingga diperlukan koreksi yang cukup signifikan dari sektor PAD. Dikarenakan target PAD tahun 2025 dinilai sangat optimistis, namun dalam perjalanan realisasinya berdasarkan hasil prognosis PAD, terdapat beberapa sektor PAD yang tidak akan tercapai. Sehingga perlu dilakukan upaya dengan merasionalisasi

target sesuai potensi moderat, namun dengan tetap mengoptimalkan potensi PAD yang masih dapat ditingkatkan.

Selain itu terdapat pengurangan alokasi anggaran pendapatan transfer khususnya pada transfer antar-daerah yang mengalami penurunan sebesar Rp115.753.120.577,- sehingga target pada tahun ini berubah menjadi Rp129.670.209.922,-. Berikut gambaran proyeksi Target Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2025:

Tabel 3. 13 Proyeksi Target Pendapatan Kabupaten Kuningan Tahun 2023-2025

URAIAN	APBD TA. 2023	APBD TA. 2024	APBD PARSIAL TA. 2025	TARGET PERUBAHAN RPKD TA. 2025
PENDAPATAN DAERAH	2.870.865.870.222	3.154.882.748.400	2.948.175.468.387	2.830.145.830.255
<i>Pendapatan Asli Daerah</i>	366.122.431.705	386.370.523.173	481.313.142.004	475.151.693.350
Pajak Daerah	118.620.000.000	143.249.772.509	242.589.687.886	235.353.291.920
Retribusi Daerah	63.626.544.012	36.522.292.664	39.151.299.448	39.151.299.448
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.589.371.352	6.644.943.280	7.033.476.838	6.667.050.651
Lain-lain PAD Yang Sah	177.286.516.341	199.953.514.720	192.538.677.832	193.980.051.331
<i>Pendapatan Transfer</i>	2.498.743.438.517	2.721.579.319.604	2.421.705.847.499	2.305.952.726.922
Transfer Pemerintah Pusat	2.113.432.942.000	2.457.865.655.093	2.176.282.517.000	2.176.282.517.000
Transfer Antar-Daerah	385.310.496.517	263.713.664.511	245.423.330.499	129.670.209.922
<i>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</i>	6.000.000.000	46.932.905.623	45.156.478.884	49.041.409.983
Hibah	6.000.000.000	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	46.932.905.623	45.156.478.884	49.041.409.983

Sumber: Data Olah Bappeda Kabupaten Kuningan, Mei 2025

Dengan melihat kebijakan pemerintah pasca perubahan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka proyeksi perubahan target pendapatan Tahun 2025 dibanding target APBD 2024 di Kabupaten Kuningan mengalami kenaikan. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa jenis pendapatan asli daerah yang naik yang di dalamnya mencakup:

1. Terjadinya kenaikan Pajak Daerah dibanding APBD tahun 2024 hampir mencapai 65 persen (64,3 persen).
2. Terjadinya kenaikan Retribusi Daerah sebesar 7,2 persen.

3. Terjadinya kenaikan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 0,33 persen

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang bersumber dari dana transfer baik pusat maupun transfer antar daerah serta pendapatan lain- lain daerah yang sah.

Sampai saat ini sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan dana transfer. Artinya kemandirian daerah Kabupaten Kuningan masih harus terus didorong peningkatannya. Kebijakan umum sektor pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah melalui kebijakan yang efektif yakni dengan menyesuaikan struktur tarif Pajak Daerah dan besaran nilai Retribusi Daerah sesuai kondisi keekonomian secara berkeadilan, serta dengan kebijakan terkait peningkatan pengawasan/pengendalian pada proses bisnis pemungutan PAD.

Selain itu untuk optimalisasi pendapatan daerah, maka kebijakan daerah juga harus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan investasi dan dunia usaha. Pertumbuhan dunia usaha dan investasi tentu akan menjadi pemacu yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan daerah. sehingga pemerintah daerah harus terus mendorong dan membuat kebijakan untuk menciptakan iklim investasi yang baik.

Untuk itu, seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, tentu berkonsekuensi pada perubahan kebijakan dan regulasi sektor pengelolaan Pendapatan di Daerah. Sehingga pada tahun 2025 perlu segera disusun beberapa Perda yang mengatur Pengelolaan Pendapatan Daerah lebih efektif, yaitu:

1. Penyusunan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perda ini disusun untuk mengganti Perda Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah serta mengganti beberapa Perda tentang Retribusi Daerah yang dimasukkan menjadi satu Perda yang efektif dan mempunyai daya kendali yang efektif dalam proses pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Penyusunan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan 2023-2043. Hal ini demi menjamin kepastian berinvestasi serta menumbuh kembangkan dunia usaha yang tentu akan berkorelasi positif dengan pertumbuhan Pendapatan Daerah.

Selanjutnya terdapat upaya-upaya optimalisasi PAD yang masih harus ditempuh untuk meningkatkan pendapatan daerah, antara lain adalah:

- a. Peningkatan pendataan/pemutakhiran data Pajak Daerah dengan berbasis data lapangan, khususnya Pajak PBB-P2, BPHTB, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah.
- b. Pelibatan masyarakat secara masif dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi daerah, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
- c. Pemanfaatan Aset daerah untuk mendorong peningkatan PAD;
- d. Peningkatan Pengawasan dan Law Enforcement perpajakan daerah;
- e. Melaksanakan pengawasan pembayaran pajak daerah melalui verifikasi pembayaran pajak daerah (*Tax Clearance*), dengan cara melekatkan persyaratan perizinan dengan kewajiban perpajakan. Atau pelaksanaan kebijakan konfirmasi status wajib pajak baik dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah maupun dengan melakukan pertukaran data perpajakan dengan Lembaga vertical seperti Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Dari sisi pendapatan daerah, perubahan asumsi dasar Kebijakan Umum Pendapatan Tahun Anggaran 2025 antara lain diprioritaskan untuk menampung dan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan mendapat alokasi anggaran Bantuan Keuangan Provinsi dan kenaikan pendapatan bagi hasil provinsi.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 180 Tahun 2021 tentang Perhitungan Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun Anggaran 2023; Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan mendapat alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2025. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan mendapat Dana Desa yang sudah diperinci tiap desa sebanyak 361 (tiga ratus enam puluh satu) desa termasuk prioritas penggunaan dan mekanisme penyalurannya.

Sumber dana pembangunan APBD Kabupaten Kuningan secara umum masih didominasi oleh sumber dana transfer serta lain-lain pendapatan yang sah, sementara kemampuan pendapatan asli daerah (PAD) belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Penggunaan belanja daerah dalam APBD ditujukan untuk mendanai prioritas pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2025 serta mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun

2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah dan juga mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Kebijakan Belanja Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 ini juga untuk mewadahi beberapa Kebijakan yang terbit setelah penetapan RKPD Tahun 2025 yang memerlukan penanganan segera serta menjadi prioritas Nasional maupun provinsi yang memerlukan dukungan dari kabupaten, selain itu juga untuk memformulasikan kembali efektifitas belanja program dan kegiatan di perangkat daerah yang memerlukan penyesuaian akibat adanya perubahan asumsi pagu belanja berdasarkan capaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2025.

Perubahan kebijakan yang menyebabkan perlu diadakannya penyesuaian belanja daerah dalam Perubahan RKPD Tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas bagi Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 dan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, dimana penghasilan yang menjadi komponen perhitungan besaran THR dan Gaji Ketiga Belas meliputi Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Pangan, Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum, dan Tambahan Penghasilan;
3. Pemetaan (*mapping*) klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yang

didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga nomenklatur rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya pada RKPD Tahun 2025 mengalami penyesuaian pada penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, Realisasi Belanja Daerah sampai dengan Bulan April 2025 baru mencapai 17,05% atau sebesar Rp505.885.181.019,- dari total proyeksi belanja sebesar Rp2.966.250.552.926,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Operasi, dengan realisasi mencapai 20,12%.
2. Belanja Modal, dengan realisasi mencapai 0,94%.
3. Belanja Tidak Terduga, dengan realisasi mencapai 37,18%.
4. Belanja Transfer, dengan realisasi mencapai 8,60%.

Tabel 3. 14 Realisasi Belanja Tahun 2022 – Bulan April Tahun 2025

URAIAN	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024	REALISASI 2025
BELANJA DAERAH	2.708.515.650.596	2.832.406.522.597	2.874.451.183.026	505.885.181.019
Belanja Operasi	2.010.061.509.032	2.071.607.933.939	2.026.035.316.758	457.295.814.845
Belanja Pegawai	1.146.569.988.635	1.236.027.150.638	1.251.541.466.011	407.933.411.279
Belanja Barang dan Jasa	787.351.371.791	740.038.445.929	664.165.620.222	44.238.613.066
Belanja Bunga	1.408.740.156	2.619.236.622	3.218.634.875	
Belanja Subsidi	-	-	-	
Belanja Hibah	66.576.805.450	83.430.575.750	102.204.015.650	2.946.525.500
Belanja Bantuan Sosial	8.154.603.000	9.492.525.000	4.905.580.000	2.177.265.000
Belanja Modal	229.856.933.449	254.910.604.687	326.882.705.076	1.775.473.153
Belanja Modal Tanah	26.751.824.467	11.192.050.724	181.406.240	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.977.556.706	67.447.867.808	179.123.746.097	609.200.600
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	66.623.156.876	81.763.034.176	107.056.681.172	1.016.755.553
Belanja Modal Jalan, Jarigan dan Irigasi	79.711.956.467	86.485.838.150	43.225.942.800	-
Belanja Aset Tetap lainnya	6.792.438.933	7.989.804.829	5.225.946.850	-
Belanja Aset lainnya	-	32.009.000	292.960.000	149.517.000
Belanja Tidak Terduga	11.870.504.527	9.491.497.400	9.226.991.000	4.461.708.000
Belanja Tidak Terduga	11.870.504.527	9.491.497.400	9.226.991.000	4.461.708.000

URAIAN	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024	REALISASI 2025
Belanja Transfer	456.726.703.588	496.396.486.571	504.082.192.109	42.352.185.021
Belanja Bagi Hasil	15.921.642.838	18.185.397.238	17.543.860.517	-
Belanja Bantuan Keuangan	440.805.060.750	478.211.089.333	486.538.331.592	42.352.185.021

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 30 April 2025 Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Analisis proyeksi belanja dan pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah selama kurun waktu satu tahun. Format laporan keuangan yang dibuat mengikuti ketentuan dalam Permendagri Nomor 77 tahun 2020, yang membagi postur belanja menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Proyeksi belanja dilakukan dengan menggunakan pendekatan linier.

Mencermati pola belanja dalam laporan keuangan yang tersedia, belanja daerah tahun 2025 sebesar Rp2.972.120.881.074,- sementara pada target perubahan tahun 2025 sebesar Rp2.966.250.552.926,- yang sudah mengakomodir semua kegiatan pembangunan daerah, sehingga dapat diambil beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Belanja Operasi mengalami kenaikan sebesar 2,38 persen dari APBD Parsial Tahun 2025; sementara
2. Belanja Modal menunjukkan penurunan sebesar 23,69 persen.

Tabel 3. 15 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2023-2025

URAIAN	2023	2024	PARSIAL 2025	PERUBAHAN 2025
BELANJA DAERAH	2.832.406.522.597	3.194.961.260.660	2.972.120.881.074	2.964.780.553.246
Belanja Operasi	2.050.927.037.669	2.308.724.729.405	2.219.973.039.502	2.271.445.742.642
Belanja Pegawai	1.156.334.253.676	1.340.172.985.214	1.356.520.043.069	1.407.246.586.683
Belanja Barang dan Jasa	798.540.060.243	843.588.100.941	780.248.546.683	788.660.646.171
Belanja Bunga	0	4.000.000.000	0	1.700.000.000
Belanja Hibah	81.576.613.750	115.665.018.250	75.839.982.250	66.189.982.250
Belanja Bantuan Sosial	14.476.110.000	5.298.625.000	7.364.467.500	7.648.527.500
Belanja Modal	290.211.343.128	377.256.885.831	247.488.134.572	188.675.103.642
Belanja Modal Tanah	29.450.000.000	181.406.240	0	0

URAIAN	2023	2024	PARSIAL 2025	PERUBAHAN 2025
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.735.765.273	196.866.679.346	128.045.731.764	58.265.823.884
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	120.951.963.440	121.585.489.807	50.488.362.459	52.698.862.459
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	39.940.000.000	51.856.098.350	46.591.870.833	55.306.190.833
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	29.602.473.519	6.130.988.273	22.062.938.766	22.104.995.716
Belanja Aset Lainnya	531.140.896	636.223.815	299.230.750	299.230.750
Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000
Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000
Belanja Transfer	474.983.763.424	496.979.645.424	492.659.707.000	492.659.707.000
Belanja Bagi Hasil	11.269.123.424	18.669.123.424	14.658.000.000	14.658.000.000
Belanja Bantuan Keuangan	463.714.640.000	478.310.522.000	478.001.707.000	478.001.707.000

Sumber: Data Olah Bappeda, Bappenda dan BPKAD Kabupaten Kuningan, Mei 2025

Dengan adanya keterbatasan anggaran maka berpengaruh terhadap belanja daerah sehingga penambahan belanja disesuaikan dengan kebutuhan secara rasional dengan pendekatan belanja prioritas. Perubahan anggaran belanja daerah disesuaikan dengan kebutuhan mendesak yang terjadi dijabarkan sesuai tabel 3.15 dengan rincian penambahan belanja sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai yang di dalamnya terdapat pembayaran BPJS Perangkat Desa, pembayaran TPP 2 bulan, Tunjangan Guru, dan alokasi Gaji P3K tahun 2025;
- b. Penambahan Pagu Pokok Pikiran DPRD;
- c. Hadiah Desa Terbaik dalam Pengelolaan Sampah
- d. Bina Mental Spiritual;
- e. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan;
- f. Pemanfaatan Data Kependudukan;
- g. Koordinasi Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri;
- h. Pemindahan Kantor Bappeda, Inspektorat, Kesbangpol, dan Satpol PP;
- i. RP3KP;

- j. Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung BPKAD serta penataan Interior Lanjutan Lt. Dasar dan Lantai 3 Gedung Setda;
- k. Pengamanan BMD;
- l. Irigasi dan Air Minum TMMD;
- m. Penataan Kantor Kejaksaan;
- n. Pembayaran SILPA RSUD 45 dan Puskesmas;
- o. Open Biding dan Manajemen Talenta
- p. Belanja Bunga atas pinjaman daerah; dan
- q. Belanja Bantuan Sosial

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD atau memanfaatkan surplus APBD. Arah kebijakan penerimaan pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Sumber penerimaan pembiayaan terdiri dari:

- 1) Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA);
- 2) Penerimaan Pinjaman Daerah;
- 3) Pencairan Dana Cadangan; maupun
- 4) Penerimaan Piutang Daerah.

Sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan timbul karena adanya surplus atau kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah maupun untuk pembayaran cicilan pokok utang. Berikut ini merupakan realisasi pembiayaan Kabupaten Kuningan tahun 2022 sampai tahun 2025 triwulan I.

Tabel 3. 16 Realisasi Pembiayaan Tahun 2022-2025

URAIAN	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024	REALISASI 2025
PEMBIAYAAN DAERAH	44.766.793.268	5.725.071.348	-	-
Penerimaan Pembiayaan Daerah	65.266.792.658	72.294.861.048	-	-
SILPA Sebelumnya	65.266.792.658	15.908.071.348	-	-
Pencairan Dana Cadangan	-	17.400.000.000	-	-
Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	38.986.789.700	-	-
Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	20.499.999.390	66.569.789.700	-	-
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yg Jatuh Tempo	-	38.986.789.700	-	-
Penyertaan Modal Daerah	5.499.999.390	4.083.000.000	-	-
Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000	23.500.000.000	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode Maret 2025 Pemerintah Kabupaten Kuningan

Berdasarkan realisasi diatas, pembiayaan daerah tahun 2025 belum ada nilai realisasi, hal tersebut dikarenakan tidak adanya pengeluaran pembiayaan berdasarkan dari pinjaman daerah.

Tabel 3. 17 Target Pembiayaan Tahun 2023-2025

URAIAN	2023	2024	MURNI 2025	PERUBAHAN 2025
PEMBIAYAAN DAERAH	-26.500.000.000	36.440.516.965	23.945.412.687	134.634.722.991
Penerimaan Pembiayaan Daerah	0	96.440.516.965	48.945.412.687	159.634.722.991
SILPA Tahun Sebelumnya	0	15.340.516.965	23.945.412.687	23.945.412.687
Pencairan Dana Cadangan	0	21.100.000.000	-	-
Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	60.000.000.000	25.000.000.000	135.689.310.304
Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
Pinjaman Luar Negeri	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	26.500.000.000	60.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
Pembayaran Cicilan Pokok Utang	0	60.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000	-	-	-

URAIAN	2023	2024	MURNI 2025	PERUBAHAN 2025
Pembentukan Dana Cadangan	23.500.000.000		-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	-		-	-

Sumber: BAPPEDA (data diolah), 2025

Kebijakan pembiayaan daerah terhadap kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat akan berimplikasi pada kemungkinan terjadinya defisit anggaran, untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi, sehingga defisit anggaran tersebut dapat ditanggulangi antara lain melalui:

a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada Tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-Tahun anggaran berikutnya, mencakup sisa lebih perhitungan anggaran Tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Adapun Kebijakan penerimaan pembiayaan perubahan Tahun 2025 meliputi:

- 1) Sisa Lebih Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.
- 2) Defisit APBD ditutup melalui Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu sebesar Rp23.945.412.687,- dan dari Pinjaman Daerah (Pinjaman jangka pendek dan jangka panjang) sebesar Rp137.159.309.984,-

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;

pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan Tahun 2025 adalah:

- 1) Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, sebesar Rp25.000.000.000,-;
- 2) Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran;
- 3) Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.

Pada Tabel 3.15 disampaikan proyeksi pendapatan daerah yang ideal disandingkan dengan belanja daerah dan pembiayaan daerah yang disesuaikan dengan usulan dari SIPD maka hasilnya seimbang (tidak terdapat defisit maupun surplus).

Tabel 3. 18 Perbandingan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

URAIAN	APBD TA. 2023	APBD TA. 2024	PARSIAL TA. 2025	PERUBAHAN TA. 2025
PENDAPATAN DAERAH	2.870.865.870.222	3.154.882.748.400	2.948.175.468.387	2.830.145.830.255
<i>Pendapatan Asli Daerah</i>	366.122.431.705	386.370.523.173	481.313.142.004	475.151.693.350
Pajak Daerah	118.620.000.000	143.249.772.509	242.589.687.886	235.353.291.920
Retribusi Daerah	63.626.544.012	36.522.292.664	39.151.299.448	39.151.299.448
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.589.371.352	6.644.943.280	7.033.476.838	6.667.050.651
Lain-lain PAD Yang Sah	177.286.516.341	199.953.514.720	192.538.677.832	193.980.051.331
<i>Pendapatan Transfer</i>	2.498.743.438.517	2.721.579.319.604	2.421.705.847.499	2.305.952.726.922
Transfer Pemerintah Pusat	2.113.432.942.000	2.457.865.655.093	2.176.282.517.000	2.176.282.517.000
Transfer Antar-Daerah	385.310.496.517	263.713.664.511	245.423.330.499	129.670.209.922
<i>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</i>	6.000.000.000	46.932.905.623	45.156.478.884	49.041.409.983
Hibah	6.000.000.000	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	46.932.905.623	45.156.478.884	49.041.409.983
BELANJA DAERAH	2.832.406.522.597	3.194.961.260.660	2.972.120.881.074	2.964.780.553.246
<i>Belanja Operasi</i>	2.050.927.037.669	2.308.724.729.405	2.219.973.039.502	2.271.445.742.642
Belanja Pegawai	1.156.334.253.676	1.340.172.985.214	1.356.520.043.069	1.407.246.586.683
Belanja Barang dan Jasa	798.540.060.243	843.588.100.941	780.248.546.683	788.660.646.171
Belanja Subsidi	0	4.000.000.000	0	1.700.000.000

URAIAN	APBD TA. 2023	APBD TA. 2024	PARSIAL TA. 2025	PERUBAHAN TA. 2025
Belanja Hibah	81.576.613.750	115.665.018.250	75.839.982.250	66.189.982.250
Belanja Bantuan Sosial	14.476.110.000	5.298.625.000	7.364.467.500	7.648.527.500
Belanja Modal	290.211.343.128	377.256.885.831	247.488.134.572	188.675.103.642
Belanja Modal Tanah	29.450.000.000	181.406.240	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.735.765.273	196.866.679.346	128.045.731.764	58.265.823.884
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	120.951.963.440	121.585.489.807	50.488.362.459	52.698.862.459
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	39.940.000.000	51.856.098.350	46.591.870.833	55.306.190.833
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	29.602.473.519	6.130.988.273	22.062.938.766	22.104.995.716
Belanja Aset Lainnya	531.140.896	636.223.815	299.230.750	299.230.750
Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000
Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000
Belanja Transfer	474.983.763.424	496.979.645.424	492.659.707.000	492.659.707.000
Belanja Bagi Hasil	11.269.123.424	18.669.123.424	14.658.000.000	14.658.000.000
Belanja Bantuan Keuangan	463.714.640.000	478.310.522.000	478.001.707.000	478.001.707.000
Jumlah Belanja			2.972.120.881.074	2.964.780.553.246
Total Surplus/Defisit			-23.945.412.687	-134.634.722.991
PEMBIAYAAN DAERAH	-26.500.000.000	36.440.516.965	23.945.412.687	134.634.722.991
Penerimaan Pembiayaan Daerah	0	96.440.516.965	48.945.412.687	159.634.722.991
SILPA Tahun Sebelumnya	0	15.340.516.965	23.945.412.687	23.945.412.687
Pencairan Dana Cadangan	0	21.100.000.000	-	-
Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	0	60.000.000.000	25.000.000.000	135.689.310.304
Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
Pinjaman Luar Negeri	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	26.500.000.000	60.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
Pembayaran Cicilan Pokok Utang	0	60.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000	-	-	-
Pembentukan Dana Cadangan	23.500.000.000		-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	-		-	-
DEFISIT/SURPLUS	0	0	0	0

Sumber: BAPPEDA (Data Diolah, 2025)

Pada Tabel 3.18 disampaikan proyeksi pendapatan daerah disandingkan dengan belanja dan pembiayaan daerah yang juga berdasarkan perhitungan secara proporsional. Maka didapatkan hasilnya adalah seimbang (tidak defisit maupun surplus), namun dengan catatan

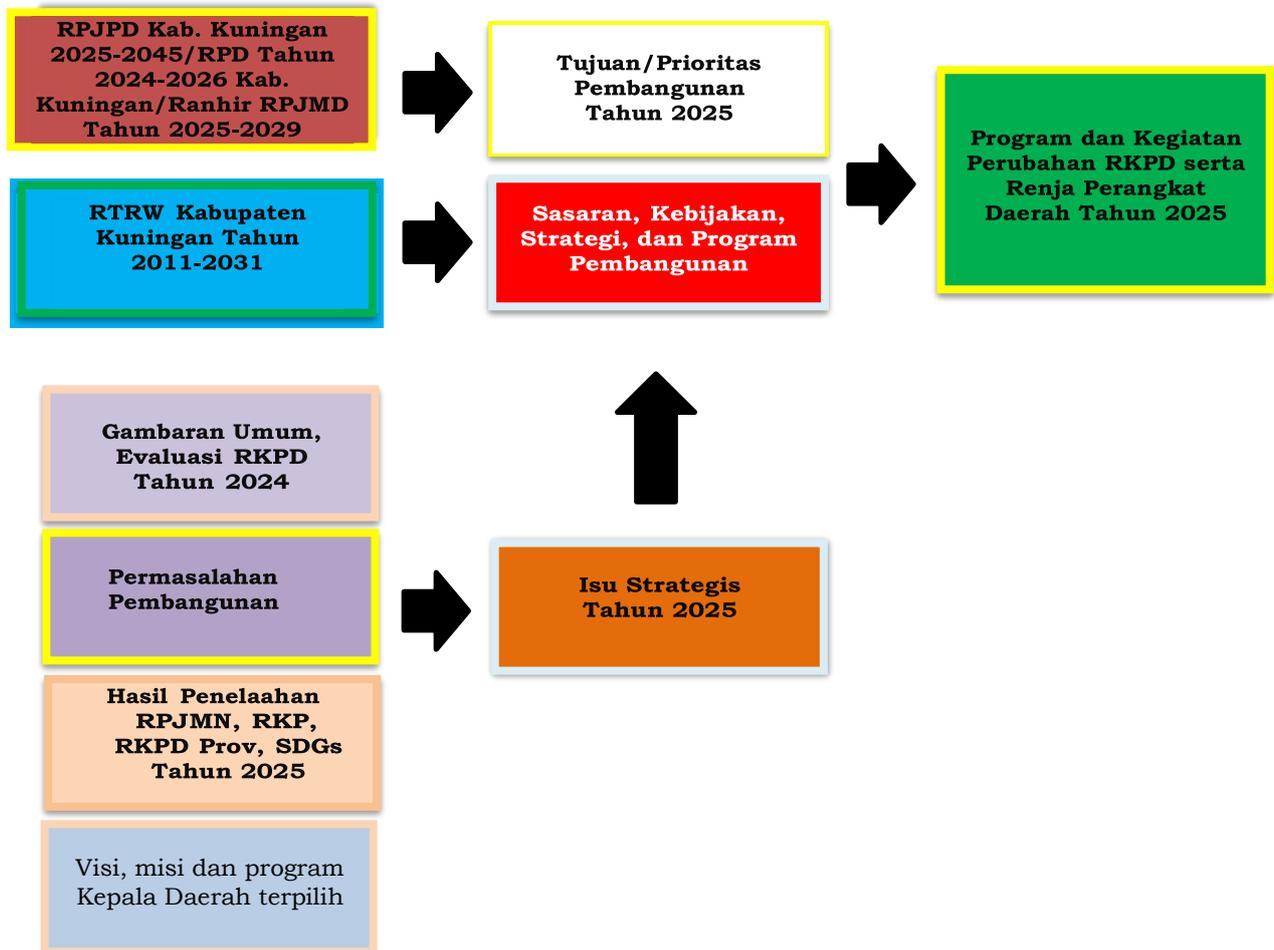
bahwa terdapat pengurangan belanja daerah pada anggaran parsial khususnya di belanja modal.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Tahun kedua dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026. Perubahan RKPD ini menyajikan strategi-strategi yang komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan melalui prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang mengacu pada dokumen perencanaan menengah daerah kabupaten, provinsi dan nasional. Oleh karenanya, sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 dirumuskan untuk mencapai target kinerja RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026. Selain itu, perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 juga disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2024, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, kondisi lingkungan strategis internal- eksternal sebagaimana dibahas dalam bab sebelumnya, serta memperhatikan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029. Substansi sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam Perubahan RKPD 2025 mendasarkan dan memperhatikan:

1. Arah kebijakan Pemerintah dalam RKP Tahun 2025;
2. Prioritas dan tujuan, sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025;
3. Arah kebijakan pembangunan kewilayahan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031;
4. Konsistensi antara kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kuningan sebagai upaya pencapaian target pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten;
5. Penyelesaian terhadap masalah yang bersifat urgen pada Tahun 2025;

6. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kuningan 2025; dan
7. Visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih.



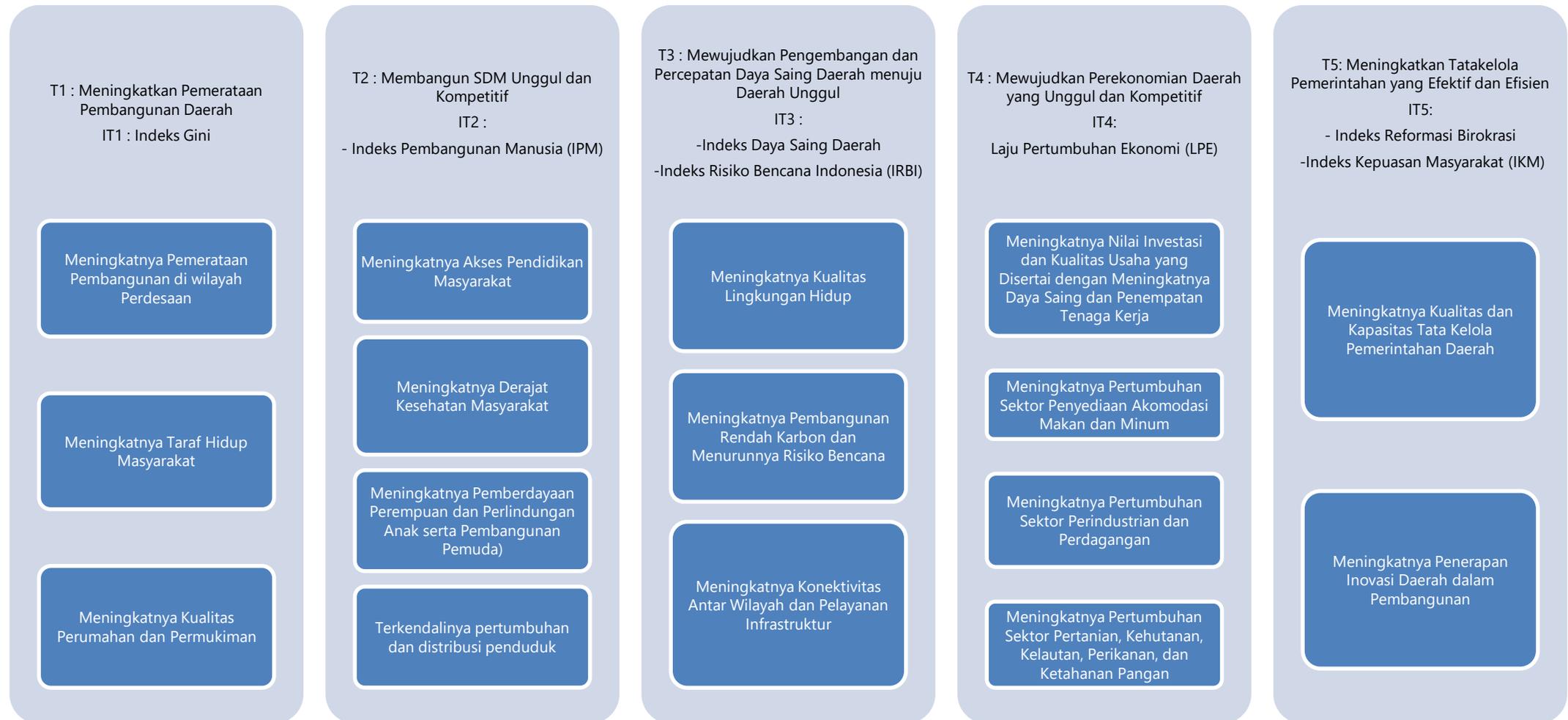
Gambar 4. 1 Kerangka Pikir Perumusan Sasaran dan Prioritas Program Pembangunan Antara Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah

Tujuan pembangunan telah tertuang dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan pembangunan ini telah menjadi landasan dalam merencanakan pembangunan, baik dalam skala nasional maupun lingkup daerah. Dalam rangka mewujudkan keselarasan tujuan dan sasaran pembangunan antar tingkatan pemerintahan, maka perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kuningan turut memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan

Nasional dalam RKP Tahun 2025, maupun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, serta mengacu tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang hendak dicapai pada Tahun 2025 pada RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024 - 2026. Namun pada tahun 2025 ini dalam penyusunan Perubahan RKPD 2025, Kabupaten Kuningan sudah dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030 dan mempunyai tujuan dan sasaran sesuai dengan visi, misi dan program unggulan yang tertuang dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029.

Untuk tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kuningan Nomor 20 Tahun 2023 memuat beberapa 5 tujuan dan beberapa sasaran. Setiap tujuan dan sasaran dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang menggambarkan secara langsung tolak ukur keberhasilan pembangunan Kabupaten Kuningan dengan tingkatan kinerja paling tinggi yaitu dampak (*impact*). Penentuan target kinerja tujuan dan sasaran pada dokumen RPD dengan mempertimbangkan keselarasan pencapaian target kinerja tujuan Perencanaan Pembangunan di tingkat provinsi maupun nasional, yakni dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan teknis yang terjadi.

Untuk lebih jelas melihat keterkaitan antara tujuan dan sasaran termasuk indikator kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilannya pada Tahun 2025 disajikan pada gambar 4.2 dan tabel 4.1 sebagai berikut:



Gambar 4. 2 Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026

Tabel 4. 1 Tujuan, dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target/Capaian					Kondisi Akhir RPD
					Target 2024	Capaian 2024	Target RKPDP 2025	Target Perubahan RKPDP 2025	Target 2026	
T1	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Daerah		Indeks Gini	Poin	0,336	0,379	0,332	0,340 - 0,347	0,328	0,328
		Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Perdesaan	Indeks Desa Membangun	Poin	0,764	0,7936	0,783	0,783	0,793	0,793
		Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin (%)	Persen	11,12-12,72	11,88	10,82-12,86	10,42 - 11,50	10,68-12,98	10,68-12,98
			Pengeluaran per kapita	Ribu	9.933	10.418	10.071	10.071	10.210	10.210
Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	Persentase rumah tangga hunian layak	Persen	97,54	96,42	97,54	97,54	97,94	97,94		
T2	Membangun SDM Unggul dan Kompetitif		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	71,28	71,56	71,79	71,79	72,31	72,31
		Meningkatnya Akses Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,68	7,90	12,79	12,37	12,89	12,89
			Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8	7,9	8,09	7,91	8,18	8,18
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,6	75,22	74,84	75,27	75,08	75,08
			Prevalensi Stunting	Persen	16	7,9	15	7,9	14	14
		Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pembangunan Pemuda	Indeks Pembangunan Gender	Poin	87,49	88,00	87,75	88	88,01	88,01
Terkendalinya Pertumbuhan dan Distribusi Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,28	1,04	1,26	1,04	1,24	1,24		
T3	Mewujudkan Pengembangan dan		Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Poin	3,46	3,82	3,51	3,82	3,56	3,56

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target/Capaian					Kondisi Akhir RPD
					Target 2024	Capaian 2024	Target RKPD 2025	Target Perubahan RKPD 2025	Target 2026	
	Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul		Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Poin	130	141,55	129	129	128	128
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	65,98	72,05	66,28	68,16	66,58	66,58
		Meningkatnya Pembangunan Rendah Karbon dan Menurunnya Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Poin	129	141,55	128	129	128	128
		Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah dan Pelayanan Infrastruktur	Tingkat Konektivitas	Persen	86	82,352	86.8	82,352	87,79	87,79
	Tingkat kemandapan jalan									
T4	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,16-5,66	5,61	5,18-5,71	5,61	5,66-5,76	5,66-5,76
		Meningkatnya Nilai Investasi dan Kualitas Usaha yang Disertai dengan Meningkatnya Daya Saing dan Penempatan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,51-9,21	7,78	8,32-9,05	7,78	8,13-8,89	8,13-8,89
		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum PDRB /Pariwisata	Persen	1,75-1,92	1,95	1,75-1,94	1,95	1,75-1,96	1,75-1,96
		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian dan Perdagangan	Laju pertumbuhan Sektor Industri	Persen	2,31	5,83	2,32	5,83	2,34	2,34
			Laju Pertumbuhan sektor perdagangan	persen	4,83	0,32	4,84	0,32	4,85	4,85
			Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	104,91	113,86	105,22	113,86	105,52	105,52

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target/Capaian					Kondisi Akhir RPD
					Target 2024	Capaian 2024	Target RKPD 2025	Target Perubahan RKPD 2025	Target 2026	
		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan	Kontribusi Sektor Pertanian	Persen	7,93	23,56	8,21	23,56	8,36	8,36
			Skor Pola Pangan Harapan	Poin	87,01	93,8	88,04	93,8	89,03	89,03
T5	Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien		Indeks Reformasi Birokrasi	Skor	CC	BB	B	B	B	B
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	85,7	84,5	86,4	86,4	87,1	87,1
		Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Skor	CC	BB	B	B	B	B
		Meningkatnya Penerapan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Indeks Inovasi Daerah	Poin	45,03	29,82	53,76	53,76	62,49	62,49

Sumber: RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 dan Analisis Bappeda Kabupaten Kuningan 2025

Target Penurunan pengeluaran per kapita di Kabupaten Kuningan pada tahun 2025 Rp10.071.000 dari realisasi Penurunan pengeluaran per kapita Tahun 2024 sebesar Rp10.418.000 atas pertimbangan beberapa faktor. Penurunan pengeluaran per kapita di Kabupaten Kuningan merupakan cerminan dari kombinasi faktor kompleks, di mana perlambatan pertumbuhan ekonomi, terutama pada konsumsi rumah tangga, menjadi penyebab utama. Tekanan inflasi, khususnya pada harga pangan dan biaya hidup, menggerus daya beli masyarakat sehingga pendapatan terasa menyusut dan membatasi pengeluaran non-primer. Selain itu, penyusutan jumlah kelas menengah karena stagnasi upah riil atau "turun kelas" ke kelompok lebih rentan turut memperparah kondisi ini, diperparah oleh ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi harga komoditas yang memengaruhi kinerja ekspor dan investasi. Target dari indikator Indeks Desa Membangun (IDM) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terlihat menurun hal tersebut terjadi perubahan dikarenakan oleh perubahan metologi perhitungan.

Dari sasaran-sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2025 pada tabel diatas dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai penjabaran RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026. Dalam pelaksanaannya, sasaran pembangunan tersebut juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan sasaran utama pembangunan nasional Tahun 2025 dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui sinergi dan kolaborasi dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada, baik dari pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun dari dukungan pemerintah kabupaten, serta dengan mendorong partisipasi masyarakat, dunia usaha, media dan akademisi.

Selain berdasarkan RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026, Perubahan RKPD Tahun 2025 juga didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2045 (Perda Nomor 5 Tahun 2024) dan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Kuningan Tahun 2025-2029 sesuai dengan Visi, Misi dan Program Bupati Periode 2025-2030. RPJMD Kabupaten Kuningan 2025-2029 merupakan bagian dari RPJPD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2045. Visi RPJPD Kabupaten Kuningan 2025-2045 yaitu “**Kuningan Gemah Ripah, Maju, Berkelanjutan dan Berdaya Saing (GEMILANG)**”. Kata Gemilang mengandung makna: **Gemah Ripah**, mengamanatkan pembangunan yang selaras dengan nilai kelestarian alam, mampu menyediakan sandang, pangan, papan, jaminan pendidikan, kesehatan dan lapangan pekerjaan bagi seluruh lapisan masyarakat; **Maju Berkelanjutan**, mengamanatkan pembangunan yang bertumpu pada karakteristik dan keunggulan lokal untuk mampu bersaing secara global, memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, sinergi dan kolaborasi; serta **Berdaya Saing**, mengamanatkan pembangunan yang mampu membentuk SDM unggul secara utuh lahir dan batin, iman dan akal, membangun masyarakat yang harmonis dan agamis berahlaqul kharimah.

Visi Kabupaten Kuningan Tahun 2025 – 2029 sesuai dengan Visi Bupati terpilih adalah: “**Kuningan Melesat Tahun 2029**” yang mengandung makna:

- **Maju:** Perekonomian tumbuh dan berkembang dengan LPE tinggi dan pesatnya sumbangan PDRB sektor pertanian dan jasa pariwisata;
- **Empowering:** Sistem administrasi publik dan pembangunan sosial berlangsung dalam iklim yang memberdayakan, memberikan ruang kreasi, inovasi dan kemandirian luas bagi masyarakat;
- **Lestari:** Pembangunan sosial dan fisik berlangsung dalam bingkai pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan berdasarkan prinsip konservasi;
- **Agamis:** Pendekatan dan ruh penyelenggaraan pembangunan dilandaskan pada nilai dan norma agama yang telah mengakar kuat dalam sejarah kehidupan masyarakat Kuningan;

- **Tangguh:** Kuningan tumbuh kembang dengan lompatan yang menempatkan angka-angka indikator kunci Pembangunan (IPM, IDB, IK, IP, AHH) berada di jajaran atas Kabupaten dan Kota di Jawa Barat.

Dalam rangka mewujudkan Visi di atas, maka ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kuningan Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

- Misi 1: Percepatan Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Dan Professional Melalui Pemerintahan Modern dan Melayani
- Misi 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pariwisata, Pertanian, Perdagangan dan Jasa Maju Dengan Pemanfaatan Sumberdaya Lokal
- Misi 3: Membangun Daya Kreasi, Inovasi, dan Produktivitas Masyarakat Berbasis Pemberdayaan (*Empowering*)
- Misi 4: Menjaga Komitmen Kelestarian Sumberdaya Alam, Daerah Tangkapan Air dan Mengurangi Emisi Lingkungan
- Misi 5: Penerapan Nilai-Nilai Agamis Dalam Kehidupan Berbudaya dan Bermasyarakat
- Misi 6: Pembangunan Yang Tangguh Dengan Orientasi Pada Layanan Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Untuk Penguatan Ketahanan dan Modal Sosial.

Berdasarkan Misi di atas, ditetapkan Tujuan dan Sasaran untuk masing-masing Misi yang akan menjadi target capaian selama 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan dan sasaran setiap misi disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4. 2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kuningan Tahun 2025 – 2029

Visi: Kuningan Melesat Tahun 2029

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Satuan	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
KUNINGAN MELESAT (MAJU, EMPOWERING, LESTARI, AGAMIS, TANGGUH)										
Misi 1: Percepatan Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Dan Professional Melalui Pemerintahan Modern Dan Melayani	1.1 Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan akuntabel serta responsif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B	B	B	A-	A	A
		1.1.1 Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah serta efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B	B	B	A-	A	A
Misi 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pariwisata, Pertanian, Perdagangan Dan Jasa Maju Dengan Pemanfaatan Sumberdaya Lokal	2.1 Terwujudnya perekonomian daerah yang tangguh, inklusif dan berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal dan keunggulan wilayah		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,18 - 5,71	5,20 - 5,76	5,21 - 5,81	5,23 - 5,86	5,24 - 5,91	5,26- 5,97
			Kontribusi PDRB Kabupaten/kota	Persen	1,230	1,233	1,235	1,238	1,241	1,243
			Tingkat Inflasi (%)	Persen	3,3 – 3,9	3,18 – 3,86	3,06 – 3,82	2,95 – 3,78	2,83 – 3,75	2,7-3,7
		2.1.1 Meningkatkan produktivitas dan pemanfaatan dalam penambahan nilai hasil sektor Pertanian dan Pariwisata sebagai sektor unggulan daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	Persen	2,220	2,221	2,222	2,223	2,224	2,225
			Rasio PDRB sektor Perdagangan (%)	Persen	4,840	4,841	4,842	4,843	4,845	4,846
			Laju penguatan kelembagaan Koperasi dan Daya saing UMKM	Persen						
			Rasio PDRB Penyediaan	Persen	2,03	2,06	2,09	2,13	2,16	2,19

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Satuan	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Akomodasi Makan dan Minum (%)*							
			Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan (%)	Persen	24,49	24,57	24,64	24,72	24,80	24,88
			Rasio PDRB Sektor Transportasi dan Pergudangan (%)	Persen	14,43-18,13	14,37-18,53	14,31-18,93	14,26-19,33	14,20 -19,72	14,09 -20,12
			Indeks Ekonomi Hijau Pada Pilar Ekonomi	poin	64,98	65,93	66,88	67,82	68,77	69,72
Misi 3: Membangun Daya Kreasi, Inovasi, Dan Produktivitas Masyarakat Berbasis Pemberdayaan (Empowering)	3.1 Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kreatif dan inovatif melalui pemberdayaan masyarakat dalam mendukung persaingan ekonomi regional		Indeks Daya Saing Daerah	Persen	3,51	3,56	3,62	3,67	3,72	3,77
		3.1.1 Meningkatnya investasi, kerjasama yang baik antar daerah dalam skala regional dan tenaga kerja yang ditempatkan	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Persen	8,32-9,05	8,16-8,92	8,01-8,80	7,85-8,67	7,69-8,54	7,54 -8,42
		3.1.2 Meningkatnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas masyarakat	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	Persen	24,4	24,43	24,47	24,5	24,53	24,57
			Indeks Inovasi Daerah	Poin	53,76	61,22	68,68	76,14	83,6	91,06
		3.1.3 Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas keluarga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta pembangunan pemuda	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (poin)	Poin	52,93	53,09	53,26	53,42	53,58	53,75
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	87,52	88,11	88,11	88,11	88,11	88,11
			Indeks Perlindungan Anak	Poin	100	100	100	100	100	100

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Satuan	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,04	1,03	1,02	1,01	1,00	0,99
Misi 4: Menjaga Komitmen Kelestarian Sumberdaya Alam, Daerah Tangkapan Air Dan Mengurangi Emisi Lingkungan	4.1 Terwujudnya kelestarian serta keseimbangan lingkungan dan pembangunan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	68,16	68,41	68,66	68,92	69,17	69,42
			Penurunan Intensitas Emisi GRK (Ton Co2eq/2010 IDR Milyar)	Ton CO2eq/2010 IDR Milyar	7,14	7,77	8,45	9,33	10,17	11,01
		4.1.1 Meningkatnya kualitas dan kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	68,16	68,41	68,66	68,92	69,17	69,42
			a. Kumulatif (Ton Co2eq)	Ton CO2eq	393.756	512.677	631.598	750.518	869.439	988.359
Misi 5: Penerapan Nilai-Nilai Agamis Dalam Kehidupan Berbudaya Dan Bermasyarakat	5.1 Terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, budaya dan ideologi Pancasila		Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Poin	75	76,21	77,42	78,63	79,84	81,05
		5.1.1 Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum peraturan daerah dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Poin	75	76,21	77,42	78,63	79,84	81,05
		5.1,2 Meningkatnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) / Indeks Toleransi Beragama (Poin)	Poin	70	70,26	70,53	70,79	71,05	71,32
Misi 6: Pembangunan Yang Tangguh Dengan Orientasi Pada Layanan Pendidikan,	6.1 Terwujudnya masyarakat yang tangguh dan sejahtera		Indeks Pembangunan Manusia	Poin	71,43	71,75	72,07	72,39	72,71	73,03

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Satuan	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kesehatan, Infrastruktur Untuk Penguatan Ketahanan Dan Modal Sosial	melalui optimalisasi pendidikan dan kesehatan yang prima untuk semua		PDRB Per Kapita	Juta/Kp /Thn	29,09 – 29,45	30,89 – 60,34	32,68 – 62,13	34,48 – 63,93	36,27 – 65,72	38,07 – 67,52
		6.1.1 Meningkatnya akses pendidikan masyarakat	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)*	Tahun	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	11,00
			Harapan Lama Sekolah (tahun)	Tahun	12,37	12,43	12,49	12,54	12,60	12,66
		6.1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	Tahun	75,27	75,47	75,66	75,86	76,06	76,25
			Prevalensi Stunting	Persen*	20	17	14	11	9	6
	6.2 Terwujudnya kualitas hidup masyarakat yang baik dan sejahtera dalam upaya menekan angka kemiskinan serta ketahanan pangan		Persentase Penduduk Miskin	Persen	10,42-11,5	9,88 - 10,95	9,34 - 10,40	8,80 - 9,85	8,26 - 9,30	7,72-8,75
		6.2.1 Penurunan angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	Persen	10,42-11,5	9,88 - 10,95	9,34 - 10,40	8,80 - 9,85	8,26 - 9,30	7,72-8,75
		6.2.2. Meningkatnya ketersediaan pemenuhan pangan masyarakat	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)	Persen	4,23	4,02	3,82	3,61	3,4	3,19
		6.2.3 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber air baku	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	m3/detik	2,40	2,60	2,80	3,01	3,21	3,41
	6.3 Terwujudnya pemerataan pembangunan dalam menopang perekonomian masyarakat, pemberdayaan masyarakat desa dan ketahanan daerah		Indeks Gini	Poin	0,340 - 0,347	0,339- 0,346	0,337- 0,346	0,336- 0,345	0,334 - 0,345	0,333 - 0,344
6.3.1 Meningkatnya kapasitas pengelolaan desa sebagai penggerak pembangunan di desa		Indeks Desa Membangun (IDM)	poin	0,783	0,805	0,827	0,849	0,871	0,893	
6.3.2 Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas dalam menunjang mobilitas		Tingkat Konektivitas antar wilayah	Poin	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	
	Persentase Kualitas infrastruktur	poin	84,66	86,96	87,74	88,26	88,80	90,00		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Satuan	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
		masyarakat dan ekonomi daerah								
		6.3.3.Meningkatnya kualitas hunian masyarakat	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	Persen	78,6	79,73	80,85	81,98	83,11	84,23
		6.3.4 Meningkatkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	poin	129,00	127,95	126,89	125,84	124,79	123,74

Sumber: Analisis Bappeda Kabupaten Kuningan 2025

4.2. Prioritas Pembangunan

Perencanaan dan Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang bersinergi dengan nasional dan provinsi. Oleh karena itu, pembangunan Kabupaten Kuningan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional, sehingga perumusan prioritas pembangunan Perubahan RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2025 disusun untuk mendukung prioritas pembangunan nasional dan provinsi, prioritas pembangunan daerah dan arah kebijakan RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026, Prioritas Pembangunan Bupati periode 2025-2030 yang tertuang dalam Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029 serta pokok-pokok pikiran DPRD. Selain itu, prioritas pembangunan juga ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis, korelasi terhadap Standar Pelayanan Minimal, *Sustainable Development Goal's* (SDG's), kebijakan transformasi pelayanan kesehatan, pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja serta aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam Musrenbang.

Penyusunan Perubahan RKPD tahun 2025 memperhatikan keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RKP 2025 dan RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2025. Penyusunan prioritas pembangunan Perubahan RKPD Kabupaten Kuningan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria- kriteria antara lain:

- a. Kesesuaian dengan dokumen perencanaan;
- b. Urgensitas penanganan permasalahan pembangunan; dan
- c. Kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat.

Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan:

- a. Arah Kebijakan Pembangunan Menengah Kabupaten Kuningan sebagaimana RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 dan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029;
- b. Isu Strategis, dan
- c. Prioritas program-program pembangunan baik di tingkat Provinsi Jawa Barat maupun Tingkat Nasional.

Perumusan prioritas pembangunan daerah dilakukan dengan mengevaluasi permasalahan pembangunan di setiap urusan sehingga

terlihat upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Prioritas pembangunan tersebut dirumuskan ke dalam fokus prioritas tahun rencana yang berisi program-program unggulan yang paling tinggi daya dukungnya untuk mengatasi permasalahan yang ada atau untuk mencapai target sasaran pembangunan daerah. Fokus prioritas pembangunan pada tahun rencana tersebut, mendukung tema pembangunan yang telah ditetapkan pada dokumen RPD dan Rancangan Akhir RPJMD yang merupakan benang merah menuju sasaran pembangunan.

Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu prioritas pembangunan di tahun sebelumnya yang telah berhasil dicapai tidak lagi diprioritaskan di masa berikutnya, akan tetapi tetap dijaga kesinambungannya. Suatu prioritas pembangunan dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategik daerah mengingat urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan.

4.2.1. Arah Kebijakan/Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2025

Tahun 2025 merupakan Tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Pada 5 (lima) Tahun pertama yaitu Tahun 2025-2029 menjadi tahapan yang penting dalam RPJPN Tahun 2025-2045 untuk meletakkan dasar-dasar transformasi menjadi basis tingkat pertumbuhan pada tahapan berikutnya serta menjadi pemicu untuk *engine of growth* yang baru yaitu: industri biru, industri kreatif, bioteknologi, hilirisasi sampai dengan produk akhir, dan industri hijau.

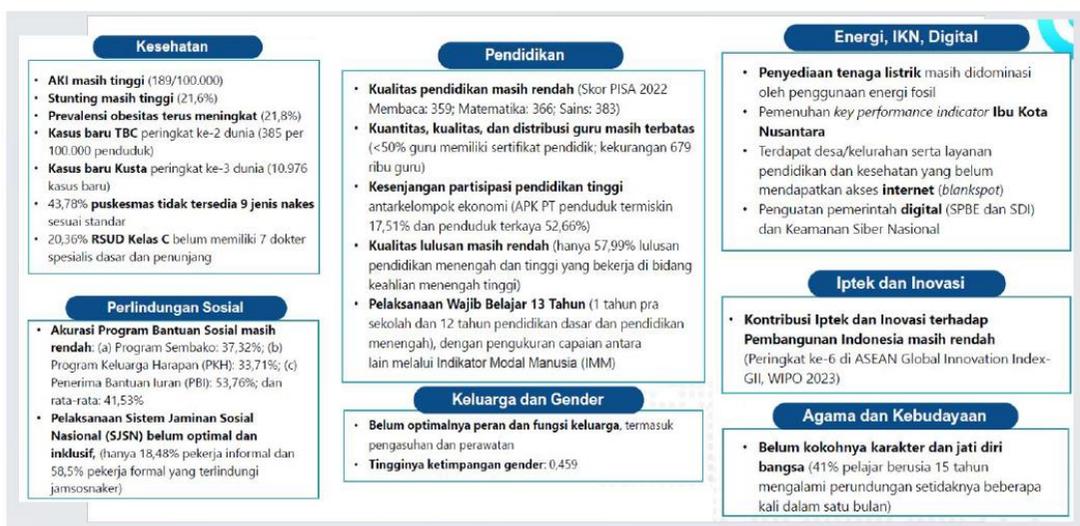
Sasaran visi pembangunan jangka menengah Tahun 2025-2029 adalah mewujudkan Indonesia sebagai **Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan** yang tercermin dalam 5 (lima) sasaran visi yaitu (1) pendapatan per kapita setara negara maju; (2) kemiskinan menuju 0 (nol) persen dan ketimpangan berkurang; (3) kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; (4) daya saing sumber daya manusia meningkat; serta (5) intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju Net Zero Emission. Kelima sasaran visi ini memiliki target sebagai berikut.



Sumber: Konsep Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029, 2024

Gambar 4. 3 Target Sasaran Visi Indonesia Emas menuju 2045

RKP 2025 menjadi pondasi strategis untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Hal ini menjadi penting karena Indonesia hingga saat ini masih mengalami tantangan multi dimensi yang membutuhkan penanganan secara holistik dengan melibatkan kolaborasi lintas sektor untuk menanganinya. Tantangan multi dimensi ini meliputi sektor kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, keluarga dan gender, energi, IKN, digital, IPTEK dan inovasi, serta agama dan kebudayaan sebagaimana ditunjukkan oleh gambar berikut.



Sumber: Kementerian Bappenas 2024

Gambar 4. 4 Tantangan Multi Dimensi RKP 2025

Berdasarkan dari permasalahan dan tantangan tersebut, tema RKP Tahun 2025 adalah **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif**

dan Berkelanjutan”. Dari tema pembangunan RKP Tahun 2025 tersebut, ditetapkan 8 (delapan) Prioritas Nasional (PN) yaitu

(1) Prioritas Nasional/PN 1, yaitu Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM), dengan Sasaran PN 1

berfokus pada upaya simultan yang ditujukan untuk memperkokoh ideologi pancasila, penguatan demokrasi, dan penegakan hak asasi manusia dengan mendorong peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia.

(2) Prioritas Nasional/PN 2, yaitu Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru, dengan Sasaran PN 2 sebagai berikut:

- a. Asia Power Index (*Military Capability*);
- b. Asia Power Index (*Diplomatic Influence*);
- c. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya;
- d. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU);
- e. Indeks Ketahanan Energi;
- f. Kapasitas tampungan air (m³/kapita);
- g. Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (persen);
- h. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (persen);
- i. Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global;
- j. Indeks Ekonomi Hijau;
- k. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer;
- l. Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (persen);
- m. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
- n. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- o. Persentase Penurunan Emisi GRK.

(3) Prioritas Nasional/PN 3, yaitu Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi, dengan Sasaran PN 3 sebagai berikut:

- a. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (persen);
- b. Rasio Kewirausahaan (persen);
- c. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (persen);

- d. Rasio PDB Pariwisata (persen);
- e. Devisa Pariwisata (miliar USD);
- f. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (persen);
- g. Aset Perbankan/PDB (persen);
- h. Aset Dana Pensiun/PDB (persen);
- i. Aset Asuransi/PDB (persen);
- j. Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (persen);
- k. Total Kredit/PDB (persen);
- l. Inklusi Keuangan (persen).

(4) Prioritas Nasional/PN 4, yaitu Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas, dengan Sasaran PN 4 sebagai berikut:

- a. Rata-rata nilai PISA (Membaca);
- b. Rata-rata nilai PISA (Matematika);
- c. Rata-rata nilai PISA (Sains);
- d. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 Tahun ke atas (Tahun);
- e. Harapan lama sekolah (Tahun);
- f. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (persen);
- g. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (persen);
- h. Pengeluaran Iptek dan Inovasi (persen PDB);
- i. Peringkat Indeks Inovasi Global;
- j. Tingkat Pengangguran Terbuka (persen);
- k. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (persen);
- l. Usia Harapan Hidup (Tahun);
- m. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup);
- n. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen);
- o. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk);
- p. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (persen);
- q. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK);
- r. Indeks Ketimpangan Gender (IKG).

Pemerintahan Prabowo-Gibran akan meluncurkan program Sekolah Rakyat sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial dalam pendidikan. Program ini bertujuan menyediakan akses pendidikan dasar hingga menengah yang berkualitas, gratis, inklusif, dan komprehensif bagi anak-

anak dari keluarga kurang mampu. Diharapkan Sekolah Rakyat menjadi katalisator pemutus rantai kemiskinan dan pencetak generasi penerus yang lebih cerdas, sehat, terampil, serta berdaya saing, guna mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Di Kabupaten Kuningan, Sekolah Rakyat rencananya akan dibangun di Desa Cikandang, Kecamatan Luragung, dengan luas 6,19 hektar, mencakup jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Melalui pendidikan berkualitas secara gratis dan komprehensif, anak-anak dari keluarga kurang mampu akan memperoleh bekal ilmu dan keterampilan yang memadai untuk masa depan lebih baik, sekaligus memutus siklus kemiskinan antargenerasi. Data keluarga kurang mampu akan bersumber dari DTSEN Dinsos. Sekolah Rakyat akan menanggung seluruh kebutuhan siswa, meliputi seragam, asrama, makan, peralatan sekolah, dan kebutuhan dasar lainnya. Hal ini bertujuan menghilangkan hambatan finansial yang kerap menjadi penyebab anak putus sekolah. Untuk Kabupaten Kuningan, program ini akan didukung anggaran sebesar Rp100 miliar dari APBN.

(5) Prioritas Nasional/PN 5, yaitu Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri, dengan Sasaran PN 5 sebagai berikut:

- a. Rasio PDB Industri Pengolahan (persen);
- b. Pembentukan Modal Tetap Bruto (persen PDB);
- c. Ekspor Barang dan Jasa (persen PDB);
- d. Biaya Logistik (persen PDB).

(6) Prioritas Nasional/PN 6, yaitu Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan, dengan Sasaran PN 6 sebagai berikut:

- a. Terbangunnya sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk (persen);
- b. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (persen);
- c. Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (persen);
- d. Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (persen);
- e. Persentase desa mandiri (persen);

- f. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (persen).

Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Kabupaten Kuningan kini memiliki panduan strategis yang lebih kuat untuk menanggulangi kemiskinan. Berbagai program yang sudah ada di Kabupaten Kuningan, seperti bantuan sosial dan pemberdayaan UMKM, akan diselaraskan dengan program nasional dan diperkuat dengan pemutakhiran data yang akurat untuk memastikan intervensi yang tepat sasaran, terutama dalam menghapus kemiskinan ekstrem melalui identifikasi presisi. Selain fokus ekonomi, Inpres ini mendorong intervensi holistik dengan memastikan akses penuh terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan layak, sanitasi, dan air bersih, serta peningkatan infrastruktur dasar di kantong-kantong kemiskinan. Pemerintah Kabupaten Kuningan berinovasi dan melibatkan berbagai pihak, seperti swasta (CSR) dan perguruan tinggi, dalam program penanggulangan kemiskinan. Penguatan kapasitas aparat daerah dan sistem monitoring serta evaluasi yang terintegrasi akan diperkuat untuk memastikan efektivitas program. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran dan kondisi geografis, Kuningan memiliki peluang besar dari potensi sektor pertanian dan pariwisata serta dukungan kuat dari pemerintah pusat dan sumber daya manusia yang siap diberdayakan.

(7) Prioritas Nasional/PN 7, yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan, dengan Sasaran PN 7 sebagai berikut:

- a. *Return on Asset* (ROA) BUMN (persen);
- b. Indeks Integritas Nasional;
- c. Indeks Materi Hukum;
- d. Indeks Pelayanan Publik;
- e. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- f. Indeks Persepsi Korupsi;
- g. Indeks Pembangunan Hukum;
- h. Rasio Perpajakan terhadap PDB (persen);

i. Tingkat Inflasi (persen).

(8) Prioritas Nasional/PN 8, yaitu Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur, dengan Sasaran PN 8 sebagai berikut:

- a. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK);
- b. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB);
- c. Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (persen).

4.2.2. Arah Kebijakan/Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Perumusan isu strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 disusun berdasarkan gambaran umum hasil evaluasi pelaksanaan dan permasalahan pembangunan Tahun 2025, maka ditetapkan 4 (empat) isu strategis pembangunan Jawa Barat dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
- b. Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan;
- c. Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan;
- d. Peningkatan Kehidupan Berdemokrasi serta Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah

Dengan mempertimbangkan isu strategis pembangunan, serta merujuk pada Tema RPJPD I (2025-2029), yaitu **“Penguatan Pondasi Transformasi Sosial, Ekonomi dan Tata Kelola”**, serta Tema RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026, yaitu “Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat”, maka Tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 adalah: **“Pemerataan Pembangunan Untuk Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Jawa Barat”**. Tema ini akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RPKD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

Berdasarkan hal yang disebutkan di atas serta kajian permasalahan dan isu strategis di Provinsi Jawa Barat, maka Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi (PPP) Jawa Barat Tahun 2025 adalah:

1. PPP 1 : Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya, dengan Sasaran PPP 1 sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pembangunan rendah Karbon dan menurunnya risiko bencana, dengan mendorong indikator Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (persen).
- b. Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan, dengan mendorong indikator (a) Skor Pola Pangan harapan (Poin), (b) Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (persen), dan (c) Nilai Tukar Petani (NTP) (Poin).
- c. Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja, dengan mendorong indikator (a) Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit (persen), (b) Tingkat Pengangguran Terbuka (persen), dan (c) Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (Triliun Rupiah).
- d. Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan, dengan mendorong indikator (a) Laju Pertumbuhan Sektor Industri (persen), dan (b) Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan (persen).
- e. Meningkatnya pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi makan dan minum, dengan mendorong indikator Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (persen).

2. PPP 2 : Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama, dengan Sasaran PPP 2 sebagai berikut:

- a. Meningkatnya akses pendidikan masyarakat, dengan mendorong indikator (a) Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun), dan (b) Harapan Lama Sekolah (Tahun).
- b. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pembangunan pemuda, dengan mendorong indikator (a) Indeks Perlindungan Anak, (b) Indeks Pembangunan Gender (Poin), dan (c) Indeks Pembangunan Pemuda (Poin).
- c. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah, dengan mendorong indikator Indeks Inovasi Daerah (Poin).

3. PPP 3 : Penguatan Sistem Kesehatan Daerah, dengan Sasaran PPP 3 sebagai berikut:

- a. Meningkatnya derajat kesehatan, dengan mendorong indikator Angka Harapan Hidup (Tahun).
 - b. Meningkatnya upaya percepatan penurunan stunting, dengan mendorong indikator Prevalensi Stunting (persen).
- 4. PPP 4: Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana**, dengan Sasaran PPP 4 sebagai berikut:
- a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan mendorong indikator Angka Harapan Hidup (Tahun).
 - b. Meningkatnya taraf hidup masyarakat, dengan mendorong indikator Pengeluaran Per Kapita (Rp 000).
 - c. Meningkatnya pemerataan pembangunan di wilayah Pedesaan, dengan mendorong indikator Indeks Desa Membangun (Poin).
- 5. PPP 5 : Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa**, dengan Sasaran PPP 5 sebagai berikut:
- a. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman, dengan mendorong indikator Persentase Rumah Tangga Hunian Layak (persen).
 - b. Meningkatnya pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan, dengan mendorong indikator Indeks Desa Membangun (Poin).
 - c. Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur, dengan mendorong indikator Tingkat Konektivitas (persen).
 - d. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, dengan mendorong indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin).
 - e. Meningkatnya kualitas infrastruktur, dengan mendorong indikator Indeks Kualitas Infrastruktur (Poin).
 - f. Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan menurunnya risiko bencana, dengan mendorong indikator (a) Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (persen), dan (b) Indeks Risiko Bencana (Poin).
- 6. PPP 6 : Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah**, dengan Sasaran PPP 6 sebagai berikut:
- a. Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk, dengan mendorong indikator Laju Pertumbuhan Penduduk (persen).

- b. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah, dengan mendorong indikator Indeks Reformasi Birokrasi (Poin).
- c. Meningkatnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi, dengan mendorong indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat.

4.2.3. Arah Kebijakan/Prioritas Pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2025

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Perumusan isu strategis Kabupaten Kuningan Tahun 2025 disusun berdasarkan gambaran umum hasil evaluasi pelaksanaan dan permasalahan pembangunan Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada Bab II, serta hasil penelaahan terhadap kebijakan strategis nasional dan provinsi Jawa barat. Berdasarkan hasil analisis secara komprehensif dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal serta mempertimbangkan isu strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 yaitu masih tingginya angka kemiskinan dan masih tingginya tingkat pengangguran, maka isu strategis untuk pembangunan Tahun 2025, yaitu:

1. Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan;
2. Masih tingginya angka pengangguran;
3. Masih rendahnya kompetensi dan daya saing ketenagakerjaan;
4. Masih tingginya kasus stunting, kematian bayi & kematian ibu;
5. Tantangan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
6. Belum optimalnya peningkatan potensi investasi daerah;
7. Belum optimalnya pemerataan pembangunan kewilayahan dan pemenuhan pelayanan infrastruktur dasar; dan
8. Tantangan perubahan iklim dan potensi bencana.

Dengan mempertimbangkan isu strategis pembangunan diatas, dan merujuk pada Tema RPJPD I (2025-2029) Kabupaten Kuningan yaitu **Meningkatkan Produktivitas dan Inovasi Pertanian, Pariwisata, dan SDM**, serta berdasarkan RPD Kabupaten Kuningan 2024-2026, maka

ditetapkan arah kebijakan pembangunan di Tahun 2025 yaitu **Penguatan Sektor Pertanian dan Pariwisata Berkelanjutan** dengan tema Pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2025 adalah:

“Mewujudkan Pemerataan Ekonomi dan Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah”.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan dan tema 2025 diatas, sektor pertanian dan pariwisata sebagai sektor unggulan akan didorong untuk meningkatkan produktivitas, diversifikasi dan olahan turunannya sehingga berkontribusi terhadap peningkatan PDRB. Dalam tatanan arah kebijakan Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Kuningan berada di Wilayah Pengembangan Ciayumajakuning. Tema pengembangan di wilayah ini adalah mendorong pengembangan wilayah gerbang timur Jawa Barat. Arah Kebijakan wilayah pengembangan Ciayumajakuning adalah pengembangan sektor unggulan: tanaman pangan dan hortikultura, agroforestri, agribisnis, agroindustri, perikanan, pertambangan dan pariwisata. Kabupaten Kuningan, diarahkan sebagai PKL, dengan sarana dan prasarana pendukung, serta diarahkan untuk menampung kegiatan sektor tanaman pangan dan hortikultura, wisata alam, agroindustri, dan daerah konservasi utama Taman Nasional Gunung Ciremai, termasuk perlindungan sumber air. Hal ini juga sejalan dengan Tujuan 2 RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 yaitu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan daerah dituangkan ke dalam 5 (Lima) Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2025. Prioritas pembangunan daerah tersebut disusun dengan menerapkan konsep THIS, yaitu 1) **Tematik** (disesuaikan dengan isu strategis dan tema pembangunan); 2) **Holistik** (menyelesaikan permasalahan secara komprehensif dari hulu sampai hilir; 3) **Integratif** (melibatkan berbagai Perangkat Daerah Provinsi dan terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota); dan 4) **Spasial** (mengacu pada kebijakan penataan ruang dan kebijakan kewilayahan). Kelima Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2025 meliputi:

PPD 1 : Peningkatan Pemerataan Pembangunan Daerah

PPD 2 : Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul

PPD 3 : Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif

PPD 4 : Peningkatan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif

PPD 5 : Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2025 diatas, dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 harus selaras juga dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dijelaskan sebelumnya dan arah kebijakan serta strategi Bupati Periode Tahun 2025-2030 yang tertuang dalam Ranhir RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029. Perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah merupakan langkah yang penting untuk menerjemahkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD ke dalam program-program pembangunan daerah sehingga tujuan dan sasaran RPJMD dapat dicapai secara terukur selama 5 (lima) tahun ke depan. Strategi dan arah kebijakan berisi rumusan perencanaan komprehensif tentang upaya Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk mencapai target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien.

Strategi dan arah kebijakan adalah kajian *grand design* perencanaan komprehensif tentang tahapan dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2025-2029 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dalam mencapai target dan sasaran. Strategi dan arah kebijakan disusun berdasarkan kajian, analisis dan evaluasi pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dengan berpedoman pada dokumen perencanaan provinsi dan nasional serta selaras dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kuningan periode 2025-2029.

Pilihan strategi tidak dapat dilepaskan dari nilai dan prinsip dasar pembangunan yang menjadi komitmen daerah, antara lain:

1. Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan jaminan sosial untuk semua;
2. Penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi unggulan dan peningkatan kompetensi SDM masyarakat;
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efisien, adaptif, berintegritas, inovatif, responsif dan transparan;
4. Penyelenggaraan transformasi tata kelola pemerintahan untuk penguatan ideologi, politik, integritas dan kondusifitas daerah;
5. Peningkatan pemahaman nilai-nilai budaya dan wawasan lingkungan;
6. Peningkatan pemerataan pembangunan wilayah yang berkeadilan;

7. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas dan merata;
8. Penguatan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.

Berdasarkan nilai dan prinsip tersebut, maka strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029 adalah Meningkatkan Produktivitas dan Inovasi Pertanian, Pariwisata, dan SDM.

Arah kebijakan pembangunan yang tepat akan berkontribusi terhadap percepatan pencapaian hasil dari sebuah proses pembangunan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029, yang akan dilaksanakan melalui 6 misi dan 8 tujuan, maka perlu dirumuskan arah kebijakan berdasarkan tahapan pembangunan tahunan. Tahapan pelaksanaan pembangunan merupakan sebuah mekanisme pemilihan fokus dan tema pembangunan pada masing-masing tahun perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan. Pentahapan pelaksanaan pembangunan bertujuan untuk memberikan tema, nuansa dan arah pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, yang kemudian akan diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah setiap tahunnya.

Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2045, tema atau fokus pembangunan pada tahap kesatu (Tahun 2025 – 2029) adalah **“Meningkatkan Produktivitas dan Inovasi Pertanian, Pariwisata, dan SDM**. Dan hal ini juga yang menjadi acuan dalam arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Kuningan, arah kebijakan disusun sebagai pedoman strategis yang terintegrasi, terukur, dan berorientasi pada hasil. Kebijakan ini diarahkan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan nilai-nilai utama yang terkandung dalam visi serta mendukung pencapaian tujuan yang termuat dalam misi.

Arah kebijakan difokuskan pada penguatan tata kelola yang efektif dan akuntabel, peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan teknologi, serta percepatan inovasi yang berkelanjutan. Di samping itu, pendekatan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi prinsip dasar dalam pelaksanaan kebijakan guna

memastikan terciptanya sinergi dan efisiensi dalam mencapai target-target strategis.

Dengan arah kebijakan yang terarah dan terpadu, diharapkan visi besar yang telah ditetapkan bukan hanya menjadi cita-cita, melainkan menjadi realitas yang terwujud melalui langkah-langkah strategis dan implementasi yang konsisten. Berikut ini merupakan arah kebijakan dari masing-masing misi Kabupaten Kuningan tahun 2025-2029.

Tabel 4. 3 Perumusan Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029

No	Misi	Arah Kebijakan	Keterangan
1	Misi 1: Percepatan Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Dan Professional Melalui Pemerintahan Modern Dan Melayani	Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital	
		Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	
		Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital melalui peningkatan utilisasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di sektor pemerintahan.	
		Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.	
		Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/ perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.	
		Penguatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	
		Pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.	
		Peningkatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko	
2	Misi 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pariwisata, Pertanian, Perdagangan Dan Jasa Maju Dengan Pemanfaatan Sumberdaya Lokal	Penyiapan kawasan strategis pertanian di wilayah Cimanuk-Cisanggarung dan Citanduy.	
		Penyiapan sentra pembibitan dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.	
		Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.	
		Pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan	
		Penataan dan penyiapan kelembagaan, pembiayaan koperasi bagi petani, nelayan dan petambak serta penguatan kolaborasi dengan market, bank, dan asuransi pertanian serta perikanan.	

No	Misi	Arah Kebijakan	Keterangan
		Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas Pertanian	
		Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.	
		Penataan dan penyiapan kelembagaan, pembiayaan koperasi bagi petani, nelayan, dan petambak serta penguatan kolaborasi dengan market, bank, dan asuransi pertanian serta perikanan.	
		Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri pariwisata, pengolahan hasil pertanian dan industri pengolahan primer lainnya padat modal dan padat karya	
		Penyediaan dan penataan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal	
		Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan, perdesaan dan kawasan strategis lainnya.	
		Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan dan perdesaan.	
		Peningkatan ketahanan bencana	
		Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i>	
		Pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah	
		Penataan dan pengembangan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet melalui penggelaran <i>fixed connection</i>	
		Pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana sistem transportasi public	
		Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik	
		Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.	
		Pengembangan sumber daya manusia dan para pelaku usaha di sektor pariwisata	
		Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa.	
		Pembangunan Jalan untuk konektivitas antar daerah pada wilayah Jawa Barat untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas: - Cirebon-Kuningan Ciamis.	

No	Misi	Arah Kebijakan	Keterangan
		<p>Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) nasional yang berdaya saing di tataran global.</p> <p>Penataan dan penyiapan instrumen kebijakan dan kelembagaan perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon, serta pembayaran berbasis kinerja (<i>result base payment</i>)</p> <p>Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi tepat guna.</p> <p>Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.</p> <p>Penataan dan restrukturisasi BUMD.</p>	
3	Misi 3: Membangun Daya Kreasi, Inovasi, Dan Produktivitas Masyarakat Berbasis Pemberdayaan (Empowering)	<p>Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia serta perlindungan anak, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.</p> <p>Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.</p> <p>Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i>.</p> <p>Penyediaan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata, pertanian dan ekonomi kreatif serta industri primer lainnya</p> <p>Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU, optimalisasi asset serta CSR</p>	
4	Misi 4: Menjaga Komitmen Kelestarian Sumberdaya Alam, Daerah Tangkapan Air Dan Mengurangi Emisi Lingkungan	<p>Penataan dan pengembangan sistem kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah</p> <p>Percepatan penetapan Revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) pada kawasan strategis</p> <p>Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan</p> <p>Penyediaan dan penataan basis data perencanaan, pengadaan dan pencadangan tanah pada lahan-lahan untuk proyek strategis/prioritas.</p> <p>Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri,</p>	

No	Misi	Arah Kebijakan	Keterangan
		pariwisata, sektor-sektor ekonomi hijau, dan energi baru dan terbarukan)	
		Perencanaan dan implementasi Reforma Agraria.	
		Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) nasional yang berdaya saing di tataran global.	
		Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim	
		Sinkronisasi periodisasi RPJPD, RPJMD dengan RTRW Kabupaten dan RDTR	
5	Misi 5: Penerapan Nilai-Nilai Agamis Dalam Kehidupan Berbudaya Dan Bermasyarakat	Peningkatan partisipasi pendidikan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)	
		Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi dan keunggulan daerah	
		Penguatan sekolah terbuka dan pesantren serta pengembangan sekolah berbasis asrama	
		Penyiapan dan peningkatan kurikulum pendidikan anak usia dini pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter digital literasi dan kondisi lokal daerah	
		Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan	
6	Misi 6: Pembangunan Yang Tangguh Dengan Orientasi Pada Layanan Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Untuk Penguatan Ketahanan Dan Modal Sosial	Penyiapan dan pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan	
		Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan	
		Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.	
		Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas	
		Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.	
		Penyiapan dan peningkatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting	
		Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang prima	
		Eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan	
		Peningkatan partisipasi pendidikan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)	

No	Misi	Arah Kebijakan	Keterangan
		Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah	
		Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/ vokasi berbasis kondisi lokal, potensi dan keunggulan daerah	
		Penguatan sekolah terbuka dan pesantren serta pengembangan sekolah berbasis asrama	
		Penyiapan dan peningkatan kurikulum pendidikan anak usia dini pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter <i>digital literacy</i> dan kondisi lokal daerah	
		Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan	
		Penataan dan pemenuhan infrastruktur layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital TIK	
		Penataan dan penguatan sistem penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan bantuan pembiayaan kesehatan bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi	
		Penataan dan penguatan sistem penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan bantuan pembiayaan kesehatan bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi	
		Penyiapan dan penataan <i>government induced activities</i> dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke daerah	
		Penataan dan pemenuhan penyediaan jaminan sosial seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua dan lainnya	
		Pengembangan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi	
		Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau dengan karakteristik wilayah	
		Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan/perdesaan	

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Selain berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kuningan yang telah ditetapkan pada RPD tahun 2023-2026 dan Ranhir RPJMD tahun 2025-2029 sesuai visi misi bupati terpilih, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kuningan pada Perubahan RKPD Tahun 2025, juga memperhatikan:

1. Prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi.

Persandingan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat serta prioritas pembangunan Kabupaten Kuningan sebagaimana dalam tabel 4.4;

2. Upaya penanganan permasalahan dan isu strategis
Sinkronisasi permasalahan, isu strategis dan program prioritas sebagaimana tersaji dalam tabel 4.5;
3. Upaya mendukung kebijakan Nasional antara lain Penerapan SPM, Pembangunan Berkelanjutan, dan Stunting yang akan dilaksanakan tahun 2025.

Tabel 4. 4 Penyandingan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Kuningan Tahun 2025 Memperhatikan Visi Misi Bupati Kuningan Tahun 2025-2029

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah Prov. Jabar	Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah Prov. Jabar	Prioritas Pembangunan Daerah Kab. Kuningan	Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kab. Kuningan	Visi Misi Bupati Kuningan Periode 2025-2030
	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan		Pemerataan Pembangunan Untuk Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Jawa Barat		Mewujudkan Pemerataan Ekonomi dan Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah		KUNINGAN MELESAT (MAJU, EMPOWERING, LESTARI, AGAMIS, TANGGUH)
PN.01 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia							
1	Memperkokoh ideologi pancasila, penguatan demokrasi, dan penegakan hak asasi manusia	1. Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat	PPP6: Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	PPD5: Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Penerapan Nilai-Nilai Agamis dalam Kehidupan Berbudaya dan Bermasyarakat
		2. Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	
PN.02 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru							
1	Keamanan siber, sandi, dan sinyal	Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama pada ranah siber dan area rentan	PPP6: Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	PPD5: Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Percepatan Reformasi Birokrasi yang Berintegritas, Dan Professional Melalui Pemerintahan Modern dan Melayani
		Fasilitasi business matchmaking startup digital		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		Program Aplikasi Informatika	

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah Prov. Jabar	Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah Prov. Jabar	Prioritas Pembangunan Daerah Kab. Kuningan	Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kab. Kuningan	Visi Misi Bupati Kuningan Periode 2025-2030
			PPP1: Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	Program Pengembangan UMKM	PPD1: Peningkatan Pemerataan Pembangunan Daerah	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pariwisata, Pertanian, Perdagangan dan Jasa Maju Dengan Pemanfaatan Sumberdaya Lokal
		Fasilitasi digital <i>technopreneur</i>	PPP6: Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	PPD5: Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Program Aplikasi Informatika	Percepatan Reformasi Birokrasi yang Berintegritas, Dan Professional Melalui Pemerintahan Modern dan Melayani
			PPP1: Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	Program Pengembangan UMKM	PPD1: Peningkatan Pemerataan Pembangunan Daerah	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pariwisata, Pertanian, Perdagangan dan Jasa Maju Dengan Pemanfaatan Sumberdaya Lokal
		Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian	PPP6: Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	PPD5: Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Program Aplikasi Informatika	Percepatan Reformasi Birokrasi yang Berintegritas, Dan Professional Melalui Pemerintahan Modern dan Melayani

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah Prov. Jabar	Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah Prov. Jabar	Prioritas Pembangunan Daerah Kab. Kuningan	Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kab. Kuningan	Visi Misi Bupati Kuningan Periode 2025-2030
			PPP1: Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	PPD4: Peningkatan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pariwisata, Pertanian, Perdagangan dan Jasa Maju Dengan Pemanfaatan Sumberdaya Lokal
2	Peningkatan kualitas lingkungan	Pembangunan tempat pembuangan sampah terpadu, tempat pengolahan sampah reduce-reuse-recycle, atau fasilitas pengolahan sampah lainnya	PPP5: Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	Program Pengelolaan Persampahan	PPD 2: Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul	Program Pengelolaan Sampah	Pembangunan yang Tangguh Dengan Orientasi pada Layanan Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Untuk Penguatan Ketahanan dan Modal Sosial
3	Swasembada pangan, energi, dan air	Peningkatan produktivitas hortikultura dan peternakan yang berkelanjutan	PPP1: Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	PPD4: Peningkatan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pariwisata, Pertanian, Perdagangan dan Jasa Maju Dengan Pemanfaatan Sumberdaya Lokal
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	PPD4: Peningkatan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pariwisata, Pertanian, Perdagangan dan Jasa Maju Dengan Pemanfaatan Sumberdaya Lokal

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah Prov. Jabar	Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah Prov. Jabar	Prioritas Pembangunan Daerah Kab. Kuningan	Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kab. Kuningan	Visi Misi Bupati Kuningan Periode 2025-2030
		Prasarana irigasi air tanah atau irigasi lainnya yang dibangun dari Waduk Kuningan (Daerah Irigasi Cileuweung)	PPP5: Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	PPD 2: Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Menjaga Komitmen Kelestarian Sumberdaya Alam, Daerah Tangkapan Air dan Mengurangi Emisi Lingkungan
		Prasarana air baku yang dibangun pada sistem penyediaan air minum Waduk Kuningan	PPP5: Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	PPD 2: Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pembangunan yang Tangguh Dengan Orientasi pada Layanan Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Untuk Penguatan Ketahanan dan Modal Sosial
		Sertifikat benih hortikultura di Kabupaten Kuningan	PPP1: Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	PPD4: Peningkatan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pariwisata, Pertanian, Perdagangan dan Jasa Maju Dengan Pemanfaatan Sumberdaya Lokal
PN. 03 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi							
1	Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur	Pengembangan Kertajati Aerocity	PPP5: Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	PPD 2: Pengembangan dan Percepatan Daya Saing	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pembangunan yang Tangguh Dengan Orientasi pada Layanan Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah Prov. Jabar	Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah Prov. Jabar	Prioritas Pembangunan Daerah Kab. Kuningan	Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kab. Kuningan	Visi Misi Bupati Kuningan Periode 2025-2030
			dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa		Daerah menuju Daerah Unggul		Untuk Penguatan Ketahanan dan Modal Sosial
		Penguatan produktivitas industri makanan dan minuman	PPP1: Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	PPD1: Peningkatan Pemerataan Pembangunan Daerah	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pariwisata, Pertanian, Perdagangan dan Jasa Maju Dengan Pemanfaatan Sumberdaya Lokal
		Penguatan produktivitas industri tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki	PPP1: Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	PPD1: Peningkatan Pemerataan Pembangunan Daerah	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pariwisata, Pertanian, Perdagangan dan Jasa Maju Dengan Pemanfaatan Sumberdaya Lokal
		Penguatan ekosistem film, animasi, visual arts, seni, budaya, kerajinan, kuliner, dan pemampu ekonomi kreatif	PPP1: Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PPD4: Peningkatan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pariwisata, Pertanian, Perdagangan dan Jasa Maju Dengan Pemanfaatan Sumberdaya Lokal

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah Prov. Jabar	Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah Prov. Jabar	Prioritas Pembangunan Daerah Kab. Kuningan	Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kab. Kuningan	Visi Misi Bupati Kuningan Periode 2025-2030
			Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya			Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Membangun Daya Kreasi, Inovasi, dan Produktivitas Masyarakat Berbasis Pemberdayaan (<i>Empowering</i>)
		Penguatan ekosistem pengembangan aplikasi dan game	PPP6: Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	PPD5: Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Program Aplikasi Informatika	Percepatan Reformasi Birokrasi yang Berintegritas, Dan Professional Melalui Pemerintahan Modern dan Melayani
		Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi	PPP6: Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	PPD5: Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Program Aplikasi Informatika	Percepatan Reformasi Birokrasi yang Berintegritas, Dan Professional Melalui Pemerintahan Modern dan Melayani
		Pembangunan jalan strategis di Jalan Lingkar Timur Selatan (Kab. Kuningan)	PPP5: Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	Program Penyelenggaraan Jalan	PPD 2: Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan yang Tangguh Dengan Orientasi pada Layanan Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Untuk Penguatan Ketahanan dan Modal Sosial

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah Prov. Jabar	Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah Prov. Jabar	Prioritas Pembangunan Daerah Kab. Kuningan	Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kab. Kuningan	Visi Misi Bupati Kuningan Periode 2025-2030
		Bendungan yang direhabilitasi/ditingkatkan kapasitasnya berupa pembangunan transmisi air baku	PPP1: Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	PPD 2: Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pembangunan yang Tangguh Dengan Orientasi pada Layanan Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Untuk Penguatan Ketahanan dan Modal Sosial
PN 04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas							
1	Memperkuat Pendidikan, Sains, dan Teknologi	Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal) dan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah/ sederajat	PPP2: Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama	Program Pengelolaan Pendidikan	PPD 3: Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif	Program Pengelolaan Pendidikan	Pembangunan yang Tangguh Dengan Orientasi pada Layanan Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Untuk Penguatan Ketahanan dan Modal Sosial
		Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor industri pengolahan	PPP2: Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	PPD 3: Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Pembangunan yang Tangguh Dengan Orientasi pada Layanan Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Untuk Penguatan Ketahanan dan Modal Sosial

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah Prov. Jabar	Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah Prov. Jabar	Prioritas Pembangunan Daerah Kab. Kuningan	Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kab. Kuningan	Visi Misi Bupati Kuningan Periode 2025-2030
		Percepatan penurunan ketimpangan gender, khususnya melalui pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan; pencegahan perkawinan anak, dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang, utamanya pada wilayah kantong pekerja migran	PPP2: Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	PPD 3: Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Membangun Daya Kreasi, Inovasi, dan Produktivitas Masyarakat Berbasis Pemberdayaan (<i>Empowering</i>)
				Program Perlindungan Perempuan	PPD 3: Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif	Program Perlindungan Perempuan	Membangun Daya Kreasi, Inovasi, dan Produktivitas Masyarakat Berbasis Pemberdayaan (<i>Empowering</i>)
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	PPD 3: Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Penerapan Nilai-Nilai Agamis dalam Kehidupan Berbudaya dan Bermasyarakat
				Program pemenuhan hak anak (PHA)	PPD 3: Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif	Program pemenuhan hak anak (PHA)	Membangun Daya Kreasi, Inovasi, dan Produktivitas Masyarakat Berbasis Pemberdayaan (<i>Empowering</i>)
				Program perlindungan khusus anak	PPD 3: Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif	Program perlindungan khusus anak	Membangun Daya Kreasi, Inovasi, dan Produktivitas Masyarakat Berbasis Pemberdayaan (<i>Empowering</i>)
		Peningkatan kapasitas layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak di RS di kabupaten/kota	PPP3: Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	PPD 3: Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pembangunan yang Tangguh Dengan Orientasi pada Layanan Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Untuk Penguatan Ketahanan dan Modal Sosial
						Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Pembangunan yang Tangguh Dengan Orientasi pada Layanan Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah Prov. Jabar	Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah Prov. Jabar	Prioritas Pembangunan Daerah Kab. Kuningan	Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kab. Kuningan	Visi Misi Bupati Kuningan Periode 2025-2030
		Fasilitasi literasi digital	PPP6: Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	PPD5: Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Program Aplikasi Informatika	Untuk Penguatan Ketahanan dan Modal Sosial Percepatan Reformasi Birokrasi yang Berintegritas, Dan Professional Melalui Pemerintahan Modern dan Melayani
2	Memperkuat Sistem Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Penurunan kematian ibu dan bayi	PPP3: Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	PPD 3: Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pembangunan yang Tangguh Dengan Orientasi pada Layanan Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Untuk Penguatan Ketahanan dan Modal Sosial
						Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Pembangunan yang Tangguh Dengan Orientasi pada Layanan Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Untuk Penguatan Ketahanan dan Modal Sosial
		Pembangunan kualitas keluarga	PPP2: Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama	Program Pengendalian Penduduk	PPD 3: Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif	Program Pengendalian Penduduk	Membangun Daya Kreasi, Inovasi, dan Produktivitas Masyarakat Berbasis Pemberdayaan (<i>Empowering</i>)
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	PPD 3: Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Membangun Daya Kreasi, Inovasi, dan Produktivitas Masyarakat Berbasis Pemberdayaan (<i>Empowering</i>)

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah Prov. Jabar	Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah Prov. Jabar	Prioritas Pembangunan Daerah Kab. Kuningan	Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kab. Kuningan	Visi Misi Bupati Kuningan Periode 2025-2030
				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	PPD 3: Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Membangun Daya Kreasi, Inovasi, dan Produktivitas Masyarakat Berbasis Pemberdayaan (<i>Empowering</i>)
PN 05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri							
1	Pengembangan hilirisasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru	Penguatan industri kimia dasar dan logam dasar	PPP1: Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	Program perencanaan dan pembangunan industri	PPD 2: Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul	Program perencanaan dan pembangunan industri	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pariwisata, Pertanian, Perdagangan dan Jasa Maju Dengan Pemanfaatan Sumberdaya Lokal
		Hilirisasi industri kelapa	PPP1: Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	PPD1: Peningkatan Pemerataan Pembangunan Daerah	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pariwisata, Pertanian, Perdagangan dan Jasa Maju Dengan Pemanfaatan Sumberdaya Lokal
2	Penguatan industri padat karya berkelanjutan, industri dasar, dan industri strategis nasional	Pengembangan industri kimia hilir dan farmasi	PPP1: Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan	Program perencanaan dan pembangunan industri	PPD 2: Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul	Program perencanaan dan pembangunan industri	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pariwisata, Pertanian, Perdagangan dan Jasa Maju Dengan Pemanfaatan Sumberdaya Lokal

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah Prov. Jabar	Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah Prov. Jabar	Prioritas Pembangunan Daerah Kab. Kuningan	Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kab. Kuningan	Visi Misi Bupati Kuningan Periode 2025-2030
			Kerja Seluas-luasnya				
		Pengembangan industri alat angkut termasuk <i>electric vehicle</i> dan kedirgantaraan	PPP1: Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	Program perencanaan dan pembangunan industri	PPD 2: Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul	Program perencanaan dan pembangunan industri	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pariwisata, Pertanian, Perdagangan dan Jasa Maju Dengan Pemanfaatan Sumberdaya Lokal
		Pengembangan industri elektronik dan digital	PPP1: Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	Program perencanaan dan pembangunan industri	PPD 2: Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul	Program perencanaan dan pembangunan industri	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pariwisata, Pertanian, Perdagangan dan Jasa Maju Dengan Pemanfaatan Sumberdaya Lokal
						Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pariwisata, Pertanian, Perdagangan dan Jasa Maju Dengan Pemanfaatan Sumberdaya Lokal
PN 06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan							

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah Prov. Jabar	Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah Prov. Jabar	Prioritas Pembangunan Daerah Kab. Kuningan	Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kab. Kuningan	Visi Misi Bupati Kuningan Periode 2025-2030
1	Pemerataan ekonomi	Pengembangan sistem perumahan publik yang terpadu dengan layanan infrastruktur dasar perkotaan dan disertai dengan penguatan tata kelola	PPP5: Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	Program Pengembangan Perumahan	PPD 2: Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan yang Tangguh Dengan Orientasi pada Layanan Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Untuk Penguatan Ketahanan dan Modal Sosial
		Peremajaan kota (<i>urban renewal</i>) secara inklusif dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh	PPP5: Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	Program Kawasan Permukiman	PPD 2: Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul	Program Kawasan Permukiman	Pembangunan yang Tangguh Dengan Orientasi pada Layanan Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Untuk Penguatan Ketahanan dan Modal Sosial
PN 07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan							
1	Membangun <i>Single Identity Number</i> dan Sistem Informasi Administrasi dan Data Base	Pengembangan pelayanan terpadu satu pintu daerah berbasis <i>online single submission</i> dan mal pelayanan publik digital	PPP6: Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	PPD5: Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Program Aplikasi Informatika	Percepatan Reformasi Birokrasi yang Berintegritas, Dan Professional Melalui Pemerintahan Modern dan Melayani

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah Prov. Jabar	Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah Prov. Jabar	Prioritas Pembangunan Daerah Kab. Kuningan	Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kab. Kuningan	Visi Misi Bupati Kuningan Periode 2025-2030
	Kependudukan untuk mencegah identitas ganda, mencegah penyalahgunaannya, dan memudahkan pelacakan aset, pajak, maupun persoalan Nomor Induk Kependudukan Ganda pada Daftar Pemilih Tetap di dalam Pemilu				PPD 2: Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Percepatan Reformasi Birokrasi yang Berintegritas, Dan Professional Melalui Pemerintahan Modern dan Melayani
PN 08. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur							
1	Masyarakat adil, makmur, dan harmonis	Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan	PPP4: Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Program Penanggulangan Bencana	PPD 2: Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul	Program Penanggulangan Bencana Program Penanganan Bencana	Menjaga Komitmen Kelestarian Sumberdaya Alam, Daerah Tangkapan Air dan Mengurangi Emisi Lingkungan Menjaga Komitmen Kelestarian Sumberdaya Alam, Daerah Tangkapan Air dan Mengurangi Emisi Lingkungan

Berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ, tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka pada Perubahan RKPD Kabupaten Kuningan telah menyelaraskan dengan visi, misi serta prioritas pembangunan dan program unggulan Kepala Daerah periode 2025-2030. Ada 10 Program Unggulan – Melesat Tahun 2025-2029 yaitu:

- 1. NGAJI DIRI** (Nyaah ka Santri, ka Guru Ngaji dan Pesantren Mandiri)
Target: Bantuan Air Bersih dan Sanitasi ke 100 Pesantren, Beasiswa Santri 5.000 orang, Insentif Guru Ngaji 1.000 orang.
- 2. GEMA SADULUR** (Gerakan Bersama Ngariksa Kaum Dhuafa, Lanjut Usia dan Pengangguran)
Target: Bantuan Sosial 25.000 Paket, Bursa Kerja 10.000 lowongan kerja, Rutilahu 1.000 paket (Pusat & Daerah).
- 3. JAWARA TANI** (Jaringan Irigasi Walatra Cai Tani Mukti)
Target Pemeliharaan dan Pembangunan 500 Unit Irigasi, Optimalisasi Subsidi Pupuk (Pusat& Daerah), Insentif Petani Muda.
- 4. SOMEAH KA SEMAH** (Sistem Online Modern, Efesien dan Mudah untuk Buka Investasi Ramah Lingkungan)
Target: 500 Investor Baru, 10 RDTR Wilayah Unggulan.
- 5. PERTAMA** (Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Mapan dan Paripurna)
Target: RLS 9 Tahun, Rehab Kelas 1.000 unit, RKB 500 unit, Prevalensi Stunting dibawah 10%.
- 6. NATA DAYA** (Menata Alun-Alun Desa untuk Pusat Ekonomi dan Daya Tarik Wisata)
Target: 100 Alun- Alun Sentra Ekonomi dan Wisata Desa
- 7. TATAPAKAN JATI** (Tanam Tanah Pakarangan Jaga dan Tekan Inflasi)
Target: Produksi Cabe dan Bawang 32 Kecamatan.
- 8. AJEG TIMBANGAN** (APBD Terjaga, Tepat Sasaran dan Berimbang)
Target: Optimasilasi PAD, Belanja Selektif dan Sinergi Perencanaan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
- 9. PASAR RAYA** (Pemberdayaan Sanggar Ekraf dan Usaha Rakyat)
Target: Sanggar Ekraf di 32 Kec IRT untuk 1.000 UMKM.
- 10. ABDI NAGARA** (ASN dan Birokrasi Daerah Modern, Gerak Cepat dan Ramah Melayani)

Target: Nilai RB Baik, Nilai SAKIP Baik, WTP

Selain Program Unggulan diatas, Perubahan RKPD 2025 juga didasarkan pada Program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Periode 2025-2030 yang beberapa programnya diantaranya:

1. 100 Km Jalan Mulus;
2. Jaringan Irigasi untuk Pertanian;
3. 100 Sambungan Air Minum Gratis untuk pesantren dan masyarakat miskin;
4. GEMA SADULUR (Gerakan Masyarakat Ngariksa Dhuafa, Lansia dan Pengangguran);
5. Rutilahu;
6. Bursa Talenta, Job Fair 1000 Loker;
7. UMKM Melesat;
8. BERNAS: Benih untuk Rakyat Meningkatkan Produktivitas;
9. BANG PUPUK: Bantuan Gapoktan untuk Penebusan Pupuk;
10. Demplot Konservasi Pengembangan Bioprospeksi;
11. SATU JAM SAJA, pelayanan dokumen kependudukan;
12. Telpon 112, *hotline service*;
13. KUSAPPA, Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
14. Sekolahku Keren (Pagiku cerahku, Rumah Guru, *English Day*, Mulok Ciremai, Rehab Ruang Kelas);
15. Medigital, Layanan Antrian Digital;
16. BPJS Gratis untuk Ibu Hamil, Anak, dan Lansia;
17. PNS Berintegritas;
18. Gas Poll: Tugas Tuntas, TPP Pol;
19. Kuda Kami Melesat, Satu Data Terintegrasi dan Pengamanan Web Pemda;
20. Ngopo Pagi (Ngobrol Bareng Bupati untuk Gali Informasi);
21. SI DEWI BANGUN PAGI – Aksi Peduli Desa Wisata untuk Membangun Pariwisata yang Bersinergi;
22. SAPUKU – Solusi Atasi Permasalahan Sampah Urban Kuningan;
23. TRIAS – Tiga kali Ritasi Angkut Sampah;
24. Taman MASAGI (Tanam di Halaman Mitra Sinergi Jaga Inflasi);
25. Operasionalisasi MASAGI Mart dan MASAGI Online;
26. Penanganan Desa Rentan Pangan;
27. PASUKAN PAUS (Penebaran Seratus Ribu Benih Ikan di Perairan Umum dan Sekitarnya);

Berdasarkan program unggulan diatas, keselarasan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah untuk mendukung program unggulan Bupati Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.5 dibawah ini.

Tabel 4. 5 Arah Kebijakan, Prioritas Pembangunan dan Program Unggulan Bupati Kuningan untuk Tahun 2025

No	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan	Program Unggulan	Aktivitas/Target
1	Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital melalui peningkatan utilisasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di sektor pemerintahan	Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	ABDI NEGARA (ASN dan Birokrasi Daerah Modern, Gerak Cepat dan Ramah Melayani)	Nilai RB Baik, Nilai SAKIP Baik, WTP
2	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.	Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien		
3	Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.	Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien		
4	Pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.	Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	AJEG TIMBANGAN (APBD Terjaga, Tepat Sasaran dan Berimbang)	Optimasilasi PAD, Belanja Selektif dan Sinergi Perencanaan Kabupaten, Provinsi dan Nasional
5	Peningkatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko	Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien		
6	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas Pertanian	Peningkatan Pemerataan Pembangunan Daerah	JAWARA TANI (Jaringan Irigasi Walatra Cai Tani Mukti)	Pemeliharaan dan Pembangunan 500 Unit Irigasi, Optimalisasi Subsidi Pupuk (Pusat& Daerah), Insentif Petani Muda
7	Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis	Peningkatan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif		
8	Penataan dan penyiapan kelembagaan, pembiayaan koperasi bagi petani, nelayan dan petambak serta penguatan kolaborasi dengan market, bank, dan asuransi pertanian serta perikanan	Peningkatan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif		
9	Pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Peningkatan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif	TATAPAKAN JATI (Tanam Tanah Pakarangan Jaga dan Tekan Inflasi)	Produksi Cabe dan Bawang 32 Kecamatan
10	Penyiapan sentra pembibitan dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai	Peningkatan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif		

No	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan	Program Unggulan	Aktivitas/Target
	tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global			
11	Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.	Peningkatan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif	NATA DAYA (Menata Alun-Alun Desa untuk Pusat Ekonomi dan Daya Tarik Wisata)	100 Alun- Alun Sentra Ekonomi dan Wisata Desa
12	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi tepat guna.	Peningkatan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif	PASAR RAYA (Pemberdayaan Sanggar Ekraf dan Usaha Rakyat)	Sanggar Ekraf di 32 Kec IRT untuk 1.000 UMKM
13	Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.	Peningkatan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif		
14	Percepatan penetapan Revisi Perda rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) pada kawasan strategis	Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul	SOMEAH KA SEMAH (Sistem Online Modern, Efisien dan Mudah untuk Buka Investasi Ramah Lingkungan)	500 Investor Baru, 10 RDTR Wilayah Unggulan
15	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri, pariwisata, sektor-sektor ekonomi hijau, dan energi baru dan terbarukan)	Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul		
16	Penguatan sekolah terbuka dan pesantren serta pengembangan sekolah berbasis asrama	Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif	NGAJI DIRI (Nyaah ka Santri, ka Guru Ngaji dan Pasantren Mandiri)	Bantuan Air Bersih dan Sanitasi ke 100 Pesantren, Beasiswa Santri 5.000 orang, Insentif Guru Ngaji 1.000 orang
17	Pengembangan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi	Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul		
18	Peningkatan partisipasi pendidikan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)	Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif	PERTAMA (Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Mapan dan Paripurna)	RLS 9 Tahun, Rehab Kelas 1.000 unit, RKB 500 unit, Prevalensi Stunting dibawah 10%
19	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana	Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif		

No	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan	Program Unggulan	Aktivitas/Target
	transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah			
20	Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan	Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif		
21	Penataan dan penguatan sistem penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan bantuan pembiayaan kesehatan bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi	Peningkatan Pemerataan Pembangunan Daerah	Gema SADULUR Gerakan Bersama Ngariksa Kaum Dhuafa, Lanjut Usia dan Pengangguran	Bantuan Sosial 25.000 Paket, Bursa Kerja 10.000 lowongan kerja, Rutilahu 1.000 paket (Pusat & Daerah)
22	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau dengan karakteristik wilayah	Peningkatan Pemerataan Pembangunan Daerah		

Sumber: Hasil Analisis Bappeda (2025)

Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan telah menetapkan arah kebijakan pembangunan tahun 2025 yang berfokus pada transformasi tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan daya saing wilayah, pemerataan pembangunan, dan pengembangan ekonomi lokal. Arah kebijakan ini diterjemahkan dalam prioritas pembangunan yang disusun secara terstruktur dan ditopang oleh program unggulan kepala daerah. Keseluruhan strategi ini menunjukkan keselarasan antara perencanaan strategis daerah dengan kebutuhan riil masyarakat serta dinamika pembangunan nasional.

Transformasi tata kelola pemerintahan menjadi pilar utama dalam prioritas “Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien”. Beberapa langkah strategis yang dilakukan meliputi digitalisasi layanan publik, penataan kelembagaan yang adaptif, serta pengembangan sistem meritokrasi bagi ASN. Program unggulan seperti ABDI NEGARA diarahkan untuk menciptakan birokrasi yang profesional, gesit, dan ramah layanan. Selain itu, program AJEG TIMBANGAN menekankan pentingnya tata kelola keuangan daerah yang sehat dan sinergi perencanaan lintas tingkatan pemerintahan, melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja daerah yang selektif.

Di sisi lain, prioritas “Peningkatan Pemerataan Pembangunan Daerah” diimplementasikan melalui program-program berbasis kebutuhan dasar masyarakat, terutama pada sektor pertanian dan kesejahteraan sosial. Program JAWARA TANI merupakan inovasi dalam penyediaan jaringan irigasi, subsidi pupuk, dan pemberian insentif bagi petani muda. Sementara itu, program GEMA SADULUR fokus pada perlindungan kelompok rentan melalui bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta perbaikan rumah tidak layak huni. Upaya ini diperkuat dengan program penyediaan rumah layak huni yang sesuai dengan karakteristik wilayah.

Untuk memperkuat basis ekonomi daerah, kebijakan pembangunan difokuskan pada prioritas “Peningkatan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif”. Langkah-langkah konkret diantaranya adalah

penguatan sektor pertanian melalui pengendalian kawasan pertanian berkelanjutan yang didukung oleh program TATAPAKAN JATI, serta pengembangan produk unggulan lokal untuk menekan inflasi. Di sektor pariwisata, program NATA DAYA berupaya mengembangkan alun-alun desa sebagai sentra ekonomi dan daya tarik wisata berbasis kultural. Pemerintah juga mendorong industrialisasi berbasis ekonomi rakyat melalui program PASAR RAYA yang menyasar UMKM dan sanggar ekonomi kreatif di seluruh kecamatan.

Selanjutnya, prioritas “Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah” menitikberatkan pada pembenahan regulasi dan kemudahan investasi. Pemerintah mendorong percepatan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di kawasan strategis, yang diwujudkan melalui program SOMEAH KA SEMAH. Reformasi regulasi ini diperkuat dengan pemberian insentif fiskal dan nonfiskal bagi investasi ramah lingkungan, terutama di sektor-sektor ekonomi hijau, pertanian, energi terbarukan, dan pariwisata. Arah kebijakan ini memperlihatkan keberpihakan pemerintah terhadap penciptaan iklim usaha yang inklusif dan berkelanjutan.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas penting yang dituangkan dalam “Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif”. Program NGAJI DIRI merupakan bentuk keberpihakan pada dunia pesantren melalui pemberian bantuan sanitasi, beasiswa santri, dan insentif guru ngaji. Sementara itu, program PERTAMA ditujukan untuk memperkuat layanan dasar pendidikan dan kesehatan melalui peningkatan angka rata-rata lama sekolah, rehabilitasi fasilitas pendidikan, serta penurunan prevalensi stunting. Pemerintah juga memprioritaskan pembangunan sarana pendidikan dan transportasi khusus bagi siswa di wilayah terpencil serta penguatan layanan kesehatan primer dan rujukan.

Secara keseluruhan, arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2025 menunjukkan keterpaduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Integrasi antara program

unggulan dengan target-target strategis menjadikan pembangunan lebih terarah, terukur, dan inklusif. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada output administratif, tetapi juga menysasar pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan penguatan daya saing daerah. Dengan sistematika yang jelas dan fokus yang tepat, kebijakan pembangunan ini diharapkan mampu mewujudkan Kuningan sebagai daerah yang maju, berkeadilan, dan mandiri.

4.2.3.1 Penanganan Isu Strategis berdasarkan Evaluasi Kinerja Pembangunan sampai dengan TW I Tahun 2025

Isu strategis yang muncul pada saat evaluasi capaian kinerja Triwulan I tahun 2025 perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah pemantapan arah kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan pada RKPD 2025. Langkah yang perlu dilaksanakan adalah dengan sinkronisasi isu strategis, penetapan prioritas pembangunan dan penentuan program-program yang akan mendukung pencapaian penanganan isu strategis.

Pada awal tahun 2025, proses pengumpulan dan pengolahan data kinerja pembangunan masih berlangsung. Hingga saat ini, data kinerja pembangunan untuk Triwulan I Tahun 2025 belum sepenuhnya tersedia atau terhitung secara komprehensif. Apabila dilihat secara analisis kinerja pada triwulan I yang masih sangat kecil realisasi anggaran, capaian kinerja pembangunan pada triwulan 1 tahun 2025 kenaikannya masih sama atau tidak terlalu jauh dari capaian tahun 2024. Kecilnya realisasi anggaran pada awal tahun ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain proses administrasi yang masih berjalan, kebijakan anggaran yang baru disesuaikan dengan visi misi Bupati baru Periode 2025-2030, dan adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Pemerintah daerah mengambil langkah efisiensi anggaran sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan fiskal dan meningkatkan efektivitas belanja daerah. Kebijakan ini dilakukan dengan memperketat alokasi pada kegiatan yang dianggap kurang prioritas serta menunda

beberapa kegiatan yang belum mencapai tahap siap laksana. Dengan demikian, meskipun serapan anggaran pada Triwulan I terlihat rendah, hal ini merupakan konsekuensi dari penerapan efisiensi yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran memiliki dampak pembangunan yang maksimal.

Selain itu, Triwulan I umumnya merupakan fase awal dalam siklus anggaran, di mana proses persiapan, perencanaan teknis, dan administrasi masih berlangsung. Oleh karena itu, realisasi anggaran yang rendah pada periode ini juga sejalan dengan pola belanja tahunan yang biasanya baru meningkat pada triwulan-triwulan berikutnya. Kebijakan efisiensi ini juga mencerminkan upaya pemerintah dalam memastikan bahwa penggunaan anggaran benar-benar mendukung program prioritas dan tidak terjadi pemborosan, serta mendukung program Bupati pada Tahun 2025, terutama dalam pencapaian program 100 hari kerja Bupati.

Pemerintah daerah menyadari bahwa dalam kondisi realisasi anggaran yang rendah pada Triwulan I, perlu ada langkah konkret untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan pada triwulan berikutnya. Untuk itu, beberapa upaya telah dilakukan, seperti mempercepat proses lelang dan penyusunan dokumen teknis agar pelaksanaan kegiatan dapat dimulai lebih awal. Selain itu, dilakukan pula optimalisasi monitoring dan evaluasi agar program yang telah berjalan dapat segera dilanjutkan tanpa hambatan birokrasi.

Di samping itu, efisiensi anggaran juga diterapkan melalui program optimalisasi belanja, termasuk pengurangan belanja non-prioritas dan pengalihan dana ke sektor yang lebih produktif. Pemerintah tetap menjaga keseimbangan antara penghematan fiskal dan keberlanjutan program pembangunan agar tidak menghambat pencapaian target tahunan.

Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran ini, meskipun capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025 tidak mengalami peningkatan yang signifikan, pemerintah daerah tetap optimis bahwa pada triwulan-

triwulan berikutnya akan terjadi percepatan serapan anggaran dan peningkatan capaian pembangunan. Hal ini dimungkinkan melalui perbaikan tata kelola anggaran dan percepatan implementasi program yang telah direncanakan dengan lebih matang. Diharapkan, upaya efisiensi yang dilakukan sejak awal tahun akan menghasilkan alokasi anggaran yang lebih tepat guna dan meningkatkan kualitas pembangunan secara berkelanjutan.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD dapat dikelompokkan pada penanganan isu-isu startegis pembangunan, seperti: Pemulihan Ekonomi, Pengurangan Pengangguran, serta Peningkatan Daya Beli. Sehingga, mudah untuk mengidentifikasi program/kegiatan yang mendukung pencapaian target-target pembangunan.

4.2.3.2. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2025 untuk mendukung Kebijakan Nasional

Prioritas pembangunan Kabupaten Kuningan tahun 2025 juga berkorelasi dengan Strategi Nasional antara lain Penurunan Stunting, Standar Pelayanan Minimal, *Sustainable Development Goal's (SDG's)*, penanggulangan kemiskinan, serta aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam Musrenbang.

1. Kebijakan Penurunan Stunting

Antisipasi Generasi Stunting Guna Mencapai Indonesia Emas 2045, merupakan salah satu kebijakan yang diadopsi pada perencanaan pembangunan pada tahun 2025. Sinkronisasi program dan kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam upaya penurunan stunting dilaksanakan dalam proses perencanaan Pembangunan. Hal ini merupakan perwujudan peran pemerintah daerah dalam ikut serta dalam penurunan stunting, yang terdiri dari:

- 1) Menyiapkan kebijakan berkaitan dengan penurunan stunting;
- 2) Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal secara Maksimal;
- 3) Menetapkan target percepatan penurunan stunting untuk

mendukung pencapaian target nasional;

- 4) Menetapkan program dan kegiatan terkait penurunan stunting, dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
- 5) Meningkatkan alokasi dan efektifitas penggunaan dana desa untuk penurunan stunting;
- 6) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penurunan stunting;
- 7) Untuk Penurunan Stunting Pemda melaksanakan 8 aksi konvergensi;
- 8) Melibatkan peran multisektor termasuk non pemerintahan dalam upaya penurunan stunting.

Sebagai salah satu bentuk penguatan integrasi perencanaan daerah terhadap implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan merujuk Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8476/SJ tentang Hasil Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Percepatan Penurunan Stunting di Daerah, maka dalam perubahan RKPD tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Kuningan tetap mengalokasikan perencanaan terkait hal tersebut. Perpres ini masih menjadi payung hukum bagi Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Penurunan Stunting yang telah diluncurkan dan dilaksanakan sejak tahun 2018. Perpres ini juga untuk memperkuat kerangka intervensi yang harus dilakukan dan kelembagaan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting.

Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting 13,5% di tahun 2025 dan 5 % di tahun 2045. Upaya pencapaian target tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan lima (5) pilar. Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yang meliputi:

- a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
- b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
- c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif

- di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
- d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan rencana aksi nasional menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting melakukan:

- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia

Pada tahun 2025, untuk mendukung target penurunan stunting tersebut, perencanaan pembangunan Kabupaten Kuningan menerapkan strategi pada upaya menurunkan gizi buruk melalui gerakan masyarakat hidup sehat, peningkatan sarana pelayanan gizi masyarakat, pemberian dan perawatan pada kasus gizi buruk, peningkatan cakupan bayi dengan ASI eksklusif serta kerjasama lintas sektoral untuk penanganan stunting.

Prevalensi Stunting pada Balita menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan pada bidang Kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi untuk penanganan Stunting dilakukan dengan berbagai inovasi penanganan stunting.

Perencanaan yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan kegiatan lintas sektoral menjadi salah satu wujud keterlibatan Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam penanganan stunting guna mendukung Percepatan Penurunan Stunting secara nasional. Adapun program-program pendukung pencapaian target tersebut adalah:

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 4) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
- 5) Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
- 6) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
- 7) Program Pemberdayaan Sosial;
- 8) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- 9) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- 10) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
- 11) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
- 12) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Program pembangunan daerah Tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten, terdiri atas Urusan Wajib sebagai urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah kabupaten yang berkaitan dengan pelayanan dasar, serta Urusan Pilihan sebagai urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah. Untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2025 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial serta beberapa prioritas lainnya.

3. Dukungan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Dukungan program daerah RKPD Tahun 2025 terhadap arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan (SDG's) dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut.

Tabel 4. 6 Program Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan Arah Kebijakan Pengarusutamaan (Mainstreaming) Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	Program Pembangunan Daerah
Aspek I: Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	
Tujuan 1: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun	
<p>1.2 Pada Tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi.</p> <p>1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada Tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.</p> <p>1.4 Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.</p> <p>1.5 Pada Tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana</p>	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Program Pemberdayaan Sosial
	Program Rehabilitasi Sosial
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
	Program Kawasan Permukiman
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
Tujuan 2: Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosika pertanian berkelanjutan	

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	Program Pembangunan Daerah
<p>2.1 Pada Tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi.</p> <p>2.2 Pada Tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada Tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 Tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.</p> <p>2.3 Pada Tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian.</p> <p>2.4 Pada Tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.</p> <p>2.5 Pada Tahun 2021, mengelola keragaman genetik benih tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pertanian</p>	<p>Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan</p> <p>Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat</p> <p>Program Pengawasan Keamanan Pangan</p> <p>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</p> <p>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</p> <p>Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</p> <p>Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</p> <p>Program Perizinan Usaha Pertanian</p> <p>Program Penyuluhan Pertanian</p> <p>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</p> <p>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</p> <p>Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</p> <p>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</p> <p>Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</p>
<p>Tujuan 3: Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia</p>	
<p>3.1 Pada Tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.</p> <p>3.2 Pada Tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita per 1000.</p>	<p>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <p>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</p> <p>Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman</p> <p>Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</p> <p>Program Rehabilitasi Sosial</p>

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	Program Pembangunan Daerah
<p>3.3 Pada Tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.</p> <p>3.4 Pada Tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.</p> <p>3.7 Pada Tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.</p> <p>3.8 Pada Tahun 2030, Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.</p>	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
	Program Penanganan Kerawanan Pangan
	Program Pengawasan Keamanan Pangan
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
	Program Penanggulangan Bencana
<p>Tujuan 4: Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua</p>	
<p>4.1 Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.</p> <p>4.2 Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.</p> <p>4.3 Pada Tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.</p> <p>4.5 Pada Tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.</p> <p>4.6 Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik</p>	Program Pembinaan Perpustakaan
	Program Pengelolaan Pendidikan
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
	Program Rehabilitasi Sosial
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Program Pendidik dan Tenaga Pendidikan
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Program Pengembangan Kurikulum

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	Program Pembangunan Daerah
laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	
Tujuan 5: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak Perempuan	
<p>5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.</p> <p>5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.</p> <p>5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.</p> <p>5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.</p>	<p>Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</p> <p>Program Perlindungan Perempuan</p> <p>Program Peningkatan Kualitas Keluarga</p> <p>Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</p> <p>Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</p> <p>Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</p>
Tujuan 6: Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	
<p>6.1 Pada Tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.</p> <p>6.2 Pada Tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.</p> <p>6.3 Pada Tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.</p> <p>6.4 Pada Tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita</p>	<p>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</p> <p>Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</p> <p>Program Perekonomian dan Pembangunan</p> <p>Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat</p> <p>Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen</p> <p>Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</p> <p>Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (PPKS)</p> <p>Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</p> <p>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah</p> <p>Program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</p> <p>Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</p> <p>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</p>
Tujuan 7: Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua	
7.1 Pada Tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	<p>Program Pengelolaan Energi Terbarukan</p> <p>Program Hubungan Industrial</p> <p>Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</p>

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	Program Pembangunan Daerah
7.2 Pada Tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.	Program Perekonomian dan Pembangunan
7.3 Pada Tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
Tujuan 8: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per Tahun di negara kurang berkembang.	Program Perekonomian dan Pembangunan
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	Program Penempatan Tenaga Kerja
8.6 Pada Tahun 2021, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	Program Pembinaan dan Pengawasan Koperasi
8.9 Pada Tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	Program Penilaian dan Pemeriksaan Koperasi
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
	Program Pengembangan UMKM
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	Program Promosi Penanaman Modal
	Program Pelayanan Penanaman Modal
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
	Program Pengembangan Ekspor
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
	Program Penyelenggaraan Jalan
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
	Program Hubungan Industrial
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	Program Pembangunan Daerah
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Program Perizinan Usaha Pertanian Program Penyuluhan Pertanian Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Kebudayaan Program Pengembangan Kesenian Daerah Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Program Pengelolaan Permuseuman Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Tujuan 9: Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi	
<p>9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.</p> <p>9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada Tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.</p> <p>9.4 Pada Tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.</p>	Program Hubungan Industrial Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan Darat Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik Program Pengembangan Ekspor Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Program Penyelenggaraan Jalan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Tujuan 10: Mengurangi kesenjangan didalam dan antar negara	
<p>10.1 Pada Tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40persen dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.</p> <p>10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar</p>	Program Kesejahteraan Rakyat Program Hubungan Industrial Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	Program Pembangunan Daerah
Tujuan 11: Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.	
11.1 Pada Tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	Program Kawasan Permukiman Program Penanggulangan Bencana Program Pengendalian, Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
11.5 Pada Tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Program Pengembangan Perumahan Program perencanaan lingkungan hidup Program Kesejahteraan Rakyat
11.6 Pada Tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Program Pengelolaan Persampahan Program penanganan bencana Program pengelolaan keuangan daerah Program Pengembangan Perumahan Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Program Pencegahan, Penganggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
Tujuan 12: Konsumsi & Produksi yang Bertanggung Jawab	
12.4 Pada Tahun 2021 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
12.5 Pada Tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Hidup (PPLH) Program Perizinan Usaha Pertanian

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	Program Pembangunan Daerah
12.8 Pada Tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim	
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Penanganan Bencana Program Perencanaan Lingkungan Hidup
13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Tujuan 14: Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudra, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan	
14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (<i>small-scale artisanal fishers</i>) terhadap sumber daya laut dan pasar.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Program Perencanaan Lingkungan hidup Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Pelestarian sumberdaya pesisir dan perairan umum Pengembangan sentra perikanan dan penguatan kelembagaan usaha Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Tujuan 15: Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghilangkan kehilangan keanekaragaman hayati	
15.1 Pada Tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program Perencanaan Lingkungan Hidup Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Hidup (PPLH)
15.4 Pada Tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Program Pengelolaan Hutan Program Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
15.a Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber	Program Pengendalian, Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	Program Pembangunan Daerah
untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Program Perekonomian dan Pembangunan
Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Perlindungan Khusus Anak
16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	Program Penataan Organisasi Program Administrasi Pemerintahan Desa Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
Tujuan 17: Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Program Pemasaran Pariwisata
Aspek II: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
Menciptakan manajemen pembangunan dan pengelola pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi yang bersandar pada kepentingan rakyat.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Penataan Organisasi Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Program Penyelenggaraan Pengawasan Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Aspek III: Gender	
Menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia melalui pengurangan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Program Perlindungan Perempuan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	Program Pembangunan Daerah
pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan	
Aspek IV: Modal Sosial Budaya dan Transformasi Digital	
1. Internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (<i>local knowledge</i>), kearifan lokal (<i>local wisdom</i>), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
	Program Penataan Desa
	Program Administrasi Pemerintahan Desa
	Program Pengembangan Kebudayaan
	Program Pengelolaan Permuseuman
2. Optimalisasi peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sumber pertumbuhan ekonomi	Program Pembinaan Sejarah
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, Tahun 2024

4.3. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025

Pasal 78 ayat (2) dan (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa dalam penyusunan RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa Pokok-Pokok Pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai masukan dalam perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPD.

Pokok-Pokok Pikiran DPRD ini merupakan daftar permasalahan berupa saran dan pendapat yang didasarkan pada hasil penyerapan aspirasi melalui reses, Dengar Pendapat dengan Mitra Kerja Perangkat Daerah dan Kunjungan Kerja Dewan serta telah disinkronkan dengan prioritas pembangunan Musrenbang di tingkat Pemerintah Kabupaten Kuningan dan dijabarkan lebih lanjut menjadi dokumen KUA dan PPAS.

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 7 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pokok-Pokok DPRD Tahun 2025

Pokok-Pokok Pikiran DPRD 2025	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025
Bidang Hukum, Administrasi, Pemerintahan dan Keuangan:	PPD 5: Peningkatan Tatakelola

Pokok-Pokok Pikiran DPRD 2025	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan produk hukum daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru. 2. Sosialisasi dan publikasi peraturan daerah agar masyarakat lebih mengetahui dan memahami keberadaannya. 3. Sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang harus disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan. 4. Pemaksimalan penataan dan pemanfaatan aset daerah melalui sistem pemetaan aset. 5. Penataan tata ruang wilayah kabupaten Kuningan melalui penetapan peraturan daerah tentang penataan ruang. 6. Peningkatan implementasi administrasi perkantoran melalui penggunaan sistem teknologi informasi online. 7. Peningkatan peran dinas perpustakaan dalam menyediakan sarana prasarana berupa buku perpustakaan yang memadai dan lengkap untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. 	<p>Pemerintahan yang Efektif dan Efisien</p>
<p>Bidang Perekonomian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Kuningan dan mendorong ketahanan pangan dan pertanian dalam memenuhi kebutuhan komoditi pertanian di masyarakat. 2. Koordinasi antara SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan pihak lainnya dalam mengendalikan pertumbuhan dan kebutuhan bibit. 3. Meningkatkan pemasaran produk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dari para pelaku UMKM di Kabupaten Kuningan dan memfasilitasi akses ke pasar modern dan tradisional. 4. Implementasi konsep "One Village One Product" di setiap desa di Kabupaten Kuningan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. 5. Peningkatan produk-produk lokal dengan pembuatan regulasi terkait perlindungan produk lokal daerah. 6. Maksimalisasi kegiatan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke Kabupaten Kuningan dan kontribusinya terhadap pendapatan dan perekonomian masyarakat. 7. Peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan desa wisata dengan memberikan pelatihan bagi pengelola dan mempermudah perijinan desa wisata 	<p>PPD 4: Peningkatan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif</p> <p>PPD 2: Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah Menuju Daerah Unggul</p>
<p>Bidang Pembangunan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan program dan kegiatan infrastruktur di Kabupaten Kuningan, terutama pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan untuk meningkatkan kelancaran transportasi dan 	<p>PPD 2: Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah Menuju Daerah Unggul</p>

Pokok-Pokok Pikiran DPRD 2025	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025
<p>perekonomian masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pemerataan penerangan jalan umum (PJU) di wilayah Kabupaten Kuningan. 3. Koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terkait kebijakan anggaran untuk pembangunan yang merata. Pemerintah pusat dan provinsi terus memberikan dukungan anggaran secara berkelanjutan untuk Kabupaten Kuningan. 	
<p>Bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan Sosial:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyaluran program bantuan pangan non-tunai, Program Keluarga Harapan, BPJS JKN PBI, dan Kartu Pintar bagi keluarga miskin yang perlu dievaluasi dan diperbaiki terkait data calon penerima bantuan. 2. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui program pelatihan ketenagakerjaan. 3. Pemerintah daerah perlu mendorong program dan kegiatan baru atau peningkatan anggaran pada program yang menjadi prioritas dalam penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Kuningan. 4. Pencegahan kasus kekerasan seksual terhadap anak didik melalui pembinaan dan sosialisasi di sekolah-sekolah dengan anggaran yang memadai. 5. Peningkatan pelayanan kesehatan melalui peningkatan sarana prasarana kendaraan mobil ambulance yang memadai atau peremajaan. 6. Peningkatan SDM dan penguatan institusi keluarga melalui optimalisasi kampung keluarga berkualitas dengan sinergi antar SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam mendukung dan menyiapkan program dan kegiatan di masing-masing SKPD. 7. Penataan administrasi terkait pengelolaan validasi data fakir miskin yang terus ditingkatkan, baik pendataan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan non-DTKS di setiap desa dan kecamatan di Kabupaten Kuningan. 8. Pembimbingan dan perhatian terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dengan mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan rumah singgah di Kabupaten Kuningan. 9. Maksimalisasi pelayanan bidang kesehatan di Kabupaten Kuningan dengan mengapresiasi pembukaan poliklinik untuk penderita talasemia dan jiwa di RSUD 45 (eks Citra Ibu) dan mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Kuningan. 10. Peningkatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit 	<p>PPD 3: Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif PPD 1: Peningkatan Pemerataan Pembangunan Daerah</p>

Pokok-Pokok Pikiran DPRD 2025	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025
<p>Lingarjati Kuningan dengan mendorong perubahan status rumah sakit dari tipe C menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit.</p> <p>11. Merencanakan program dan kegiatan pada setiap SKPD sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga dan Pondok Pesantren.</p>	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, Tahun 2024

Usulan Pokok-pokok Pikiran DPRD pada Perubahan RKPD Tahun 2025 ini sesuai dengan tahapan perencanaan dalam SIPD telah memasuki tahapan verifikasi dan validasi oleh TAPD untuk disetujui menjadi bagian dari Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Jumlah usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD pada Perubahan RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2025 ini sebanyak 705 usulan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian rencana strategis, prioritas pembangunan daerah, prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Secara keseluruhan proses penyusunan rencana program dan kegiatan prioritas dilakukan melalui pendekatan perencanaan komprehensif yang meliputi pendekatan partisipatif, teknokratis, politik, atas bawah (*top down*) dan bawah atas (*bottom up*) dengan memperhatikan hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya dan rencana target capaian kinerja program yang ditetapkan dalam RPJMD 2025-2029. Dalam proses perumusan program dan kegiatan pada perubahan tahun 2025, selain memperhatikan RPJMD 2025-2029 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, juga mempertimbangkan pemenuhan alokasi anggaran dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Rencana kerja dan pendanaan daerah pada perubahan tahun 2025 disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Rencana kerja Kabupaten Kuningan tahun 2025 disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 untuk menjaga keselarasan antara program, kegiatan serta sasaran dan prioritas pembangunan daerah, dan mengacu pada rancangan Renstra Perangkat Daerah yang bertujuan menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, sasaran prakiraan maju.

Rencana kerja pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Perubahan RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2025 disusun dengan sumber pendanaan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten dengan rincian perubahan penjabaran APBD adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Penjabaran I (Peraturan Kepala Daerah Nomor 03 Tahun 2025 Tanggal 21 Maret 2025):
 - a. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. Penyesuaian atas penerimaan pendapatan dana transfer baik itu pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah;
 - c. Penyesuaian belanja daerah;
 - d. Penyesuaian atas penerimaan pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
2. Perubahan Penjabaran II ;
 - a. Penyesuaian belanja operasi dan belanja modal
 - b. Penyesuaian penerimaan pembiayaan dalam bentuk penerimaan pinjaman daerah (pinjaman daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB))

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Pergeseran APBD Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 5.1 Target Pendapatan APBD dan Pergeseran APBD Kabupaten Kuningan Tahun 2025.

Tabel 5. 1 Target Pendapatan APBD dan Pergeseran APBD Kabupaten Kuningan Tahun 2025

URAIAN	APBD TA. 2023	APBD TA. 2024	MURNI TA. 2025	PERUBAHAN TA. 2025
PENDAPATAN DAERAH	2.870.865.870.222	3.154.882.748.400	2.948.175.468.387	2.830.145.830.255
Pendapatan Asli Daerah	366.122.431.705	386.370.523.173	481.313.142.004	475.151.693.350
Pajak Daerah	118.620.000.000	143.249.772.509	242.589.687.886	235.353.291.920
Retribusi Daerah	63.626.544.012	36.522.292.664	39.151.299.448	39.151.299.448
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.589.371.352	6.644.943.280	7.033.476.838	6.667.050.651
Lain-lain PAD Yang Sah	177.286.516.341	199.953.514.720	192.538.677.832	193.980.051.331
Pendapatan Transfer	2.498.743.438.517	2.721.579.319.604	2.421.705.847.499	2.305.952.726.922
Transfer Pemerintah Pusat	2.113.432.942.000	2.457.865.655.093	2.176.282.517.000	2.176.282.517.000
Transfer Antar-Daerah	385.310.496.517	263.713.664.511	245.423.330.499	129.670.209.922
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	6.000.000.000	46.932.905.623	45.156.478.884	49.041.409.983
Hibah	6.000.000.000	-	-	-

URAIAN	APBD TA. 2023	APBD TA. 2024	MURNI TA. 2025	PERUBAHAN TA. 2025
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	46.932.905.623	45.156.478.884	49.041.409.983
BELANJA DAERAH	2.832.406.522.597	3.194.961.260.660	2.972.120.881.074	2.964.780.553.246
Belanja Operasi	2.050.927.037.669	2.308.724.729.405	2.219.973.039.502	2.271.445.742.642
Belanja Pegawai	1.156.334.253.676	1.340.172.985.214	1.356.520.043.069	1.407.246.586.683
Belanja Barang dan Jasa	798.540.060.243	843.588.100.941	780.248.546.683	788.660.646.171
Belanja Subsidi	0	4.000.000.000	0	1.700.000.000
Belanja Hibah	81.576.613.750	115.665.018.250	75.839.982.250	66.189.982.250
Belanja Bantuan Sosial	14.476.110.000	5.298.625.000	7.364.467.500	7.648.527.500
Belanja Modal	290.211.343.128	377.256.885.831	247.488.134.572	188.675.103.642
Belanja Modal Tanah	29.450.000.000	181.406.240	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.735.765.273	196.866.679.346	128.045.731.764	58.265.823.884
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	120.951.963.440	121.585.489.807	50.488.362.459	52.698.862.459
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	39.940.000.000	51.856.098.350	46.591.870.833	55.306.190.833
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	29.602.473.519	6.130.988.273	22.062.938.766	22.104.995.716
Belanja Aset Lainnya	531.140.896	636.223.815	299.230.750	299.230.750
Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000
Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000
Belanja Transfer	474.983.763.424	496.979.645.424	492.659.707.000	492.659.707.000
Belanja Bagi Hasil	11.269.123.424	18.669.123.424	14.658.000.000	14.658.000.000
Belanja Bantuan Keuangan	463.714.640.000	478.310.522.000	478.001.707.000	478.001.707.000
Jumlah Belanja			2.972.120.881.074	2.964.780.553.246
Total Surplus/Defisit			-23.945.412.687	-134.634.722.991
PEMBIAYAAN DAERAH	-26.500.000.000	36.440.516.965	23.945.412.687	134.634.722.991
Penerimaan Pembiayaan Daerah	0	96.440.516.965	48.945.412.687	159.634.722.991
SILPA Tahun Sebelumnya	0	15.340.516.965	23.945.412.687	23.945.412.687
Pencairan Dana Cadangan	0	21.100.000.000	-	-
Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	0	60.000.000.000	25.000.000.000	135.689.310.304
Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
Pinjaman Luar Negeri	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	26.500.000.000	60.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
Pembayaran Cicilan Pokok Utang	0	60.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000	-	-	-
Pembentukan Dana Cadangan	23.500.000.000			

URAIAN	APBD TA. 2023	APBD TA. 2024	MURNI TA. 2025	PERUBAHAN TA. 2025
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
	-	-	-	-
DEFISIT/SURPLUS	0	0	0	0

Sumber: BPKAD Kabupaten Kuningan, 2025

Tabel 5. 2 Belanja APBD dan Pergeseran APBD Kabupaten Kuningan

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	BATASAN PAGU PERUBAHAN RKPD
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.154.953.709.747	1.113.997.060.947
2	DINAS KESEHATAN	513.057.480.857	532.018.615.819
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	118.876.956.889	130.168.922.014
4	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	70.731.882.743	54.534.732.743
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	22.555.801.784	23.358.941.809
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.290.166.489	4.357.625.839
7	DINAS SOSIAL	7.959.591.130	8.446.960.080
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	8.984.866.501	9.453.861.676
9	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	48.909.673.906	54.972.979.756
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	20.617.687.902	20.904.562.902
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.214.970.828	9.488.128.653
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	25.632.612.234	16.771.674.459
13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	24.036.219.220	24.332.736.370
14	DINAS PERHUBUNGAN	29.291.806.458	28.144.142.983
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	15.363.590.170	15.859.201.820
16	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	23.965.813.024	24.536.635.674

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	BATASAN PAGU PERUBAHAN RKPD
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6.448.326.695	6.630.426.695
18	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA	29.850.161.817	23.845.958.844
19	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	6.653.672.230	6.803.822.230
20	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	35.009.720.745	52.766.695.745
21	SEKRETARIAT DAERAH	65.674.575.502	65.273.621.902
22	SEKRETARIAT DPRD	63.804.622.608	63.966.022.502
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	8.264.822.060	8.718.242.380
24	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	17.545.396.142	17.718.300.592
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	517.153.696.982	519.751.944.707
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	11.539.291.410	12.796.997.410
27	INSPEKTORAT	18.287.818.813	18.752.386.087
28	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	12.966.856.540	12.973.292.365
29	KECAMATAN CILIMUS	2.347.337.531	2.422.937.531
30	KECAMATAN CIWARU	1.827.858.961	1.891.631.911
31	KECAMATAN DARMA	1.787.866.973	1.848.327.473
32	KECAMATAN GARAWANGI	2.114.205.515	2.185.755.515
33	KECAMATAN JALAKSANA	2.215.068.091	2.282.246.641
34	KECAMATAN KADUGEDE	2.024.948.532	2.088.739.782
35	KECAMATAN KARANGKANCANA	1.827.472.242	1.891.584.342
36	KECAMATAN KRAMATMULYA	2.196.849.974	2.272.524.974
37	KECAMATAN KUNINGAN	14.241.353.454	14.575.728.504
38	KECAMATAN LEBAKWANGI	2.138.667.149	2.209.842.149
39	KECAMATAN LURAGUNG	2.328.638.909	2.399.641.409
40	KECAMATAN MALEBER	1.922.248.961	1.984.674.911
41	KECAMATAN MANDIRANCAN	1.951.650.988	2.014.819.738
42	KECAMATAN PANCALANG	1.942.600.501	2.008.185.001
43	KECAMATAN SINDANGAGUNG	1.803.420.384	1.867.500.384

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	BATASAN PAGU PERUBAHAN RKPD
44	KECAMATAN CIBEUREUM	1.695.862.709	1.747.688.984
45	KECAMATAN CIGUGUR	8.032.361.392	8.226.721.117
46	KECAMATAN CILEBAK	1.618.302.045	1.677.102.045
47	KECAMATAN CIMAHI	1.650.976.044	1.711.651.044
48	KECAMATAN CINIRU	1.675.471.852	1.735.661.452
49	KECAMATAN CIPICUNG	2.078.794.618	2.142.658.768
50	KECAMATAN HANTARA	1.998.240.415	2.061.840.415
51	KECAMATAN JAPARA	1.752.739.881	1.815.214.881
52	KECAMATAN KALIMANGGIS	2.114.241.155	2.181.438.755
53	KECAMATAN NUSAHERANG	1.885.537.039	1.948.824.583
54	KECAMATAN PASAWAHAN	1.528.021.973	1.587.044.873
55	KECAMATAN SELAJAMBE	1.814.589.381	1.874.305.731
56	KECAMATAN SUBANG	1.571.859.075	1.630.151.175
57	KECAMATAN CIAWIGEBANG	2.414.319.117	2.489.934.642
58	KECAMATAN CIBINGBIN	2.205.870.510	2.273.897.010
59	KECAMATAN CIDAHU	1.616.908.920	1.669.500.420
60	KECAMATAN CIGANDAMEKAR	2.154.805.357	2.218.282.057
Total Pagu		2.972.120.881.074	2.964.280.553.246

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Substansi pada Perubahan RKPD Tahun 2025 di antaranya yaitu adanya penyesuaian pagu dan indikator kinerja program, kegiatan, sub kegiatan sesuai yang tercantum pada Tabel 5.3. Perubahan ini dilakukan sehubungan dengan kemampuan fiskal Kabupaten Kuningan mengalami penurunan. Meskipun demikian pemerintahan daerah tetap memprioritaskan program, kegiatan dan sub kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan dasar untuk masyarakat tetap dapat berjalan.

Rekapitulasi rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2025 menurut Perangkat Daerah pelaksana disajikan pada tabel 5.3 berikut.

Tabel 5. 3 Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perubahan RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2025 berdasarkan Perangkat Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	BATASAN PAGU SKPD	Sumber Pendanaan
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	7	14	108	1.113.997.060.947	APBN/APBD Prov/APBD Kab
2	DINAS KESEHATAN	9	77	910	532.018.615.819	APBN/APBD Prov/APBD Kab
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	2	3	87	130.168.922.014	APBN/APBD Prov/APBD Kab
4	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	3	12	44	54.534.732.743	APBN/APBD Prov/APBD Kab
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	11	23	37	23.358.941.809	APBN/APBD Prov/APBD Kab
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8	18	49	4.357.625.839	APBN/APBD Prov/APBD Kab
7	DINAS SOSIAL	3	10	64	8.446.960.080	APBN/APBD Prov/APBD Kab
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2	11	40	9.453.861.676	APBN/APBD Prov/APBD Kab
9	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	6	15	39	54.972.979.756	APBN/APBD Prov/APBD Kab
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7	16	62	20.904.562.902	APBN/APBD Prov/APBD Kab
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8	14	37	9.488.128.653	APBN/APBD Prov/APBD Kab
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10	18	43	16.771.674.459	APBN/APBD Prov/APBD Kab
13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5	17	71	24.332.736.370	APBN/APBD Prov/APBD Kab
14	DINAS PERHUBUNGAN	5	11	47	28.144.142.983	APBN/APBD Prov/APBD Kab
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	11	29	50	15.859.201.820	APBN/APBD Prov/APBD Kab

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	BATASAN PAGU SKPD	Sumber Pendanaan
16	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2	15	43	24.536.635.674	APBN/APBD Prov/APBD Kab
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5	12	36	6.630.426.695	APBN/APBD Prov/APBD Kab
18	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA	16	21	52	23.845.958.844	APBN/APBD Prov/APBD Kab
19	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	6	11	44	6.803.822.230	APBN/APBD Prov/APBD Kab
20	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	8	19	41	52.766.695.745	APBN/APBD Prov/APBD Kab
21	SEKRETARIAT DAERAH	4	12	73	65.273.621.902	APBN/APBD Prov/APBD Kab
22	SEKRETARIAT DPRD	7	20	34	63.966.022.502	APBN/APBD Prov/APBD Kab
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3	19	54	8.718.242.380	APBN/APBD Prov/APBD Kab
24	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2	14	35	17.718.300.592	APBN/APBD Prov/APBD Kab
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	4	13	44	519.751.944.707	APBN/APBD Prov/APBD Kab
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2	8	49	12.796.997.410	APBN/APBD Prov/APBD Kab
27	INSPEKTORAT	3	11	33	18.752.386.087	APBN/APBD Prov/APBD Kab
28	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3	13	22	12.973.292.365	APBN/APBD Prov/APBD Kab
29	KECAMATAN CILIMUS	3	11	19	2.422.937.531	APBD Kab
30	KECAMATAN CIWARU	5	9	23	1.891.631.911	APBD Kab
31	KECAMATAN DARMA	5	12	26	1.848.327.473	APBD Kab
32	KECAMATAN GARAWANGI	5	10	23	2.185.755.515	APBD Kab

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	BATASAN PAGU SKPD	Sumber Pendanaan
33	KECAMATAN JALAKSANA	6	10	22	2.282.246.641	APBD Kab
34	KECAMATAN KADUGEDE	6	10	23	2.088.739.782	APBD Kab
35	KECAMATAN KARANGKANCANA	6	10	24	1.891.584.342	APBD Kab
36	KECAMATAN KRAMATMULYA	6	10	21	2.272.524.974	APBD Kab
37	KECAMATAN KUNINGAN	6	10	32	14.575.728.504	APBD Kab
38	KECAMATAN LEBAKWANGI	4	8	20	2.209.842.149	APBD Kab
39	KECAMATAN LURAGUNG	6	13	20	2.399.641.409	APBD Kab
40	KECAMATAN MALEBER	6	10	20	1.984.674.911	APBD Kab
41	KECAMATAN MANDIRANCAN	6	9	21	2.014.819.738	APBD Kab
42	KECAMATAN PANCALANG	6	10	24	2.008.185.001	APBD Kab
43	KECAMATAN SINDANGAGUNG	5	9	17	1.867.500.384	APBD Kab
44	KECAMATAN CIBEUREUM	6	11	22	1.747.688.984	APBD Kab
45	KECAMATAN CIGUGUR	5	9	32	8.226.721.117	APBD Kab
46	KECAMATAN CILEBAK	6	10	23	1.677.102.045	APBD Kab
47	KECAMATAN CIMAHI	6	13	23	1.711.651.044	APBD Kab
48	KECAMATAN CINIRU	6	11	19	1.735.661.452	APBD Kab
49	KECAMATAN CIPICUNG	6	10	20	2.142.658.768	APBD Kab
50	KECAMATAN HANTARA	6	9	25	2.061.840.415	APBD Kab
51	KECAMATAN JAPARA	6	10	22	1.815.214.881	APBD Kab
52	KECAMATAN KALIMANGGIS	5	10	23	2.181.438.755	APBD Kab
53	KECAMATAN NUSAHERANG	5	9	24	1.948.824.583	APBD Kab
54	KECAMATAN PASAWAHAN	6	10	21	1.587.044.873	APBD Kab
55	KECAMATAN SELAJAMBE	6	10	21	1.874.305.731	APBD Kab
56	KECAMATAN SUBANG	6	10	21	1.630.151.175	APBD Kab
57	KECAMATAN CIAWIGEBANG	6	10	20	2.489.934.642	APBD Kab
58	KECAMATAN CIBINGBIN	6	10	24	2.273.897.010	APBD Kab
59	KECAMATAN CIDAHU	6	10	25	1.669.500.420	APBD Kab

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	BATASAN PAGU SKPD	Sumber Pendanaan
60	KECAMATAN CIGANDAMEKAR	6	11	22	2.218.282.057	APBD Kab

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Perubahan RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2025 disajikan secara terperinci dalam Lampiran II Perubahan RKPD Tahun 2025.

Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM dalam pembangunan di Kabupaten Kuningan Tahun 2024. yaitu:

1. Urusan Bidang Pendidikan

Jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan pendidikan meliputi:

- a. Pendidikan dasar;
- b. Pendidikan kesetaraan;
- c. Pendidikan anak usia dini.

Berikut ini merupakan Capaian penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan bidang Pendidikan Tahun 2024:

Tabel 5. 4 Capaian SPM Pendidikan Tahun 2024 dan Target Tahun 2025

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Total Pencapaian (%)	Target 2025 (%)
1.	Pendidikan Dasar Usia Dini	96,07	100
2.	Pendidikan Dasar	97,00	100
3.	Pendidikan Kesetaraan	95,46	100
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		96,07 (Tuntas Utama)	100

Sumber: Laporan SPM Kabupaten Kuningan

2. Urusan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Standar Pelayanan Minimal

Bidang Kesehatan. Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- d. Pelayanan Kesehatan Balita
- e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
- f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
- h. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi
- i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
- j. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
- k. Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis
- l. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus/HIV)

Berikut ini merupakan Capaian penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan bidang Kesehatan di Kabupaten Kuningan pada Tahun 2024:

Tabel 5. 5 Capaian SPM Kesehatan Tahun 2024 dan Target Tahun 2025

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Total Pencapaian (%)	Target 2025 (%)
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	69,15	100
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	74,39	100
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	97,97	100
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	83,16	100
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	96,39	100
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	64,23	100
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	92,44	100
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	87,51	100
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	84,23	100
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	97,29	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	86,64	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan	80,55	100

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Total Pencapaian (%)	Target 2025 (%)
	Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)		
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		82,83 (TUNTAS Madya)	100

Sumber: Laporan SPM Kabupaten Kuningan Tahun 2024

3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 20 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah:

- a. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah

Berikut ini merupakan capaian penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan bidang pekerjaan umum Kabupaten Kuningan Tahun 2024.

Tabel 5. 6 Capaian SPM Pekerjaan Umum Tahun 2024 dan Target Tahun 2025

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Total Pencapaian 2024 (%)	Target 2025
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	100	100
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	90,49	100
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		95,24 (Tuntas Utama)	100

Sumber: Laporan SPM Kabupaten Kuningan Tahun 2024

4. Bidang Urusan Perumahan dan Pemukiman

Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten / Kota. Berikut ini merupakan Capaian penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

urusan bidang perumahan dan permukiman di Kabupaten Kuningan Tahun 2024.

Tabel 5. 7 Capaian SPM Perumahan dan Permukiman Tahun 2024 dan Target Tahun 2025

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Total Pencapaian 2024 (%)	Target 2025 (%)
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100	100
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	100
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	100 (Tuntas Paripurna)	100

Sumber: Laporan SPM Kabupaten Kuningan Tahun 2024

5. Bidang Urusan Trantibum

Cakupan pelayanan dasar yang menjadi indikator SPM Satpol PP Kabupaten Kuningan berdasarkan amanat Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal, maka seiring dengan terbitnya produk legislasi nasional seperti Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Perangkat Daerah, dilanjutkan dengan turunannya dalam produk legislasi daerah Kabupaten Kuningan yang mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas serta tata kerjanya, telah menyebabkan perubahan cakupan indikator SPM Satpol PP menjadi:

- a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum terhadap jumlah penegakan Perda sesuai mutu;
- b. Pelayanan informasi rawan bencana;
- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. Pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana; dan
- e. Pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban kebakaran.

Untuk Capaian penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Satpol PP dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5. 8 Capaian SPM Ketentraman dan Ketertiban Tahun 2024 dan Target Tahun 2025

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM			
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Total Pencapaian 2024 (%)	Target 2025 (%)
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	100	100
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM	100,00 (Tuntas Paripurna)	100
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	100	100
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	100	100
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	100	100
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN	100 (Tuntas Paripurna)	100
1.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	100	100
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR	100 (Tuntas Paripurna)	100

Sumber: Laporan SPM Kabupaten Kuningan Tahun 2024

6. BIDANG URUSAN SOSIAL

Jenis pelayanan dasar bidang sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kuningan Tahun 2022 meliputi 5 (Lima) jenis pelayanan dasar yaitu:

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten.

Berikut ini merupakan Capaian penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan bidang sosia Kabupaten Kuningan Tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5. 9 Capaian SPM Sosial Tahun 2024 dan Target Tahun 2025

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Total Pencapaian 2024 (%)	Target 2025 (%)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	100	100
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	100	100
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	100	100
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana	100	100
5	Kabupaten/Kota	100	100
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	100.00 (Tuntas Paripurna)	100

Sumber: Laporan SPM Kabupaten Kuningan Tahun 2024

BAB VI PENUTUP

Penyusunan dokumen perubahan RKPD Tahun 2025 dimaksudkan untuk menjaga keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam menentukan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025, sebagaimana amanat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dan sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dalam penyusunannya, Perubahan RKPD dilaksanakan dengan melakukan penyesuaian kebijakan dan target pembangunan daerah serta penyesuaian kerangka pendanaan berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 serta memperhatikan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih. Perubahan RKPD Tahun 2025 selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2025 yang akan disepakati bersama antara Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lebih lanjut dokumen KUPA-PPASP Tahun 2025 yang telah disepakati tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dasar di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025. Pencapaian tujuan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi bagian penting untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Kuningan pada Tahun 2025.

BUPATI KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR